

CARA

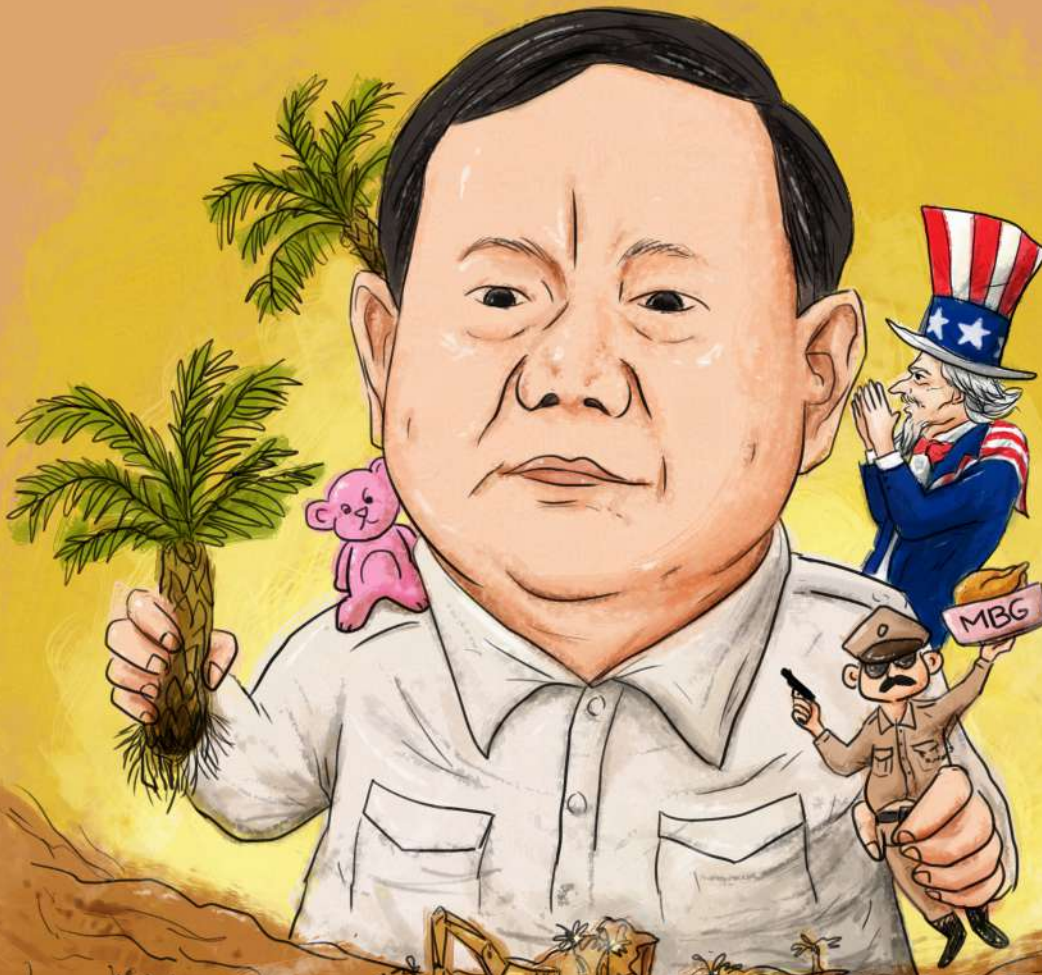
Edisi Februari 2026

PANDANG

Inspirasi Terkini!

REVITALISASI
MEMBANGUN NEGERI

KONTROVERSI MBG



INDONESIA, POLITIK, DAN BENCANA

Periode 1 Juni - 31 Desember 2025

Pindah Payroll ke BNI Dapatkan Berbagai Benefit

Reward Cashback hingga

Rp500 Ribu

**Special Rate
Fasilitas Pinjaman**

Bonus hingga

**100 Kupon Undian
rejeki **wondr** BNI**

Cash Reward **1%**
untuk Perusahaan



Dapatkan
kesempatan mengikuti
rejeki **wondr BNI**

Informasi Selengkapnya
bni.id/payroll

DAFTAR ISI

<u>TAJUK</u>	5
<u>POLITIK</u>	
MENGUJI KESAKTIAN JOKOWI	12
JOKOWI PANIK NASIB GIBRAN TAK AMAN DI PILPRES 2029	19
PARTAI BARUDAN ORNAMEN DEMOKRASI	26
<u>EKONOMI</u>	
KONTROVERSI PENGANGKATAN 32.000 PEGAWAI MBG JADI PPPK: ANTARA PRIORITAS PROGRAM DAN KECEMBURUAN SEKTORAL	30
<u>HUMANIORA</u>	
TRAGEDI CISARUA, 25 MENIT YANG MENCEKAM DI BANDUNG BARAT	36
<u>INTERNASIONAL</u>	
NAFSU BESAR AMERIKA SERIKAT MENGUASAI MINYAK DUNIA: VENEZUELA, IRAN, DAN GEOPOLITIK ENERGI	44
<u>BEBAS AKTIF</u>	
INDONESIA GABUNG BOARD OF PEACE: STRATEGI DIPLOMASI GLOBAL ATAU LANGKAH KONTROVERSIAL?	48
<u>HUKUM INTERNASIONAL</u>	
DI BALIK ARSIP EPSTEIN: JEJAK ELIT, LUKA KORBAN, DAN UJIAN TRANSPARANSI	54
<u>EDUKASI</u>	
KONSOLNAS DIKDASMEN 2026: MENYATUKAN ARAH, MEMPERCEPAT AKSI, MENJAWAB KESENJANGAN	58



HUKUM DAN KRIMINAL

MEMBEDAH MENS REA: KONTROVERSI STAND-UP SPESIAL PANDJI PRAGIWAKSONO DAN PERTARUHAN BATAS SATIRE DI RUANG PUBLIK

6

Di atas panggung megah Indonesia Arena, Senayan, pada 30 Agustus 2025, Pandji Pragiwaksono berdiri seorang diri. Sorot lampu tepat mengenainya. Hening sesaat, lalu tawa 10.000 pasang mata memecah udara. Itu adalah malam puncak dari Mens Rea, sebuah konser spesial komedi tunggal yang dirancang sebagai perayaan sekaligus pernyataan.

<u>EDUKASI</u>	
PERBAIKAN SEKOLAH DI GARIS DEPAN: KOMITMEN KEMENDIKDASMEN UNTUK PENINGKATAN MUTU LINGKUNGAN BELAJAR	76
REVITALISASI PENDIDIKAN PASCA BENCANA SUMATERA: DARI TENDA DARURAT KE SEKOLAH TANGGUH	82

<u>OPINI</u>	
KESEJAHTERAAN GURU HARUS TERUS DIPERJUANGKAN	94
<u>NOVEL</u>	
"LAUT BERCEKITA" – LUKA SEJARAH DAN SUARA YANG TAK PERNAH PADAM	96

<u>FILM</u>	
"I WAS A STRANGER" – DRAMA KEMANUSIAAN DI TENGAH KRISIS PENGUNSI	98

Evaluasi Logistik “Makan Bergizi Gratis”

“Program Makan Bergizi Gratis memang langkah berani untuk masa depan generasi kita. Namun, sebagai orang tua, saya mengamati adanya ketimpangan kualitas menu antarwilayah. Di beberapa sekolah, asupan protein sudah sangat baik, tapi di daerah lain masih didominasi karbohidrat. Selain itu, masalah sampah kemasan sekali pakai mulai menumpuk di lingkungan sekolah. Mohon pemerintah tidak hanya fokus pada ‘anggaran terserap’, tapi juga pada standarisasi nutrisi dan manajemen limbahnya agar niat baik ini tidak menyisakan masalah lingkungan di masa depan.”

Budi Santoso
(Wali Murid – Surabaya)

Konsistensi Kurikulum Pendidikan Dasar & Menengah

“Memasuki tahun 2026, tantangan pendidikan kita bukan lagi sekadar digitalisasi, melainkan beban administrasi guru yang tak kunjung surut. Transformasi kurikulum di jenjang dasar dan menengah seringkali membuat pengajar lebih sibuk mengisi aplikasi daripada berinteraksi dengan siswa. Kita butuh stabilitas kebijakan. Jangan sampai setiap pergantian kepemimpinan menjadi ajang eksperimen kurikulum baru yang hanya membingungkan sekolah di daerah terpencil. Mari fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru secara nyata, bukan sekadar administratif.”

Siti Aminah
(Praktisi Pendidikan – Bandung)

Tanggung Jawab di Board of Peace

“Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace adalah prestasi diplomasi yang patut diapresiasi. Ini membuktikan posisi tawar kita di panggung global semakin kuat. Namun, keanggotaan ini bukan sekadar panggung seremonial. Indonesia harus berani mengambil posisi tegas dalam konflik-konflik kemanusiaan global tanpa terjebak kepentingan blok tertentu. Sebagai anggota, kita punya beban moral untuk memastikan kebijakan luar negeri kita selaras dengan penegakan perdamaian di dalam negeri sendiri. Jangan sampai kita menjadi juru damai dunia, namun masih gagap menyelesaikan konflik horizontal di tanah air.”

Raditya Pratama
(Pengamat Hubungan
Internasional – Jakarta)



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Faozan Amar, S.Ag, M.M., Jalu Dwi Putranto S.IP

Pemimpin Umum: Zulfikar Rachman **Ombudsman:** Mahmud Marhaba (Ahli Pers Dewan Pers) **Direktur:** Michael Malik

Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab: Habibi **Wakil Pimred:** Amir Fiqi, Mujamin Jassin **Koordinator Daerah:** Nafik Muthohirin (Jawa Timur), Wiwin Alfianti (Riau), Hamid Toliu (Gorontalo), Linda Sari (Sumatera Barat) **Redaktur Pelaksana:** Amir Fiqi, Edo Soeryadi **Redaktur:** Rais Syauqi, Jirga R. Azka, Amira Izzati, Wiwin Alfianti, Zoel Rachman, Haedar Zafran **IT Support:** Zulfikar Iskandar, Dede Hidayatullah **Kreatif:** Robby Firmansyah, Hengki **Media Sosial:** Obie **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayah

Alamat Redaksi Pusat

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp: (021) 82760392 dan (021) 21383521
Email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

Indonesia berada di persimpangan yang menentukan masa depannya: gelombang perubahan politik yang menjanjikan reformasi bertemu dengan realitas bencana alam yang semakin sering dan intens. Di balik retorika kampanye dan janji-janji kebijakan, persoalan paling mendesak adalah bagaimana negara, lembaga sipil, dan komunitas lokal menyusun ulang prioritas untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan ekonomi, dan menjaga kohesi sosial. Politik bukan sekadar arena pertarungan kekuasaan; ia adalah mesin yang mengalokasikan sumber daya, menetapkan standar pembangunan, dan menentukan seberapa cepat serta adil respons ketika gempa, banjir, atau longsor melanda. Ketika anggaran mitigasi dipinggirkan demi proyek yang lebih terlihat secara politik, kerentanan masyarakat bertambah, dan biaya pemulihan di masa depan membengkak. Sebaliknya, kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang mampu menurunkan risiko, memperkuat infrastruktur, dan memberi ruang bagi komunitas untuk bangkit lebih cepat.

Dalam konteks itu, muncul gagasan institusi mediasi baru seperti Board of Peace yang berupaya menjembatani celah antara kebutuhan darurat dan tuntutan rekonsiliasi sosial. Bencana sering kali memperburuk ketegangan lama: perebutan lahan, akses air, dan bantuan yang tidak merata dapat memicu konflik horizontal yang menghambat proses pemulihan. Board of Peace hadir bukan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan untuk menjadi fasilitator yang mampu meredakan konflik sumber daya, menyelaraskan bantuan lintas sektor, dan memfasilitasi dialog rekonsiliasi. Keberhasilan lembaga semacam ini bergantung pada legitimasi lokal, transparansi proses, dan kemampuan menjembatani kepentingan berbeda tanpa mempolitisasi bantuan. Ketika dijalankan dengan prinsip inklusif, Board of Peace dapat mempercepat pemulihan sosial dan mencegah luka kolektif yang berkepanjangan.

Salah satu arena paling strategis untuk menerapkan prinsip ketahanan adalah sekolah. Sekolah bukan hanya tempat belajar; dalam situasi bencana, sekolah berfungsi sebagai pusat evakuasi, titik layanan psikososial, dan pusat koordinasi pemulihan. Revitalisasi sekolah harus melampaui perbaikan fisik bangunan dan memasukkan desain yang aman, kurikulum kesiapsiagaan bencana, serta pelatihan bagi guru untuk manajemen krisis dan dukungan psikososial. Sekolah yang dirancang tahan

bencana dan menjadi pusat pelatihan kesiapsiagaan bagi warga sekitar memperkuat ketahanan komunitas secara keseluruhan. Pendanaan revitalisasi perlu bersifat berkelanjutan, memadukan anggaran pemerintah, dukungan donor, dan kontribusi komunitas agar pemeliharaan jangka panjang terjamin. Dengan menjadikan sekolah sebagai pusat ketahanan, negara tidak hanya melindungi hak belajar anak-anak, tetapi juga menanamkan budaya kesiapsiagaan yang akan mengurangi dampak bencana pada generasi mendatang.

Transformasi yang dibutuhkan tidak akan terjadi tanpa komitmen politik yang kuat. Integrasi mitigasi ke dalam agenda pembangunan nasional harus disertai alokasi anggaran yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Sentralisasi kebijakan tanpa penguatan kapasitas daerah akan membuat respons lamban dan tidak tepat sasaran, sementara desentralisasi tanpa pengawasan membuka celah bagi penyalahgunaan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan teknis, dukungan pendanaan yang fleksibel, dan sistem monitoring yang transparan menjadi kunci agar kebijakan yang baik dapat diimplementasikan di lapangan. Selain itu, kolaborasi multi-pemangku kepentingan—pemerintah, lembaga internasional, LSM, sektor swasta, dan komunitas—harus dibangun di atas prinsip saling menghormati dan pembagian peran yang jelas.

Akhirnya, narasi publik perlu bergeser dari sekadar menghitung kerugian menjadi membayangkan masa depan yang lebih tangguh. Ketahanan bukan biaya yang harus dipangkas, melainkan investasi yang mengurangi beban sosial dan ekonomi jangka panjang. Politik yang bertanggung jawab mengukur keberhasilan bukan hanya dari proyek yang megah, tetapi dari kemampuan melindungi warga paling rentan, menjaga kesinambungan pendidikan, dan memulihkan kehidupan komunitas setelah krisis. Jika Indonesia mampu menyelaraskan kebijakan politik dengan praktik berbasis komunitas, memperkuat mekanisme mediasi seperti Board of Peace, dan menjadikan revitalisasi sekolah sebagai prioritas strategis, negara ini tidak hanya akan pulih dari bencana, tetapi juga akan tumbuh menjadi lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Transformasi itu menuntut keberanian politik, kepemimpinan yang visioner, dan komitmen kolektif untuk menempatkan ketahanan sebagai ukuran sejati dari pembangunan.

MEMBEDAH MENS REA:

KONTROVERSI STAND-UP SPESIAL PANDJI PRAGIWAKSONO DAN PERTARUHAN BATAS SATIRE DI RUANG PUBLIK

Di atas panggung megah Indonesia Arena, Senayan, pada 30 Agustus 2025, Pandji Pragiwaksono berdiri seorang diri. Sorot lampu tepat mengenainya. Hening sesaat, lalu tawa 10.000 pasang mata memecah udara. Itu adalah malam puncak dari *Mens Rea*, sebuah konser spesial komedi tunggal yang dirancang sebagai perayaan sekaligus pernyataan.

Empat bulan kemudian, pada 27 Desember 2025, tayangan spesial tersebut tiba di Netflix. Alih-alih menuai pujian semata, panggung itu justru menjerumuskan Pandji ke pusaran hukum. Bukan tawa yang ia dapatkan dari sebagian kalangan, melainkan pasal-pasal pidana.

Lima laporan polisi dan satu pengaduan masyarakat masuk ke Polda Metro Jaya. Dugaan yang disematkan berat, yaitu penistaan agama dan penghasutan. Pada 6 Februari 2026, untuk pertama kalinya, Pandji Pragiwaksono, sutradara, pembawa acara, penulis, dan komika kenamaan duduk di kursi pemeriksaan Mapolda Metro Jaya. Ia hadir bukan sebagai saksi, bukan sebagai publik figur yang diundang memberi motivasi, melainkan sebagai terlapor.

Komedi telah berubah menjadi berkas perkara. Lantas, apa sebenarnya yang salah dari *Mens Rea*?

Siapa pelapornya, dan bagaimana perkembangan kasus ini hingga pertengahan Februari 2026?

Memahami “Mens Rea”: Lebih dari Sekadar Niat Jahat

Sebelum membedah kontroversinya, publik perlu memahami entitas yang dipersoalkan. *Mens Rea* bukan sekadar gelar pertunjukan. Dalam tradisi hukum pidana Anglo-Saxon, *mens rea* berarti “niat bersalah” atau pikiran jahat. Ini adalah elemen fundamental untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, berpasangan dengan *actus reus* (perbuatan pidana).

Namun, Pandji memaknai frasa itu secara lebih puitis. Di atas panggung, ia mendefinisikan ulang *Mens Rea* sebagai “hati yang berpikir” sebuah ajakan untuk menggunakan akal sehat, nalar kritis, dan nurani sebelum menilai atau memilih.

Ironisnya, kini istilah hukum yang ia pinjam untuk seni itu berbalik menghantuinya sendiri. Penyidik tengah mengonstruksi apakah dalam pertunjukannya terdapat *mens rea* (niat jahat) yang memenuhi unsur pidana sebagaimana dituduhkan.

Secara teknis, *Mens Rea* adalah puncak dari tur keliling Pandji Pragiwaksono di beberapa kota sebelum akhirnya dipentaskan secara megah di Indonesia Arena. Durasi

tayang mencapai 2,5 jam di Netflix. Materinya padat: kritik terhadap birokrasi, praktik korupsi yang membudaya, relasi kuasa dan agama, serta refleksi atas kontestasi politik 2024—termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, bukan kritik kepada kepala negara yang paling menyulut api. Justru dua organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang menjadi episentrum laporan.

Suara yang Mengatasnamakan dan Klarifikasi

Pada Rabu malam, 7 Januari 2026, sekelompok individu yang mengatasnamakan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Laporan resmi teregister dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Rizki Abdul Rahman Wahid, yang menyebut dirinya Presidium Angkatan Muda NU, menjadi corong utama pelaporan. Ia didampingi oleh perwakilan dari Aliansi Muda Muhammadiyah.

“Angkatan Muda NU melaporkan bahwa ada kasus yang menurut kami beliau (Pandji) merendahkan,



memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media serta memecah belah bangsa,” tegas Rizki di Polda Metro Jaya, Kamis dini hari.

Materi yang dipersoalkan secara spesifik mencakup tiga narasi utama:

Pertama, tuduhan bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik balas budi untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Dalam potongan video yang diserahkan sebagai barang bukti, Pandji menyindir pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan sebagai imbalan politik. Pelapor menilai pernyataan ini tidak berdasar fakta dan mencederai reputasi kedua organisasi.

Kedua, pernyataan yang merendahkan nilai ibadah. Pelapor keberatan dengan narasi yang menyiratkan bahwa “seseorang yang salatunya tidak pernah bolong pun belum tentu orang baik”. Menurut perspektif pelapor, pernyataan tersebut menistakan simbol sakralitas agama Islam.

Ketiga, pelapor juga memasukkan materi terkait stereotip etnis Sunda yang dinilai berpotensi diskriminatif. Atas dasar itu, Pandji dijerat dengan Pasal 300 dan Pasal 301 KUHP baru tentang penghasutan dan penistaan agama, dengan ancaman pidana maksimal 3 hingga 4 tahun penjara.

Namun, keesokan harinya, fakta mengejutkan muncul. Baik Pengurus

Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) maupun Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tegas membantah keterkaitan mereka dengan laporan tersebut.

Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla, bereaksi cepat. Jumat (9/1/2026), ia memberi pernyataan singkat namun tajam: “Bukan organ NU itu.”

Hal senada disampaikan Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto. Ia menegaskan bahwa pelaporan tersebut sama sekali bukan sikap resmi persyarikatan. “Aliansi Muda Muhammadiyah juga bukan organisasi resmi di Muhammadiyah. Mereka hanya individu yang mengatasnamakan Muhammadiyah,” ujar Edy.



Pemuda NU dan Muhammadiyah Soroti Tayangan Mens Rea Pandji Pragiwaksono.

Fenomena ini menciptakan paradoks hukum: dua laporan masuk dengan mengatasnamakan ormas besar, namun induk organisasi justru melepas diri dan menolak dikaitkan.

Kooperatif dan 63 Pertanyaan

Selama hampir satu bulan, publik hanya mendengar riuh di media sosial. Bela dan kecam berkelindan di linimasa. Baru pada awal Februari 2026, proses hukum memasuki babak baru.

Jumat, 6 Februari 2026. Pukul 10.30 WIB. Pandji Pragiwaksono tiba di Mapolda Metro Jaya. Tidak sendiri,

ia didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar. Dengan setelan gelap dan peci hitam, Pandji melangkah tenang. Tidak ada kata-kata provokatif, hanya senyum tipis dan pernyataan singkat bahwa ia datang sebagai warga negara yang taat hukum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, langsung mengapresiasi langkah tersebut.

"Kami Polda Metro Jaya mengapresiasi bahwa Saudara PP hadir. Ini sebagai wujud kooperatif yang bersangkutan dalam undangan klarifikasi hadir. Ini mencerminkan wujud sebagai warga negara yang patuh hukum," ujar Budi.

Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih tujuh jam. Saat keluar, Pandji tidak diborgol. Ia tidak ditahan, bahkan statusnya belum dinaikkan menjadi tersangka. Namun, ia telah menjawab 63 pertanyaan.

Apa saja yang ditanyakan?

Haris Azhar membuka tabir ruang pemeriksaan. Ia menjelaskan, pertanyaan berkisar dari data pribadi, teknis penyelenggaraan acara, hingga substansi materi komedi yang dipersoalkan.

"Ada 63 pertanyaan, baru selesai. Dimulai kurang lebih jam 10.30 lewat,"

kata Haris.

Lebih menarik, penyidik memutar sejumlah potongan video *Mens Rea* dan meminta Pandji mengkonfirmasi maksud dari tiap pernyataan yang dianggap bermasalah. Soal ibadah salat, soal konsesi tambang untuk ormas, hingga soal kejadian di Jawa Barat, semuanya dialami.

"Tapi kalau balik ke laporan, laporannya hanya soal penistaan agama," Haris mengingatkan.

Menanggapi itu, Pandji tegas. Di hadapan penyidik, ia menyampaikan pembelaan awal yang kelak akan menjadi fondasi hukumnya.

"Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab, dan ya, kita ikuti prosesnya saja," ucap Pandji.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menegaskan bahwa pemeriksaan Pandji adalah bagian dari upaya profesionalitas. Ia berjanji proses penegakan hukum dilakukan

untuk menghadirkan rasa aman, sekaligus memastikan kebebasan berekspresi tetap dalam koridor yang beradab.

Di Balik Meja Penyidik: Perang Ahli dan Konstruksi Batas Satire

Setelah terlapor diperiksa, Polda Metro Jaya tidak berhenti. Senin, 9 Februari 2026, Kombes Budi Hermanto kembali memberi pernyataan. Kali ini, ia mengumumkan fase baru: pemeriksaan para ahli.

"Langkah selanjutnya, penyidik akan melakukan pemeriksaan para ahli," ujar Budi.

Siapa para ahli ini? Budi belum merinci identitas dan jadwal pastinya. Namun, secara substantif, keterangan ahli ini menjadi kunci untuk mengkonstruksi apakah materi *Mens Rea* merupakan kejahatan atau sekadar kritik sosial berbalut lawak.

Kombes Iman Imanuddin secara gamblang menjelaskan dilema yang dihadapi penyidik.

"Bagaimana mengkonstruksikan



Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla

batasan-batasan sejauh mana sebuah kebebasan berekspresi itu, seni itu di ruang publik, dengan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur di dalam setiap sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu terus kami lakukan, sehingga kami bisa menjaga profesionalitas, proporsionalitas, dan keberimbangan," papar Iman.

Keterangan ahli yang dimaksud diperkirakan mencakup ahli pidana, ahli sosiologi, ahli bahasa, dan ahli komunikasi. Merekalah yang akan menjawab pertanyaan mendasar: Apakah sindiran dalam stand-up comedy bisa dikategorikan sebagai *actus reus* (tindak pidana)? Apakah konteks panggung dan tawa penonton dapat menghapus sifat melawan hukum?

Hingga berita ini diturunkan, total 27 orang telah diperiksa, meliputi pelapor, saksi-saksi, dan terlapor. Barang bukti yang diserahkan pelapor—berupa flashdisk berisi video, tangkapan layar, dan dokumen—juga tengah diolah dan dikaji keabsahannya.

"Makanya kami beri ruang kepada penyidik untuk membuktikan bahwa yang diberikan ini masuk dalam khazanah barang bukti yang bisa dipertanggungjawabkan," imbuh Budi



Pandji Pragiwaksono tiba di Mapolda Metro Jaya. Tidak sendiri, ia didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar



Prof. Abdul Ficar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti

Hermanto.

Polisi, menurut Budi, tidak anti kritik. Namun, setiap kritik di ruang publik harus ditelaah: apakah masih dalam koridor candaan atau sudah masuk unsur pelanggaran pidana.

Membela Negara Atau Membungkam Kritik? Respons Publik dan Akademisi

Ketika proses hukum berjalan di ruang penyidikan, opini publik menggeliat di luaran. Kasus ini memantik perdebatan klasik: Sejauh mana seniman boleh mengkritik?

Prof. Abdul Ficar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, menilai laporan terhadap Pandji sebagai tindakan berlebihan. Ia bahkan menyebutnya sebagai pendekatan yang tidak elok di zaman modern.

"Seharusnya (Pandji) diundang saja untuk berdialog, selesaikan secara kekeluargaan. Jika ada ketersinggungan, ya, suruh minta maaf secara terbuka. Tindakan (pelaporan) adalah bentuk pendekatan yang tidak elok di zaman yang kian modern. Sebaiknya digunakan pendekatan dialogis dalam penyelesaian masalah," tegas Abdul Ficar.

Jika kasus ini tetap dilanjutkan,

ia memperingatkan akan terjadi preseden buruk bagi iklim kreatif di Indonesia.

Pengamat sosial Universitas Negeri Jakarta, Rakhmad Hidayat, melihat kasus ini dari perspektif sosiologi komunikasi. Menurutnya, yang dilakukan Pandji adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang.

"Ekspresi seni adalah karya yang perlu dihargai," ucap Rakhmad.

Ia menyoroti bahwa substansi yang disampaikan Pandji—misalnya soal konsesi tambang untuk ormas—bukanlah isu baru. Hal itu sudah lama diberitakan media massa dan dikritik para akademisi. Bedanya, Pandji mengemasnya dalam format komedi satir.

"Dan itulah ciri khas dari Pandji," katanya.

Bahkan, lanjut Rakhmad, banyak seniman lain yang melontarkan kritik lebih pedas. Namun, karena *Mens Rea* tayang di platform global (Netflix) dan nama Pandji sedang melambung, sorotan menjadi lebih tajam. Ironisnya, ia menilai, kemelut ini justru menguntungkan Pandji secara popularitas.

"Pasti akan ada dukungan publik sebagai bentuk solidaritas. Biarkan ekspresi kreativitas ini terus berjalan, karena dari ekspresi ini ada pergerakan ekonomi yang turut dinikmati orang lain," ungkapinya.

Di tengah hiruk-pikuk laporan, terdapat satu narasi yang kerap luput dari sorotan. Bahwa *Mens Rea* tidak sepenuhnya lahir dari kubu oposisi. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menitipkan pesan di dalam panggung tersebut.

Pada 25 Agustus 2025, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, secara terbuka mengumumkan kolaborasi dengan



Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief

Pandji Pragiwaksono.

"Kami menitipkan pesan saat show Mens Rea. Kami berharap Pandji memasukkan pesan 'biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa' dalam bit-bit komedinya," ujar Amir di Gedung Merah Putih KPK.

Amir menjelaskan, KPK dan Pandji memiliki frekuensi dan semangat yang sama. Pandji, menurutnya, selalu menunjukkan keresahan sosial, refleksi sosial, dan kritik melalui pesan-pesan pendidikan hukum.

Pandji sendiri menyambut baik kolaborasi ini.

"Ini adalah sebuah kerja sama yang sudah jalan berkali-kali, berulang-ulang, bertahun-tahun bahkan, dan sangat senang di konser tunggal standup comedy saya yang terbesar ini juga bisa berkolaborasi dengan KPK," ucap Pandji.

Ironi ini menjadi gambaran nyata betapa cairnya batas antara "pemberantasan korupsi" dan "penistaan agama" dalam ruang seni. Di satu sisi, lembaga antirasuah mendukung penuh kritik sosial Pandji. Di sisi lain, aparat penegak hukum tengah menyelidiki apakah kritik yang sama telah melampaui batas pidana.

Timeline Dan Nasib Kasus: Gelar Perkara di Ujung Jalan

Hingga 12 Februari 2026, belum ada putusan hukum final. Polisi masih bekerja di tahap penyelidikan, bukan penyidikan. Perbedaan ini fundamental. Penyelidikan adalah proses untuk mencari ada tidaknya peristiwa pidana. Jika ditemukan bukti cukup, barulah naik ke penyidikan yang berpotensi menetapkan tersangka.

Berikut rekap perkembangan kasus berdasarkan fakta pemberitaan:

Tanggal	Peristiwa
30 Agustus 2025	Pementasan <i>Mens Rea</i> secara langsung di Indonesia Arena, disaksikan 10.000 penonton.
25 Agustus 2025	KPK mengumumkan kolaborasi dengan Pandji untuk menitipkan pesan antikorupsi di acara <i>Mens Rea</i> .
27 Desember 2025	<i>Mens Rea</i> tayang secara global di Netflix.
7-8 Januari 2026	Pelaporan resmi oleh Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya.
9 Januari 2026	PBNU dan PP Muhammadiyah menyatakan kelompok pelapor bukan bagian dari struktur resmi organisasi.
12 Januari 2026	Polda Metro Jaya mengumumkan akan memeriksa para ahli untuk mengkonstruksi batasan pidana dan kebebasan berekspresi.
6 Februari 2026	Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan selama 7 jam, menjawab 63 pertanyaan. Status masih sebagai terlapor.
9 Februari 2026	Polda Metro Jaya konfirmasi 27 orang telah diperiksa dan akan segera periksa ahli serta lakukan gelar perkara.

Menurut Kombes Budi Hermanto, setelah seluruh rangkaian pengumpulan fakta dan keterangan ahli dinilai cukup, penyidik akan menggelar perkara.

“Untuk menilai apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur pidana dan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak,” jelas Budi.



Panggung dan Meja Hijau

Mens Rea adalah dokumentasi kegelisahan. Di atas panggung, Pandji Pragiwaksono berdiri sebagai komika yang mengamini fungsi klasik seni, yaitu “menertawakan yang kaku, meragukan yang mapan”.

Namun, ketika tawa meredam dan lampu panggung padam, petasan tak langsung meledak di meja hijau. Lima laporan, 27 saksi, 63 pertanyaan, dan sederet pasal pidana kini menggantung di atas kepala seniman.

Hingga hari ini, Pandji belum ditetapkan sebagai tersangka. Proses masih berputar di tahap pengumpulan pendapat ahli. Tapi preseden buruk seperti dikhawatirkan akademisi, telah terjadi: seorang komikus harus menjelaskan panjang lebar di kantor polisi mengapa ia melucu tentang salat dan tambang.

Pihak kepolisian, setidaknya dalam pernyataan publik, mencoba bersikap imparial. Mereka menegaskan tidak anti kritik, dan kebebasan berekspresi harus tetap dijaga. Tapi di sisi lain, pasal penistaan agama tetap terbentang sebagai payung yang bisa ditarik siapa saja.

Pertanyaan yang tersisa bukan hanya soal apakah Pandji bersalah. Pertanyaan yang lebih besar adalah: Di ruang publik yang kian sensitif, siapa yang masih berani berdiri sendiri di atas panggung, tanpa takut ucapannya kelak dibaca sebagai berkas perkara?

Komedi adalah ruang di mana kebenaran diucapkan sambil tertawa. Tapi jika tawa itu harus dibayar dengan penjelasan di hadapan penyidik, maka bukan hanya seorang komika yang diadili. Iklim kebebasan berkespresilah yang tengah diuji.

MENGUJI KESAKTIAN JOKOWI

Jokowi siap mati-matian berjuang untuk kemenangan PSI di Pemilu 2029. Ambisi berkuasa untuk membangun dinasti politiknya tak terbendung. Pemilu 2029 sebagai pembuktian, apakah Jokowi masih memiliki pengaruh besar di politik nasional?

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan partai politik baru di republik ini. Partai yang didirikan pada tanggal 16 November 2014 ini telah mengikuti sebanyak dua kali pemilihan umum (Pemilu) yakni Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Partai yang didirikan oleh Grace Natalie ini pada awalnya memberikan warna baru untuk perpolitik nasional. Sebab partai ini memberikan tempat khusus bagi anak muda yang ingin terjun dalam politik praktis. Sehingga partai ini diharapkan menjadi wadah perjuangan bagi anak-anak muda yang ingin memperbaiki kondisi bangsa. Sehingga partai ini memiliki tekad untuk menghadirkan praktik-praktik politik yang bersih, yang lebih mengedepankan kepentingan politik.

Selain itu, PSI juga secara khusus ingin memperjuangkan pluralisme dan hak perempuan di Indonesia.

Meskipun kehadirannya



memberikan warna baru dengan mengambil segmen anak muda, tapi partai ini tidak memberikan perlawanan yang kuat bagi partai-partai lama. Sehingga sudah dua kali mengikuti Pemilu PSI tidak mampu menghadirkan kader-kader terbaiknya duduk di Gedung Parlemen di Senayan sebagai anggota DPR RI, karena perolehan suaranya belum memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4%.

Pada Pemilu 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperoleh 2.650.361

suara atau sekitar 1,85% - 1,89% dari total suara sah nasional. Sedangkan pada Pemilu 2024 PSI cukup puas dengan memperoleh 4.260.169 suara atau setara dengan 2,806%.

Partai Pembela Jokowi

Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 mengubah peta politik nasional. Sebelumnya, tokoh yang digadang-gadang sebagai calon presiden 2014 berasal dari tokoh elit partai seperti ketua umum berubah. Jokowi

mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia dengan gaya kepemimpinan yang sederhana dan merakyat.

Kehadiran Jokowi di panggung politik nasional saat menjabat Gubernur DKI Jakarta mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari masyarakat Indonesia. Meski sangat singkat menjabat sebagai gubernur kerja-kerja Jokowi dalam upaya membenahi Jakarta mendapat respon positif dari masyarakat.

Atas dasar inilah, PDI Perjuangan memutuskan untuk memberikan tiket calon presiden (Capres) kepada Jokowi pada Pemilu 2014. Dan, pada akhirnya dia pun terpilih menjadi Presiden RI ke-7 setelah berhasil mengalahkan rivalnya, Prabowo Subianto. Dan pada pemilu 2019 dia pun kembali terpilih setelah mengalahkan rival yang sama.

Selama Jokowi menjabat dua periode sebagai presiden RI, PSI adalah salah satu partai yang mati-matian membela Jokowi. Bahkan, jika ada kekuatan yang dianggap akan menjadi rival Jokowi, PSI akan berdiri melawan melawan melalui narasi-narasi yang keras dan menjatuhkan.

Misalnya, sejumlah kader PSI pernah menghina Prabowo Subianto dengan menuduhnya sebagai sosok

yang suka menyebar berita bohong.

Beberapa tahun yang lalu, para kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikenal sebagai pengkritik paling vokal terhadap sosok Prabowo Subianto. Tidak sedikit di antara mereka yang melontarkan pernyataan bernada sinis, provokatif, bahkan ofensif terhadap Prabowo, baik dalam forum resmi maupun media sosial.

Sebutnya saja, Raja Juli Antoni pernah menyebut Prabowo sebagai sosok “emosional” dan menyindir pidatonya sebagai tidak berdampak, keras atau lembut sama saja. Grace Natalie bahkan dengan lantang menyebut pidato Prabowo sebagai “The Prabowo Show”, menuduhnya menyebarkan angka palsu terkait kemiskinan, dan secara terbuka mempertanyakan kapasitasnya sebagai calon pemimpin bangsa.

Belum lagi insiden “Kebohongan Award” yang ditujukan kepada Prabowo oleh empat tokoh PSI: Grace Natalie, Raja Juli, Tsamara Amany, dan Dara Nasution yang berujung pada pelaporan mereka ke Bareskrim oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Tidak hanya Prabowo, Anies Baswedan yang dianggap menjadi rival Jokowi pun tidak luput dari serangan PSI. Secara keras dan konsisten PSI mengkritik habis-habisan terhadap Anies. Menurutnya Anies telah gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta sehingga tak pantas untuk menjadi Presiden RI.

Sikap keras PSI terhadap Anies Baswedan misalnya dengan melabeli Anies sebagai “pembongong” dan sosok intoleran. PSI juga mengkritik keras penyelenggaraan Formula E. Seperti disampaikan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany bahwa kebijakan menggelar Formula E di tengah pandemi hanya



Kaesang Pangarep

akan memberatkan anggaran dari Pemprov DKI.

Tsamara menilai langkah tersebut tidak bijak jika diselenggarakan saat ini, mengingat banyak masyarakat yang sedang kesulitan.

Tsamara melontarkan kritikan tersebut melalui akun media sosial Instagramnya.

“Pemprov DKI mau buat balapan mobil ketika pandemi, padahal banyak warga Jakarta susah. Biayanya besar dan membebani anggaran Jakarta,” ucap Tsamara.

Selain itu PSI habis-habisan mengkritik kegagalan Anies dalam mengatasi banjir di Jakarta, serta menolak mendukung Anies di Pilpres 2024 karena sebagai pemimpin bermasalah dan tidak sejalan dengan visi-misi Presiden Jokowi.

Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bahwa Anies tidak sesuai dengan arah mata angin atau kompas yang dimiliki PSI.

“(Anies) tidak sesuai dengan kompas kita. Jadi, kompas kita nyari arahnya nih mana yang kalau dia tidak sesuai dengan arah kompas kita, ya berarti enggak satu jalan, enggak satu tujuan,” kata Grace ditemui di Kantor DPP Pro



Raja Juli Antoni

Jokowi (Projo), Kamis (10/8/2023) malam.

Bahkan, menurutnya, Anies Baswedan merupakan figure yang tidak sejalan dengan program-program Jokowi. Sedangkan PSI berjuang untuk melanjutkan program-program Presiden Jokowi.

“Pak Anies tidak pernah bicara apa pun terkait program Pak Jokowi, malah cenderung menghindari. Jadi, di situ kita melihat kayaknya beliau tidak punya atau tidak berani berkomitmen ke situ,” katanya.

Berbanda dengan Pilpres sebelumnya, PSI pada Pilpres 2024 memilih satu gerbong untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Dukungan tersebut juga dilandasi atas kepentingan Jokowi, meski dengan bahasa politis melanjutkan program-program pemerintahan Jokowi yang belum tuntas, seperti pembangunan IKN.

Seperti disampaikan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, bahwa pasangan Prabowo-Gibran dinilai mampu melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan pemimpin sebelumnya. Dia pun yakin bahwa Prabowo-Gibran bisa mencapai target masa depan bangsa.

“Jadi kami Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Kami yakin beliau-beliau ini dapat melanjutkan pembangunan dan program yang sesuai dengan arah generasi penerus bangsa. Kita ingin kemajuan yang kita miliki saat ini terus diperluas,” ujar Kaesang Pangarep dalam sambutan deklarasi capres-cawapres di kanal Youtube PSI, Selasa (24/10/2023).

Sikap yang sama juga ditunjukkan

pada Pilkada DKI Jakarta 2024, sejalan dengan arahan Jokowi PSI mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Bagi PSI, Jokowi dianggap sebagai mentor politik dan inspirator, bahkan menyebutnya sebagai “bapak ideologis” partai.

Dukungan Jokowi kepada pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam Pilkada Jakarta 2024, didasarkan pada rekam jejak Ridwan Kamil sebagai pemimpin.

Seperti disampaikan Jokowi dalam acara bersama RK dan para relawan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Putih, Senin (18/11/2024). Jokowi menilai rekam jejak sangat penting bagi calon pemimpin.

“Kalau bapak ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya ulang kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan RK memiliki pengalaman sebagai Walikota Bandung. Menurutnya, tidak mudah mengelola sebuah kota. Selanjutnya RK juga pernah menjadi Gubernur Jawa Barat. Sehingga dia memiliki ilmu yang mumpuni untuk memimpin Jakarta.

“Artinya secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi? Iya ndak?” ujar Jokowi.

Ambisi Tiga Periode Gagal

Wacana tiga periode masa jabatan presiden pernah disuarakan menjelang Pilpres 2024. Seperti gayung bersambut sejumlah partai politik pendukung Presiden Jokowi sepakat dengan wacana tersebut. Namun, PDI Perjuangan memiliki sikap yang berbeda dengan tegas menolak karena mengkhianati amanat reformasi yang membatasi masa Presiden hanya dua

periode.

Sejumlah kalangan menilai lahirnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres hanya untuk memuluskan langkah Gibran agar bisa dicalonkan sebagai Capres/Cawapres pada Pemilu 2024.

Meskipun sah, putusan ini memicu kontroversi karena dinilai cacat etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang berujung pada pelanggaran etik berat oleh Anwar Usman.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 pun kerap dianalisis oleh berbagai pihak, pengamat politik, dan media sebagai bentuk keberlanjutan pengaruh atau “perpanjangan tangan” dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti disampaikan oleh Budayawan Goenawan Mohamad bahwa pencalonan Gibran merupakan cara Jokowi untuk memperpanjang kekuasaannya. Gibran yang semula tidak memenuhi syarat sebagai capres atau pun cawapres karena usianya yang masih 36 tahun itu, bisa melenggang maju usai Mahkamah Konstitusi yang diketuai ipar Jokowi mengubah persyaratan.

“Ternyata Pak Jokowi menghendaki itu (memperpanjang kekuasaan). Yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke cawapres adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasaannya,” ujar pendiri Majalah Tempo dalam acara Rosi yang bertajuk “Rakyat Percaya Siapa: Jokowi, Ketua MK atau Gibran” sebagaimana dilansir YouTube Kompas TV, Jumat (3/11/2023).

Keputusan Jokowi mendukung Prabowo-Gibran tidak sejalan dengan PDI Perjuangan yang mengusung

Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024. Hal ini, secara tidak langsung Jokowi ingin meninggalkan partai yang telah membesarkannya dan telah menghantarkannya menjadi orang nomor satu di republik ini selama dua periode.

Meski tidak secara langsung Jokowi menyatakan keluar dari PDI Perjuangan, namun keputusan Kaesang Pangarep memilih bergabung dan menjadi Ketua Umum DPP PSI pada akhir 2023 lalu menjadi sinyal kuat Jokowi sudah mempersiapkan perahu baru dalam memenuhi ambisinya dalam membangun dinasti politik.

Hal itu juga terbaca dari strategi yang dilancarkan oleh PSI dalam pemilu 2024 lalu dengan menyatakan bahwa Jokowi adalah bagian PSI. Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni pada saat itu menyinggung bahwa Jokowi bukanlah bagian dari partai merah lain.

Raja mengungkapkan hal tersebut saat memberikan sambutan di acara Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) PSI Sulsel di Hotel Grand Claro, Jalan A P Pettarani, Kota Makassar, Sulsel, Selasa (12/12/2023) malam.

Raja pun menjelaskan di depan ratusan kader PSI bahwa Ketua Umum (Ketum) PSI kini dijabat oleh Kaesang Pangarep yang merupakan putra Jokowi.

“Sosialisasikan bahwa Mas Kaesang adalah Ketua Umum PSI dan putra Jokowi, dan sekarang Pak Jokowi partainya merah yang ini (PSI) bukan yang itu,” ungkapnya disambut riuh para kader.

Raja menyebut, Kaesang Pangarep harus terus disosialisasikan sebagai putra terbaik dari Jokowi. Bahkan, Raja meminta baliho Kaesang harus secara masif diedarkan.



Jaket untuk Jokowi.

“Publik harus tahu bahwa anak kesayangan Jokowi jadi Ketum PSI. Orang yang puas kinerja Pak Jokowi, maka mereka harus memilih PSI. Ini harus disosialisasikan baik berupa baliho maupun *door to door*. Ketuk pintu hati masyarakat untuk membuka hati memilih PSI di Pemilu 2024 nanti,” kata Raja.

Apa yang disampaikan oleh Raja pun dijalankan. Operasi baliho secara masif dengan menampilkan foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) di berbagai daerah di Indonesia dijalankan, terutama menjelang dan selama masa kampanye Pemilu 2024. Pesan dalam baliho-baliho tersebut umumnya membawa narasi yang mengaitkan PSI dengan Jokowi. Beberapa slogan yang umum ditemukan adalah “Ikut Jokowi, Pilih PSI”, “PSI Partai Jokowi”, dan kampanye terdahulu “Ojo Kesusu”.

Wajah Kaesang dan Jokowi di baliho membanjiri terpasang secara masif di ibu kota dan berbagai daerah menampilkan wajah Kaesang bersandingan dengan ayahnya, Presiden Jokowi. Strategi ini dinilai

sebagai upaya PSI untuk meraup suara dari pendukung setia Jokowi (*Jokowi effect*) pada Pemilu 2024. Sehingga bisa meningkatkan elektabilitas partai tersebut.

Namun, strategi PSI yang memposisikan Jokowi sebagai bagian dari PSI, dan mengangkat anak Jokowi, Kaesang Pangarep sebagai Ketum PSI terbukti tidak berjalan efektif. Terbukti, pada perolehan hasil pemilu 2024 PSI hanya puas meraup suara sebanyak 4.260.169 atau setara dengan 2,806%. Dari hasil ini, PSI tidak berhasil membawa kader-kader terbaiknya duduk di Gedung Parlemen di Senayan sebagai anggota DPR RI. Sebab, perolehan suara PSI tidak mencapai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 4%.

Jokowi All Out untuk PSI

Kegagalan PSI masuk parlemen pada Pemilu 2024 tentunya menjadi pukul keras bagi Presiden ke-7 RI, Jokowi. Upayanya menyiapkan perahu barunya setelah dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan tidak

mulus seperti yang diharapkan.

Ambisi Jokowi membangun dinasti politiknya melalui PSI pun tidak surut, yakni kembali menempatkan putranya, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum DPP PSI. Melalui Kongres PSI yang digelar di Solo, putra Jokowi itu kembali terpilih sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2030, berdasarkan hasil pemilihan raya (e-voting) yang diumumkan di Solo pada 19 Juli 2025.

Kaesang menang telak dengan 65,28% suara, mengungguli Ronald A Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang, dengan fokus membesarkan partai untuk Pemilu 2029.

“Menetapkan, memutuskan Ketua Umum DPP PSI periode 2025 – 2030 hasil Pemilihan Raya PSI 2025 menetapkan saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum terpilih Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia periode 2025 – 2030,” kata Ketua SC Kongres PSI, Andy Budiman, membacakan Surat Keputusan SC, di Kongres PSI di Graha Saba Buana, Solo, Sabtu 19 Juli 2025.

Setelah kembali terpilih sebagai nahkoda PSI, Kaesang langsung memasang target ambisius tidak hanya masuk parlemen, namun PSI harus menjadi partai besar. Bahkan dengan nada tinggi Kaesang menargetkan Jawa Tengah sebagai kandang Gajah. Tidak hanya di Jawa Tengah, dia pun menegaskan komitmen totalitas dengan menyatakan siap “memeras semua darah” untuk memenangkan PSI pada Pemilu 2029.

Pernyataan emosional ini disampaikan saat penutupan Rakernas PSI di Makassar, Sabtu (31/1/2026), di mana ia juga sempat menangis. Kaesang bertekad menjadikan PSI partai besar dan meminta doa untuk kesehatannya.

Kaesang pun meminta kepada

seluruh struktur partai bisa gotong royong bekerja memenangkan Pemilu 2029.

“Cuma satu hal yang akan saya janjikan kepada teman-teman semuanya. Bahwa PSI akan menjadi partai yang sangat besar kemudian hari,” ujarnya dalam orasi politiknya.

Kaesang pun menyinggung orasi politik mantan Presiden Joko Widodo yang siap dan kerja keras mengkampanyekan PSI hingga pelosok negeri. Tak ingin kalah dengan semangat ayahandanya, Kaesang pun menegaskan siap memeras darahnya untuk memenangkan PSI.

“Saya minta didoakan supaya saya sehat selalu, karena tadi saya melihat sebelum pidato saya, yang tadi sebelumnya (orasi politik Jokowi). Ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua, saya akan peras darah saya untuk menangkan PSI,” ucapnya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama mantan Presiden Jokowi juga menegaskan komitmennya untuk bekerja keras dan mati-matian demi PSI. Jokowi siap mendukung kemenangan PSI pada Pemilu 2029.

“Kalau diperlukan saya harus datang, saya masih sanggup. Saya masih sanggup datang ke provinsi-provinsi, semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten/kota, kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup,” tegas Jokowi saat memberikan arahan dalam Rakernas PSI, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026).

Jokowi mengatakan PSI memerlukan jajaran pengurus yang militan. Jokowi pun siap bekerja keras dan mati-matian untuk PSI.

“Saudara-saudara bekerja keras untuk PSI, saya pun akan bekerja keras



Andy Budiman

untuk PSI. Saudara-saudara bekerja mati-matian untuk PSI, sayapun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara-saudara bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI,” ucap Jokowi dengan suara lantang.

Pada kesempatan ini dia pun mengajak seluruh kader PSI untuk menunjukkan militansi mereka dalam menyambut Pemilu 2029. Bahkan, Jokowi siap turun langsung hingga kecamatan membantu kemenangan PSI.

“Target PSI ini target besar, targetnya tinggi jadi mesinnya harus mesin besar. Enggak bisa struktur hanya sampai DPD, ndak bisa. Sekali lagi struktur harus sampai RT/RW,” ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan bahwa saat ini Indonesia memiliki 38 Provinsi, 514 kabupaten/kota hingga sekitar 7.000 kecamatan. Menurutnya kekuatan partai politik ada pada struktur yang kuat. Maka itu, PSI memerlukan jajaran pengurus yang militan.

Atas kebutuhan ini Jokowi pun berkomitmen akan mati-matian bekerja keras untuk partai berlambang gajah tersebut. “Kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara-

saudara bekerja keras untuk PSI, saya pun akan bekerja keras untuk PSI,” ujarnya.

Menguji Pengaruh Jokowi

Manuver Jokowi yang berkomitmen akan mati-matian memenangkan PSI pada Pemilu 2029 apakah memberikan efek yang signifikan?. Sedangkan jika berkaca pada Pemilu 2024 lalu meski dalam kampanye menyebut Jokowi bagian dari PSI, terbukti tidak bisa meloloskan partai Gajah ini lolos ke parlemen. Padahal Jokowi saat itu masih memiliki kekuasaan yang besar sebagai orang pertama di republik ini.

Lantas, apakah Jokowi masih memiliki pengaruh yang besar pasca lengser dari kursi presiden? Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno manuver Jokowi hanya sebagai pertarungan terbuka. Bukan hanya bagi PSI, tapi juga bagi reputasi politik Jokowi sendiri.

Jika Jokowi mampu membesarkan partai Gajah ini maka dalam perpolitikan nasional Jokowi masih teruji kesaktiannya. Namun, jika gagal inilah kuburan bagi Jokowi sendiri dalam perpolitikan nasional.

“Ketika Jokowi siap total besarkan PSI itu semacam kesiapan uji kesaktian Jokowi setelah tak lagi presiden dan bukan PDIP. Kalau PSI lolos Jokowi pasti dibilang masih sakti, kalau tak lolos pastinya dikritik habis-habisan,” ujar Adi kepada wartawan, Minggu (1/2/2026).

Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan PSI menembus parlemen tak bisa hanya mengandalkan efek Jokowi. Politik elektoral tetap ditentukan kerja lapangan dan kemampuan menyentuh pemilih kelas bawah.

“PSI punya suntikan semangat

karena Jokowi akan mati-matian menangkan PSI. Tinggal uji materi apakah Jokowi masih sakti atau tidak setelah tak lagi jadi presiden dan pecah kongsi dengan PDIP. Kuncinya kerja lapangan,” jelas Adi.

Menurut Adi, keberpihakan Jokowi memiliki dampak ganda. Di satu sisi memberi energi. Di sisi lain berpotensi memicu resistensi. Tantangan PSI adalah mengelola sentimen itu sambil memaksimalkan citra positif Jokowi.

“Yang jelas, ini pertarungan politik Jokowi. Kalau PSI lolos parlemen, Jokowi bakal disanjung puji dan pasti disebut masih sakti. Sebaliknya, jika PSI tak lolos parlemen, maka Jokowi bakal banyak dikritik karena sudah tak sakti lagi,” pungkasnya.

Hal yang senada juga disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan. Menurutnya komitmen Jokowi untuk berjuang bersama PSI memberikan energi besar, khususnya dalam urusan logistik. Sebab Jokowi masih memiliki sumber daya besar.

Namun, dia menekankan bahwa kemenangan politik tidak ditentukan uang semata.

Iwan juga mencermati korelasi menarik antara pergerakan politik Jokowi dan dinamika di tubuh Polri. Ia menyoroti pembentukan tim reformasi internal Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit, yang muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto membentuk tim percepatan reformasi kepolisian.

“Soal logistik tidak bisa diragukan lagi. Namun politik ini bukan soal logistik semata, banyak faktor lain yang bisa jadi penentu, apakah PSI bisa lolos parlemen dan menjadi partai besar atau tidak,” kata Iwan, Minggu (1/2/2026) seperti dilansir *Inilah.com*.

Sementara itu Direktur Eksekutif



Adi Prayitno

Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan mengatakan kerja keras Jokowi untuk kemenangan PSI hanya ilusi semata. Dia beralasan bahwa PSI telah kehilangan momentum menjadi partai besar.

“PSI dan Jokowi di 2029 ibarat fatamorgana di tengah gurun pasir. Dikarenakan peluang PSI untuk masuk ke dalam parlemen telah kehabisan momentum politiknya,” ujarnya di Jakarta, Rabu malam, 4 Februari 2026.

Dia pun menilai bahwa saat ini energi Jokowi tidak sekuat dulu saat dirinya menjadi presiden. Ditambah kekuatan Jokowi semakin melemah dengan isu negatif.

Jokowi dan keluarga habis-habisan diserang dengan dugaan korupsi dan ijazah palsu. Serangan ini memiliki dampak yang sangat besar dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi dan keluarga. Citra yang negatif ini lah yang meredupkan tingkat elektibilitas PSI dalam pemilu 2029 mendatang.

“Jokowi sudah tidak memiliki power politik lagi dan telah meredupnya popularitasnya di tengah masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya pengamat politik jebolan IISIP Jakarta ini menilai seharusnya Jokowi all out untuk



Iwan Setiawan

membawa PSI lolos parlemen pada Pemilu 2024 lalu. “Kalaupun PSI mampu menjadi partai besar dan partai parlemen, momentumnya yaitu pada pemilu 2024 yang lalu karena power politik dan citra Jokowi masih powerfull di masyarakat,” ungkap Iwan.

“Ya kalau Jokowi memberi sinyal akan membawa PSI menjadi partai Besar di 2029 ibarat fatamorgana di tengah redupnya citra dan hilangnya kekuasaan politik,” pungkasnya.

PSI Optimis

Keraguan publik terhadap pengaruh Jokowi dalam menghantarkan PSI menuju kemenangan pada Pemilu 2029 ini pun langsung dijawab oleh Ketua DPP PSI Bidang Politik, Bestari Barus.

Bestari yakin Jokowi akan memberikan efek electoral yang tinggi sebab *approval rating* atau tingkat kesukaan Presiden ke-7 RI, Jokowi masih terbilang tinggi.

“Ya harapan kita seperti itu, dan itu bukan sekedar harapan, tapi begini, bahwa banyak yang mengatakan PSI ini pada waktu Pak Jokowi masih jadi presiden saja tidak lolos threshold, gitu ya,” kata dia dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Minggu

(1/2/2026).

Menurutnya kegagalan PSI pada Pemilu 2024 meski membawa nama Jokowi terjadi karena pada saat itu Jokowi masih dianggap bagian dari PDI Perjuangan. Dan Jokowi juga tidak pernah secara langsung mengajak masyarakat untuk memilih PSI.

“Namun mereka tidak melihat sebetulnya, pada waktu itu Pak Jokowi sama sekali tidak pernah mengendorse PSI. Maka khalayak itu melihat dan meyakini bahwa Pak Jokowi masih di partai yang lama, kan begitu,” tuturnya.

Tapi, kata Bestari, hingga saat ini Jokowi sudah dua kali mengatakan hal yang hampir sama, yakni akan bekerja keras untuk PSI.

“Ini sudah kedua kali Pak Jokowi mengatakan hal yang hampir sama gitu ya, akan bekerja keras, mati-matian begitu ya itu untuk PSI. Itu sudah dua kali diucapkan,” tuturnya.

Yang pertama, kata Bestari, Jokowi menyampaikan itu di Kongres PSI, dan yang kedua di Rakernas I di Makassar.

“Nah ini mengkonfirmasi, gitu loh, Pak Jokowi betul-betul serius dan ini juga menjadi satu masukan ya bagi masyarakat-masyarakat pendukung Pak Jokowi dulu yang masih berpikir bahwa Pak Jokowi itu masih ada di partai yang lama,” bebernya.

Ia kemudian menyebut, *approval rating* Jokowi masih sangat tinggi. Oleh sebab itu, ia mengajak untuk melihat efek pernyataan Jokowi dalam kegiatan PSI tersebut pada 2029 mendatang.

“Nanti kita lihat di 2029 efeknya, *approval rating*nya masih sangat tinggi Pak Jokowi. Dan pernyataan yang disampaikan Pak Jokowi berulang, sudah dua kali ini, ini pasti menjadi masukan yang sangat-sangat mencerahkan bagi seluruh pendukung Pak Jokowi kalau beliau menjadi presiden, begitu,” tuturnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam penutupan Rakernas PSI 2026 menjadi momentum penting bagi penguatan semangat dan konsolidasi kader partainya. Jokowi dinilai membawa energi baru bagi perjuangan PSI menuju Pemilu 2029.

“Bapak Joko Widodo menjadi energi baru dan pemompa semangat seluruh kader PSI di seluruh Indonesia. Ini juga menebalkan keyakinan kami bahwa PSI bisa meraih kursi yang sangat signifikan di DPR pada 2029,” ujar Raja Juli Antoni se usai Rakernas PSI di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026) dilansir *Beritasatu.com*.

Raja mengungkapkan pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI. Dia menilai pesan yang disampaikan Jokowi menjadi ajakan terbuka kepada para pendukung dan relawannya.

“Pernyataan Pak Jokowi tadi, meskipun secara formal beliau belum berada di PSI, bagi saya itu cukup eksplisit mengundang para relawan Pak Jokowi di seluruh Indonesia, para Jokower atau Jokowi Lover, para pemilih Pak Jokowi, untuk berbondong-bondong masuk ke PSI, mendaftar secara *online*, menjadi pengurus, relawan, hingga relawan di TPS,” imbuh dia.

“Sekali lagi, meskipun secara legal formal beliau belum ada di PSI, pernyataan beliau sudah mengimbau seluruh pendukung Pak Jokowi dan masyarakat yang menilai kepemimpinan beliau selama 10 tahun berhasil, untuk segera bergabung dengan PSI,” kata Antoni.



JOKOWI PANIK NASIB GIBRAN TAK AMAN DI PILPRES 2029

Pilpres 2029 menjadi penentuan keberlanjutan dinasti Jokowi. Perjuangan memenangkan PSI dan memastikan Gibran mendapatkan tiket sebagai Cawapres dari Prabowo gencar dilakukan.

Di tengah kondisi masyarakat yang tidak penuh kepastian dari ekonomi tak kunjung stabil, tingkat pengangguran yang masih tinggi, dan upaya penegakan hukum yang belum berjalan optimal para elit politik di republik ini sudah sibuk berbicara berburu kekuasaan dan mempertahankan kekuasaannya.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) salah satu partai politik yang tidak surut-surutnya membicarakan bagaimana mendulang kemenangan

pada Pemilu 2029. Hal itu secara terbuka disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang digelar di Makassar, pada 29 s/d 31 Januari 2026.

Ambisi berkuasa yang sangat besar sehingga publik memandang bahwa PSI merupakan partai politik yang *nir* empati terhadap kondisi rakyat saat ini yang masih berjuang di tengah kesulitan ekonomi. Ditambah kondisi masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesusahan karena dilanda



bencana alam di sejumlah daerah.

Dalam Rekernas tersebut lebih dominan membahas politik kekuasaan, yaitu bagaimana partai berlogo Gajah ini menjadi partai besar yang tidak hanya sekadar masuk parlemen, namun bisa memastikan Gibran Rakabuming Raka menjadi Capres/Cawapres pada Pilpres 2029 mendatang.

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali bahwa partainya sudah solid akan menjadikan Gibran sebagai Capres atau menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya Gibran sosok yang sangat layak kembali dipasangkan dengan Prabowo Subianto kembali memimpin Indonesia.

Ali mengatakan bahwa Gibran adalah sosok muda yang berprestasi dan cerdas, sehingga pantas untuk dijadikan pemimpin masa depan Indonesia. “Sudah pasti PSI akan mengusung Gibran di Pemilu 2029. Pasti mencalon Gibran, minimal sebagai Wapres,” tegas Ahmad Ali.

Menurutnya keberlanjutan adalah

roh dari perjuangan PSI. Maka itu, dia menekankan kepemimpinan kedepan harus melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Dia mengatakan bahwa pembangunan yang dimulai Presiden Jokowi harus diteruskan Presiden Prabowo Subianto, lalu dilanjutkan Gibran agar tuntas.

“Ini pembangunan yang dirancang Pak Jokowi berkesinambungan oleh Pak Prabowo, dan akan berkesinambungan oleh Pak Gibran supaya pembangunan itu bisa tuntas,” tegasnya.

Ali turut menanggapi kritik sebagian masyarakat yang menilai berbagai proyek belum selesai. Menurutnya, banyak yang tidak memahami konteks pembangunan jangka panjang.

“Supaya orang tidak berkoar-koar menuduh Pak Jokowi macam-macam. Oh bendungan tidak selesai, ya memang belum selesai. IKN belum selesai, ya memang belum selesai. Karena pembangunannya

berkelanjutan,” jelasnya.

Ali menegaskan PSI kini tengah mendorong para kader untuk mendukung penuh program pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kata Pak Prabowo, kita kerja dulu. Jadi PSI sekarang mengimbuai seluruh kader di daerah untuk mendukung program Pak Prabowo dan Gibran,” pungkasnya.

Proyeksi PSI mengusung kembali Gibran sebagai Cawapres dari Prabowo sebelumnya juga pernah dilontarkan oleh Jokowi sendiri yakni pada September 2025 lalu, ayah dari Gibran ini mengaku memberikan perintah kepada relawannya, Bara JP, untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dua periode.

“Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo-Gibran dua periode),” kata Jokowi merespons pertanyaan wartawan, Solo, Jumat (19/9).

Pernyataan yang sama kembali ditegaskan oleh Jokowi saat menanggapi pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali, bahwa Gibran akan menjadi kompetitor kuat dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2029. Jokowi secara tegas mengatakan bahwa keinginannya agar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dapat menjabat kembali selama dua periode.

“Kan sudah saya sampaikan Prabowo-Gibran dua periode. Sudah itu saja,” kata Jokowi kepada wartawan di kediamannya Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jumat, 30 Januari 2026.

Sulit Jika Gibran Capres

Keinginan Jokowi agar Prabowo-Gibran merupakan perhitungan yang sangat realistis. Jokowi sangat paham jika anaknya terlalu percaya diri diusung sebagai Capres pada Pemilu



2029 resikonya sangat besar. Salah langkah, Gibran akan tersingkir.

Maka itu, langkah Jokowi dan PSI sejak dini sudah mengusung pasangan Prabowo-Gibran dua periode merupakan strategi yang harus ditempuh. Jika menghitung kekuatan baik secara politik atau figure Gibran sendiri sangat berat untuk melawan Prabowo di Pilpres 2029.

Tidak ada pilihan lain selain terus memastikan Prabowo agar mau kembali bersanding dengan Gibran pada Pilpres 2029. Sehingga tanpa kerja keras, atau bahkan mati-matian tidak perlu Jokowi lakukan untuk menghantarkan anaknya, Gibran ke kursi kekuasaan orang nomor dua di republik ini. Sehingga Jokowi bersama

keluarga akan tetap terjaga lingkaran kekuasaan nasional.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Hendri Satrio bahwa kebulatan langkah Jokowi mendukung Prabowo-Gibran dua periode memiliki tiga tujuan. Pertama, menurut Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina ini, pernyataan Jokowi yang kembali mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2029 adalah untuk mengklarifikasi ucapan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Ahmad Ali. Sebab, Ahmad Ali menyatakan bahwa Gibran berpotensi menjadi lawan terkuat Prabowo di pemilihan presiden 2029.

Pernyataan Ahmad Ali justru akan merugikan PSI dan Gibran. Maka

itu, Jokowi ingin memastikan bahwa dirinya tidak ingin bersebrangan dengan Prabowo pada Pilpres 2029.

Tujuan kedua, menurutnya Jokowi tidak percaya diri untuk memaksakan Gibran bertarung pada Pilpres 2029 sebagai Capres. Sehingga dia harus memastikan Gibran kembali mendapatkan kesempatan kedua berpasangan dengan Prabowo.

“Yang kedua, Jokowi memahami bahwa Gibran belum siap di 2029 sehingga dia harus memastikan anaknya ini selamat dulu sebagai wakil presiden Pak Prabowo,” kata Hensa dilansir *Tempo*, Senin, 2 Februari 2026.

Selanjutnya dia menilai bahwa Jokowi akan melihat terlebih dulu apakah anaknya siap untuk dimajukan

pada Pilpres 2034. Selain itu, Hensa mengatakan Jokowi ingin memberi pesan agar publik tidak berasumsi Prabowo dan Gibran bakal berpisah di Pilpres 2029.

“Karena itu akan repot. Apalagi Prabowo punya banyak pilihan (calon wakil presiden),” katanya.

Selanjutnya Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini mengatakan bahwa kondisi Pilpres 2029 berbeda dengan Pilpres 2024, pada saat itu Prabowo lah yang membutuhkan Jokowi sehingga dengan “terpaksa” memininang Gibran sebagai cawapresnya. Hal ini dilakukan bagian dari strategi untuk menang.

Namun, sekarang berbeda, justru Prabowo menjadi inkumben pada Pilpres 2029. “Kemungkinan dia tidak butuh Jokowi lagi untuk menang,” kata Hensa.

Apabila Prabowo kembali mengajak Gibran dalam kontestasi 2029, Hensa menilai langkah itu akan membesarkan partai politik yang dekat dengan Gibran yakni PSI.

“Kalau Prabowo bersama Gibran lagi di 2029, itu kan artinya Prabowo membesarkan Gibran tuh. Memang mempersiapkan Gibran sebagai capres,” kata dia.

Namun, dia memiliki keyakinan



Hendri Satrio

Prabowo akan mengikuti jejak presiden sebelumnya, yakni memilih cawapres yang tidak akan mengganggu dia dan elektabilitas Partai Gerindra. “Dia akan memilih cawapres yang tidak lagi punya ambisi untuk maju sebagai presiden. Kalau masih berambisi ya sulit. Maka Prabowo mungkin akan memilih cawapresnya dari Gerindra atau yang umum,” ujarnya.

Sementara itu Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan pada Pilpres 2029, Prabowo sangat power full sebagai incumbent. Sehingga Prabowo sangat sulit ditebak akan berpasangan dengan siapa.

“Manuver Prabowo itu paling sulit diprediksi publik, suka tak terduga,” kata Adi di Jakarta, Senin, 2 Februari 2026.

Partai koalisi pendukung Presiden Prabowo paling hanya bisa menawarkan kader-kader terbaiknya untuk diusung sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2029 mendatang.

“Partai koalisi akan tegak lurus dengan Prabowo soal calon wakil presidennya di 2029,” ujarnya.

Sehingga menurutnya peluang Gibran sangat tipis untuk kembali bersanding dengan Prabowo. Sebab, Gibran akan bersaing dengan partai-partai lainnya yang kemungkinan besar akan mengusung ketua umumnya atau kader terbaiknya menjadi calon wakil presiden.

Selanjutnya Adi mengomentari soal keberlanjutan kepemimpinan. Narasi ini dimainkan oleh PSI sebagai penguat alasan Prabowo-Gibran dua periode.

Menurutnya narasi ini merupakan agenda politik jangka panjang. Menurut dorongan tersebut tidak



Adi Prayitno

bisa dilepaskan dari kepentingan Jokowi dalam mengamankan masa depan politik putranya, Gibran Rakabuming Raka, menuju 2029.

“Ini bukan sekadar soal keberlanjutan program, tetapi juga soal keberlanjutan aktor. Jokowi sedang memastikan bahwa Gibran tetap berada di orbit kekuasaan nasional setelah dirinya lengser,” ujar Adi Prayitno.

Menurut Adi, dukungan terbuka sejumlah elite terhadap dua periode Prabowo-Gibran bukanlah ekspresi spontan, melainkan bagian dari desain politik jangka panjang. Gibran diposisikan sebagai figur muda strategis yang disiapkan untuk menjadi penerus relevan dalam lanskap politik nasional pasca-Jokowi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Menurut narasi tersebut sengaja dimainkan oleh Jokowi-Jokowi tidak hanya berebut politik jabatan, tapi dirinya ingin memainkan politik pengaruh untuk anaknya, Gibran.

Meski tak lagi menjabat presiden, Jokowi masih memiliki modal politik besar berupa jejaring kekuasaan, loyalis birokrasi, serta tingkat penerimaan publik yang relatif tinggi.



“Dua periode Prabowo–Gibran berarti delapan hingga sepuluh tahun konsolidasi kekuasaan. Itu waktu yang sangat cukup untuk mematangkan Gibran sebagai figur nasional dengan legitimasi dan pengalaman,” kata Dedi.

Ia menilai narasi keberlanjutan pembangunan hanyalah kemasan politik yang mudah diterima publik. Program-program strategis era Jokowi akan lebih aman secara politik jika dilanjutkan oleh figur yang masih berada dalam satu garis kepentingan. Dalam skema ini, Prabowo dipandang sebagai jembatan kekuasaan, sementara Gibran merupakan investasi politik jangka panjang.

Jokowi Panik

Pidato Jokowi dalam dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar pada akhir Januari 2026 menuai sorotan publik dan menimbulkan beragam interpretasi. Pasalnya, saat berpidato Jokowi tidak seperti biasanya yang kalem dalam penyampaiannya. Tapi, kali ini Jokowi sangat menggebu-gebu dan melontarkan pernyataan yang mengejutkan yakni siap berjuang mati-matian dan akan habis-habisan untuk memenangkan PSI. Jokowi pun terlihat emosional.

Melihat gaya pidato yang berapi-api dan berbeda dari biasanya sehingga muncul penilaian bahwa

Jokowi sedang mengalami kepanikan atau ingin memberikan gertakan. Kepanikan yang dimaksud Jokowi sedang memperlihatkan kecemasan terhadap masa depan PSI di Pemilu 2029. Sebagai gertakan ini muncul dari perasaan terancam, sehingga dia berusaha menegaskan pengaruh politiknya.

Hal ini tersebut disampaikan oleh Peneliti Politika Research & Consulting, Nurul Fatta. Menurutnya pidato Jokowi bukan sekadar ekspresi loyalitas kepada PSI, melainkan sinyal rasa terancam di tengah konstelasi politik nasional yang terus bergerak.

“Justru saya melihat teriakan Jokowi dalam pidatonya, yang akan

mati-matian bekerja untuk PSI, adalah teriakan orang yang sedang terancam, cemas, dan penuh kekhawatiran,” ujar Fatta seperti dilansir *Politikal.id*, Minggu, 1 Februari 2026.

Dia menilai kecemasan tersebut berkaitan erat dengan masa depan politik Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi khawatir putra sulungnya tidak lagi sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto pada periode berikutnya.

“Kalau dari aspek politiknya, saya meyakini Jokowi khawatir anak sulungnya tidak lagi dijadikan pendamping Presiden Prabowo. Tercatat sudah dua kali Jokowi menegaskan Prabowo–Gibran dua periode. Ungkapan itu adalah ungkapan harapan,” ujarnya.

Menurutnya pernyataan Jokowi tentang Prabowo–Gibran dua periode mencerminkan keinginan kuat yang belum tentu sejalan dengan realitas politik ke depan. Sebab, dia menyadari pengaruhnya semakin meredup karena tidak lagi memiliki kekuasaan sebesar dulu waktu menjabat sebagai presiden RI.

Kekhawatiran Jokowi pun mulai terbaca- di tengah gelombang dukungan dua periode Presiden Prabowo sejumlah partai mulai mengabaikan sosok Gibran. Kemungkinan besar peluang Gibran kembali diusung sangat kecil.

Partai koalisi pemerintah secara tegas hanya mendukung dua periode Prabowo, namun untuk calon wakil presiden belum ditentukan. Seperti sikap yang diputuskan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hanya mendukung Prabowo tanpa Gibran.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PKB, Syaiful Huda tegas mengatakan bahwa partainya telah mencapai kesepakatan bulat untuk menyokong

Prabowo minimal selama dua periode. Dan dalam visi masa depan tersebut tidak memunculkan nama Gibran.

“Ya, PKB bulat dukung untuk minimal dua periode. Sementara ini yang jadi diskusi kita mendukung Pak Presiden dulu. Kita belum, belum *ngomongin* soal cawapres,” tegas Huda saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jumat, 6 Februari 2026.

Langkah PKB yang memilih “menyimpan” pembahasan cawapres ini mengisyaratkan bahwa tiket pendamping Prabowo di 2029 masih bersifat dinamis dan belum tentu otomatis jatuh kembali ke tangan Gibran. Fokus PKB saat ini justru lebih tertuju pada pengawalan program strategis nasional, khususnya terkait transformasi sistem ekonomi yang mereka sebut sebagai “ekonomi konstitusi”.

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Partai berlambang matahari bersinar ini justru secara terang-terang akan menawarkan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2029 nanti.

Wacana memasang Prabowo-Zulhas pada Pemilu 2029 ini diungkapkan oleh Wakil Ketua PAN Eddy Soeparno. Menurutnya pasangan ini berpotensi akan memperkuat mesin partai dan meningkatkan elektoral PAN pada pemilihan presiden mendatang.

“Kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029 tentu. Bagi saya, itu juga akan menghidupkan mesin partai. Kader-kader juga akan tergerak untuk mendukung ketua umumnya,” ujar Eddy saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis, 5 Februari 2026.

Menurutnya dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden

atau presidential threshold, partai politik memiliki peluang lebih besar untuk mengusung kader terbaiknya sebagai calon wakil presiden.

“Gini, bagi saya, saya adalah partai politik dan apalagi partai politik itu sekarang memiliki kesempatan untuk bisa mengajukan kader-kadernya dengan tidak ada presidential threshold. Tentu saya mau dukung Pak Zulhas,” kata Eddy.

Eddy bahkan meyakini, jika Zulhas mendampingi Prabowo, perolehan suara PAN akan meningkat signifikan pada Pemilu 2029. “Saya bisa pastikan perolehan suara partai nanti akan melonjak di tahun 2029,” jelas dia.

Meski secara pribadi mendukung pasangan Prabowo-Zulhas, dirinya tegas mengatakan bahwa keputusan resmi PAN terkait paket capres-cawapres belum ditetapkan, dan masih menunggu dinamika politik ke depan.

“Kita tentu kita lihat nanti opsi-opsi terbaik. Karena kembali lagi, yang namanya paket itu tentu kan harus ada simbiosisnya, bisa bekerja sama dengan baik, ada juga dukungan elektoralnya tinggi dan sebagainya. Jadi pertimbangan-pertimbangannya banyak untuk itu,” ungkap Eddy.

Namun demikian, Eddy



Eddy Soeparno



menegaskan bahwa sikap PAN untuk kembali mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 sudah final. Dia mengingatkan, PAN merupakan satu-satunya partai di luar Partai Gerindra yang secara konsisten mendukung Prabowo dalam tiga kali pemilihan presiden.

“Kita sudah mendukung Pak Prabowo tiga kali, keempat kalinya itu sudah jadi jawaban kita. Bagi kita, itu sudah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali nanti di tahun 2029,” ungkapnya.

Meski ini wacana tersebut bersifat pribadi bukan keputusan resmi partai, namun ini menjadi sinyal bahwa Gibran tidak lagi menarik untuk

diperhitungkan. Bahkan bisa jadi Gibran sudah mulai diabaikan.

Meski belum menentukan sikap terkait siapa calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang, partai koalisi pemerintah secara perhitungan politik dan electoral pastinya akan mengusung ketua umum atau kader terbaik dari partai mereka masing-masing.

Seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat kemungkinan besar akan menawarkan ketua umum mereka masing-masing. Misal, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat potensial mendampingi Prabowo pada Pilpres

2029.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil juga memiliki daya tawar yang kuat untuk dipinang sebagai calon presiden. Sebab, Golkar memiliki suara yang besar di Parlemen.

Politik dinamis bisa berubah secara cepat dan sulit untuk ditebak. Belajar dari Pilpres 2024 munculnya Gibran tidak pernah diperkirakan jauh-jauh hari sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no.90, setelah itu peta politik pun berubah.

Muncul pasangan Prabowo -Gibran, padahal sebelumnya Prabowo digadang-gadang akan bersama bersama Muhaimin Iskandar atau AHY.

PARTAI BARU DAN ORNAMEN DEMOKRASI

Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat mendeklarasikan diri menjadi partai politik pada awal 2026. Keduanya memiliki arah politik berbeda, yakni keberlanjutan dan perubahan. Apakah munculnya partai politik baru memberikan warna tersendiri atau hanya jadi ornamen demokrasi?

Pemilihan umum (Pemilu) 2029 masih empat tahun lagi, namun perpolitikan nasional sudah mulai memanas. Partai-partai lama sudah mulai menggerakkan mesin-mesin politiknya untuk menyambut pesta demokrasi lima tahunan ini.

Partai Gerindra telah mempersiapkan untuk menghantarkan kembali Ketua Umumnya, Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2029. Sementara PSI juga telah menyalakan genderang “perang” menyambut Pemilu 2029, dengan mengungkapkan akan menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang banteng, dan mempersiapkan strategi agar partai berlambang gajah ini masuk ke parlemen dan menjadi partai besar.

Di sisi lain, partai politik baru juga sudah mulai bermunculan. Pada awal tahun 2026 dua organisasi kemasyarakatan telah mendeklarasikan diri menjadi partai politik baru yakni Partai Gema Bangsa

dan Partai Gerakan Rakyat.

Namun, saat mendeklarasikan diri kedua partai politik baru ini telah menentukan sikap politik yang berbeda. Partai Gema Bangsa menyatakan akan mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden pada Pilpres 2029. Sebaliknya, Partai Gerakan Rakyat memilih perjuangan politik untuk perubahan Indonesia yakni akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2029 mendatang.

Sikap Partai Gema Bangsa disuarakan saat deklarasi partai itu di JCC, Jakarta pada Sabtu, 17 Januari 2026. Ketua Umum (Ketum) Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq secara tegas memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pemilu mendatang. Rofiq beralasan bahwa Prabowo merupakan sosok tokoh bangsa yang langka. Sehingga tidak ada alasan bagi partai baru ini tidak memberikan dukungan kepada Prabowo untuk kembali memimpin republik ini.

“Partai Gema Bangsa juga mendukung Bapak Prabowo Subianto maju kembali untuk Pilpres di 2029. Rasa-rasanya langka mencari calon pemimpin seperti apa yang dimiliki oleh Pak Prabowo hari ini,” ujar Rofiq.

Dia pun menilai bahwa Prabowo adalah pemimpin yang memiliki ketegasan dalam memberantas korupsi. Dia pun memberikan pujian bahwa tidak ada Presiden RI yang tegas seperti Prabowo.

“Begitu kerasnya melawan korupsi. Tidak pandang bulu apa pun disikat. Banyak sekali para koruptor-koruptor itu lari ke luar negeri karena ancaman-ancamannya. Kita tidak pernah mendapati presiden-presiden sebelumnya yang segalak seperti Pak Prabowo,” katanya.

Dia pun memberikan dukungan atas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan gagasan yang sangat patut untuk didukung untuk mewujudkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, berdaulat dan mandiri.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa dukungan dua periode pemerintahan Prabowo menjadi keharusan. Sebab, untuk membangun Indonesia yang begitu besar tidak cukup hanya lima tahun.

“Enggak realistis kalau hanya satu periode. Dua periode itu syarat minimal seseorang pemimpin itu bisa teruji, apakah yang menjadi bagian dari gagasannya atau misi perjuangannya itu bisa tercapai atau tidak,” ujar Rofiq.

Menurutnya ideal program-program pembangunan seorang presiden akan terasa manfaatnya jika ada keberlanjutan. Sehingga, dia tegas mengatakan mendukung Prabowo kembali memimpin Indonesia hingga tahun 2034.

“Kalau hanya lima tahun menurut

saya tidak akan menghasilkan, tidak banyak yang dihasilkan, tapi kalau sepuluh tahun saya yakin bisa kita rasakan, ada dampak,”katanya.

Memilih jalan perubahan

Sementara itu, sikap politik yang bersebrangan dengan pemerintah saat ini langsung disuarakan oleh Partai Gerakan Rakyat. Partai baru ini memilih jalan terjal mengusung perubahan dengan mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.

Dalam pidato perdananya usai deklarasi partai di Hotel Aryaduta, Jakarta, Minggu, 18 Januari 2026 Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid tegas menentukan sikap akan membawa perubahan di negeri ini. Menurutnya Indonesia harus segera diperbaiki sehingga menjadikan Indonesia maju, adil dan makmur segera terwujud.

“Kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur. Dan kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti, insyaallah, adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Sahrin di hadapan peserta Rakernas.

Menurutnya, keputusan mendirikan partai baru ini merupakan ikhtiar bersama untuk menghadirkan alat perjuangan politik yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Sebab, partai ini didirikan atas semangat bersama para anggota Gerakan Rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan tekad yang sama.

“Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Sebuah hari di mana kerinduan terhadap kekuatan politik alternatif diwujudkan. Partai ini lahir dari orang-orang kecil, dari rakyat biasa,” kata Sahrin.

Dia mengatakan, seluruh peserta



Ahmad Rofiq

Rakernas yang hadir memiliki satu tujuan yaitu menghadirkan partai politik yang berkomitmen memperjuangkan kehendak dan kepentingan rakyat secara nyata. Menurutnya keputusan mendirikan partai politik merupakan langkah besar yang telah melalui proses panjang sejak 2023.

Dia mengungkapkan bahwa Gerakan Rakyat terlebih dahulu dideklarasikan sebagai organisasi kemasyarakatan pada 2025, sebelum akhirnya pada awal 2026 menetapkan diri menjadi partai politik.

“Kita memulai perjalanan ini sejak 2023, lalu 2024, 2025 mendeklarasikan Gerakan Rakyat sebagai ormas. Dan di awal 2026, melalui Rakernas, kita menetapkan berdirinya partai politik bernama Partai Gerakan Rakyat,” ujarnya.

Jangan jadi ornamen demokrasi

Munculnya partai baru dalam setiap pemilu pasca reformasi menjadi hal yang biasa terjadi. Menurut pengamat

politik Adi Prayitno kemunculan partai politik baru umumnya bertujuan memperluas dukungan politik, baik dengan merapat ke kekuasaan maupun memilih berada di luar kekuasaan. Kedua jalan tersebut sedang ditempuh oleh Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat.

Partai Gema Bangsa memilih merapat lingkaran kekuasaan. Namun, apa pilihan tersebut akan bisa mendongkrak electoral partai baru ini pada Pemilu 2029. Menurut Adi merapat ke kekuasaan tidak menjadi jaminan mereka mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga mereka mendapat suara yang tinggi dalam pemilu. Pun sama, memilih jalur perubahan dengan berada di luar kekuasaan juga tidak menjadi jaminan partai ini menjadi pilihan yang tepat bagi rakyat Indonesia.

Menurut Adi kunci untuk mendapatkan electoral pada bilik suara pada Pemilu 2029 ditentukan dari usaha-usaha politik yang mereka lakukan. Kerja-kerja politik yang

manfaatnya langsung dirasakan menjadi penentunya. Tidak cukup menjual figure, sebab ini tidak lagi menjadi jaminan dominan masyarakat menjatuhkan pilihan terhadap partai-partai baru.

“Ini musim semi politik di mana ada figur dan organisasi politik tertentu ingin berkontribusi sekaligus menjadi bagian penting dalam kompetisi politik. Tapi kuncinya, kerja politik dan waktulah yang akan menjawab apakah mereka serius atau hanya ornamen,” ujar Adi Prayitno melalui kanal YouTube-nya Senin, 19 Januari 2026.

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa lahirnya partai politik baru di Indonesia biasanya hanya menjadi kanal dari kelompok-kelompok politik tertentu. Dia menyebut misalnya Partai Gerakan Rakyat akan dijadikan sebagai kendaraan politik untuk Anies Baswedan di 2029.

Kemunculan partai-partai baru ini, menurut Adi Prayitno, memanfaatkan celah rendahnya party ID atau identitas kepartaian masyarakat Indonesia. Data survei menunjukkan hanya sekitar 20 persen masyarakat yang merasa dekat dengan partai politik tertentu.

“Sekitar 80 persen masyarakat merasa tidak dekat dan tidak menjadi bagian dari partai politik. Ini kesempatan politik yang coba dimaksimalkan partai-partai baru seperti Partai Gerakan Rakyat dan Partai Gema Bangsa,” jelasnya.

Namun ia mengingatkan, publik saat ini menyukai partai yang aktif belusukan, melakukan kunjungan *door to door*; menyapa langsung masyarakat, dan memberikan solusi atas kesulitan hidup rakyat.

Dengan nada sinis, Adi Prayitno memperingatkan nasib partai-partai baru yang gagal membuktikan keseriusan mereka. “Kalau partai



Sahrin Hamid

politik baru gagal meyakinkan pemilih dan tidak mampu melakukan penetrasi ke basis massa, maka mereka hanya menjadi ornamen dalam demokrasi, tidak lolos verifikasi, tidak bisa ikut pemilu. Sekalinya bisa ikut pemilu, dia tidak lolos ke parlemen,” tegasnya.

Sementara itu, dosen komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai dukungan Partai Gema Bangsa terhadap Prabowo Subianto itu terlalu dini dan terkesan blak-blakan melirik *coattail effect* dari Prabowo.

“Memang Prabowo orang hebat, tapi kalau membentuk partai baru dan tiba-tiba nebeng keteneran Prabowo, kenapa enggak bikin *fans club* saja?» ujar Hensa dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 20 Januari 2026.

Menurutnya kehadiran partai politik baru seharusnya bisa menambah warna dan pilihan politik baru untuk masyarakat. Namun, ia melihat partai yang dipimpin Ahmad Rofiq ini justru menjadikan parpol hanya sebagai komoditas elektoral demi posisi.

Maka, dia secara sinis mengatakan jika tidak memiliki perbedaan dengan partai-partai yang sudah buat apa mendirikan partai baru. Kelahiran partai seharusnya menjadi jalan untuk memperjuangkan rakyat bukan hanya sekadar mengejar posisi.

“Buat apa membentuk partai baru namun tidak bisa menghadirkan hal yang berbeda dibandingkan partai-partai yang sudah ada sekarang,” kata Hensa.

Lebih lanjut dia menambahkan pembentukan partai baru harusnya menjadi cermin koreksi terhadap partai politik lama. Sehingga, selain mengakomodasi kepentingan parpol itu sendiri, mereka juga bisa menjadi perwakilan dari masyarakat yang belum terwakilkan.

“Jika begini caranya, mungkin secara kepentingan elite politik terpenuhi, tapi masyarakat tidak melihat ada sesuatu yang baru dan ini justru masalahnya,” ujarnya.

Karenanya, Hensa berpendapat partai politik baru seharusnya bisa

tampil sebagai kontestan yang menjadi pembeda, tidak sekedar penumpang baru dalam rombongan lama demi posisi belaka.

Menurutnya jika tidak ada perbedaan dengan partai yang sudah ada maka bisa diprediksi partai-partai baru ini hanya menjadi ornamen Pemilu 2029. Berkaca dari Pemilu sebelumnya, partai politik baru berguguran gagal masuk ke parlemen.

Menguji keseriusan partai baru

Munculnya partai baru di setiap Pemilu hal yang biasa terjadi. Namun, hanya segelintir yang benar-benar sampai ke bilik suara. Selebihnya, gugur jauh sebelum hari pencoblosan karena tak mampu memenuhi persyaratan. Sebab mendirikan partai politik dan menjadikan partai tersebut sebagai peserta pemilu bukan hal yang mudah.

Untuk masuk dalam panggung kompetisi Pemilu harus menembus serangkaian persyaratan yang ketat dan berlapis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan partai baru yang bisa lolos menjadi peserta pemilu wajib memenuhi sejumlah syarat krusial. Beberapa di antaranya dikenal sebagai hambatan paling berat, yakni kepengurusan di semua provinsi, kepengurusan di minimal 75 persen kabupaten/kota di setiap provinsi, serta kepengurusan di sedikitnya 50 persen kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan.

Partai politik juga diwajibkan memiliki anggota paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota, dibuktikan dengan kartu anggota. Seluruh struktur kepengurusan tersebut harus disertai keberadaan

kantor tetap hingga tahapan akhir pemilu selesai. Semua persyaratan itu kemudian diverifikasi melalui dua tahap sekaligus, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Waktu untuk memenuhi seluruh ketentuan tersebut pun tidak panjang. Jika mengacu pada pengalaman Pemilu 2024, pendaftaran partai peserta pemilu dibuka sekitar 17 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan asumsi tahapan Pemilu 2029 tidak banyak berubah, pendaftaran partai politik diperkirakan akan dibuka pada Agustus 2027. Artinya, partai-partai baru hanya memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk membangun organisasi berskala nasional dari pusat hingga kecamatan.

Namun, sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa tidak semua partai mampu melewati fase ini. Jumlah partai baru yang lolos sebagai peserta pemilu cenderung menyusut dari waktu ke waktu, seiring semakin beratnya syarat yang diberlakukan.

Seperti disampaikan pengajar dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fadli Ramadhanil, menjadikan partai baru menjadi peserta pemilu tidak mudah. Persyaratan yang sangat ketat bisa menggalkan mimpi partai baru menjadi pilihan rakyat di bilik suara.

Salah satu persyaratan yang terberat menurutnya seperti dikutip dari *Kompas.id* terletak pada kewajiban memenuhi jumlah minimal anggota partai. Sebab, tidak mudah mengajak masyarakat untuk bergabung sebagai anggota partai di kala tingkat *party id* rendah.

Tingkat *party id* menunjukkan seberapa kuat secara psikologis seorang pemilih merasa terhubung secara emosional atau identitas dengan suatu partai politik

Akibatnya, parpol cenderung mencatut orang untuk dimasukkan sebagai anggota. Sejumlah masyarakat bahkan sering melapor ke KPU bahwa namanya dicatut sebagai anggota partai. Situasi ini menjadi ujian awal yang kerap menentukan lolos atau tidaknya sebuah partai sehingga menuntut kesiapan sejak jauh hari.

Lebih jauh, Fadli melihat peluang syarat partai politik peserta pemilu bakal dipersulit dalam revisi UU Pemilu yang bakal dibahas DPR. Hal ini karena menguatnya dominasi partai-partai yang telah memiliki kursi di parlemen ingin mempertahankan *status quo*. Kehadiran parpol baru kerap dianggap sebagai ancaman dalam kontestasi elektoral, terutama bagi partai medioker yang suaranya mendekati ambang batas parlemen.

Terlebih, semua partai peserta pemilu dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden seiring dihapusnya ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat parpol-parpol membuat rekayasa konstitusional untuk menjegal calon presiden/wakil presiden alternatif sejak masa pendaftaran parpol peserta pemilu.

Dengan demikian, persoalan mudah atau sulitnya menjadi peserta pemilu tidak hanya ditentukan oleh kesiapan parpol baru memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga oleh arah kebijakan pembentuk undang-undang.

Kita tunggu keseriusan Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat. Apakah kedua partai ini bisa lolos masuk gelanggang Pemilu 2029 mendatang. Sehingga menjadi bisa pilihan alternatif bagi rakyat yang sudah jenuh dengan partai-partai lama. Kita tunggu!



KONTROVERSI PENGANGKATAN 32.000 PEGAWAI MBG JADI PPPK:

ANTARA PRIORITAS PROGRAM DAN KECEMBURUAN SEKTORAL

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengangkat 32.000 pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) per 1 Februari 2026. Kebijakan yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 ini memicu perdebatan publik, terutama dari kalangan

pendidik dan tenaga kesehatan yang merasa prioritas pengangkatan aparatur negara tidak berkeadilan.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengangkatan ini merupakan skema yang telah dirancang sejak awal rekrutmen. Mereka yang diangkat bukanlah seluruh personel dapur MBG, melainkan tiga jabatan strategis di setiap SPPG, yakni kepala unit, ahli gizi, dan akuntan yang bertugas

sebagai representasi pemerintah dalam mengawasi jalannya program di lapangan.

“Setiap SPPG itu ditempatkan tiga perwakilan Badan Gizi Nasional. SPPG-nya milik mitra, relawannya berkoordinasi dengan mitra, tetapi Badan Gizi menempatkan tiga orang. Ini adalah pegawai Badan Gizi Nasional. Dan mereka inilah kemudian status kepegawaianya dijanjikan dulu ketika direkrut untuk PPPK,” ujar



Dadan Hindayana

Dadan usai Rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Januari lalu.

BGN juga memastikan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara transparan melalui Computer Assisted Test (CAT) dan pelantikan serentak dilakukan awal bulan ini. Pengangkatan tahap kedua ini menyusun tahap pertama yang telah dilaksanakan pada 1 Juli 2025 dengan jumlah 2.080 pegawai. Rencananya, pemerintah akan kembali membuka seleksi tahap ketiga dan keempat dengan masing-masing 32.460 formasi.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa klarifikasi ini penting untuk meluruskan penafsiran keliru di masyarakat. Frasa “pegawai SPPG” dalam Perpres 115/2025 merujuk secara spesifik pada pegawai inti dengan fungsi strategis, bukan seluruh personel operasional harian SPPG. Relawan dan staf lapangan di dapur MBG tidak termasuk dalam skema pengangkatan PPPK dan tetap berstatus sebagai mitra atau tenaga partisipatif non-ASN.

“Peran relawan sangat krusial dalam

mendukung keberhasilan program, tetapi secara regulasi mereka tidak termasuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan,” ujar Nanik.

Dari sisi pemerintah daerah, kebijakan ini tidak berdampak langsung pada anggaran daerah karena seluruh pembiayaan gaji pegawai SPPG menjadi tanggungan pemerintah pusat. Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi mengenai pembebanan anggaran ke daerah.

“Itu sudah tanggungan pusat. Daerah hanya mengawasi, sejauh ini masih berjalan normal saja,” katanya.

Hal senada disampaikan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana. Pemerintah Kota Mataram yang memiliki sekitar 45 SPPG dengan 135 pegawai yang bakal diangkat menjadi PPPK masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

“Apapun itu, kami harus tetap ikut



Mohan Roliskana

kebijakan pusat, termasuk untuk kebijakan politik anggaran,” ujarnya.

Kecaman dari Sektor Pendidikan

Di tengah berjalannya proses pengangkatan tersebut, gelombang kritik justru menguat dari kalangan guru honorer dan tenaga pendidik. Mereka menilai kebijakan ini menunjukkan ketimpangan prioritas pemerintah dalam pengangkatan aparatur sipil negara.

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengingatkan pemerintah agar prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi. Ia merespons keresahan kalangan guru honorer yang merasa dianaktirikan karena harus melewati proses panjang dan seleksi ketat, sementara pegawai program MBG mendapatkan jalur cepat pengangkatan PPPK.

“Kritik tersebut masuk akal dan harus kita terima dengan baik. Jangan sampai mereka yang sudah puluhan tahun mengabdikan tidak diangkat, sementara yang baru bekerja justru diprioritaskan. Kami menghargai semua aspirasi, namun skemanya harus dipikirkan secara matang agar tidak terjadi diskriminasi,” kata Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Fikri yang juga legislator dari Fraksi



Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

PKS ini menyadari adanya perbedaan logika kerja antara guru yang berbasis jam mengajar dan tenaga teknis yang berbasis jam kerja harian. Namun menurutnya, perbedaan skema rekrutmen tidak boleh melukai rasa keadilan para pendidik yang telah mengabdikan puluhan tahun dengan honor minim, bahkan disebut masih berada di kisaran Rp400 ribu per bulan.

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyoroti adanya video viral di media sosial yang memperlihatkan kekecewaan para guru honorer karena gajinya lebih kecil dibandingkan sopir mobil program MBG. Menurutnya, jika hal ini tidak ditanggapi serius, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan yang lebih luas.

“Ingat, guru honorer ini berjasa besar untuk mencerdaskan anak-anak penerus bangsa. Begitu juga tenaga kesehatan yang memiliki andil besar dalam peningkatan kualitas SDM kita, sehingga harus diberi kesempatan yang sama untuk menjadi P3K agar adil,” tegas Neng Eem di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, bahkan meminta pemerintah berpikir



Selly Andriany Gantina

ulang atas kebijakan ini. Ia menyoroti kondisi guru madrasah yang hidup dengan honor Rp200 ribu hingga 300 ribu per bulan, bahkan ada yang lebih rendah.

“Ini bukan soal menolak program pemenuhan gizi. Ini soal keadilan prioritas negara. Saat ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk program MBG, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap guru madrasah yang hidup dengan honor minim,” kata Selly dalam siaran persnya, Senin (26/1/2026).

Ia juga menyoroti adanya 191.296 formasi Kementerian Agama yang telah disetujui KemenPAN-RB, namun hanya 11.339 guru madrasah yang diprioritaskan karena lulus Uji Kompetensi (UKOM) tahun 2024. Sementara itu, guru yang lulus passing grade UKOM 2023 justru terabaikan meskipun secara hukum telah memenuhi ambang batas kompetensi nasional.

“Mereka sudah lulus passing grade. Sudah diuji negara. Tapi justru tidak diberi jalan. Ini bukan soal teknis, ini soal diskriminasi kebijakan,” tegasnya.

Suara dari Guru Madrasah

Kritik paling tajam disampaikan langsung oleh organisasi guru dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia, Yaya Ropandi, menyoroti ketimpangan pengangkatan pegawai MBG dengan nasib guru madrasah swasta yang bahkan tidak bisa mengikuti seleksi PPPK.

“Mudah-mudahan dengan





Yaya Ropandi

pertemuan hari ini, kami guru swasta yang notabene swasta murni dari yayasan bisa diikutsertakan. Seperti yang dilakukan barangkali, kami tidak iri terhadap program MBG, PGM Indonesia mendukung Pak sepenuhnya, karena yang dikasih makan itu adalah siswa-siswa kami. Hanya pada proses pengangkatan mereka impresnya cepat diangkat menjadi PPPK, sementara kami tidak. Itu yang terjadi hari ini,” ujar Yaya di hadapan pimpinan DPR RI, Rabu (11/2/2026).

Ia menegaskan bahwa PGM Indonesia tidak mempersoalkan program MBG. Namun, ia mempertanyakan kecepatan proses

pengangkatan pegawai program tersebut dibandingkan guru madrasah yang sudah mengabdikan 15 hingga 20 tahun. Banyak guru madrasah swasta hingga kini tidak mendapat kesempatan mengikuti seleksi ASN maupun P3K karena terbentur regulasi.

“Salah satu hal yang perlu mendapatkan atensi, yang pertama Ibu Pimpinan, kami guru swasta mau ikut seleksi ASN saja, mau ikut PPPK saja tidak bisa. Karena aturannya tidak ada,” katanya.

Yaya menyebut kondisi ini menjadi jeritan guru madrasah di berbagai daerah. PGM Indonesia yang telah terbentuk di 27 provinsi dan 185 kabupaten/kota menerima keluhan serupa terkait status dan kesejahteraan guru. PGM meminta DPR mendorong pemerintah membuka regulasi agar guru madrasah swasta dapat mengikuti seleksi PPPK sehingga tidak terjadi kesan perlakuan berbeda dalam pengangkatan pegawai oleh Negara.

Kritik dari DPRD DIY Soal Regulasi dan Keadilan

Di tingkat daerah, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta turut menyoroti kebijakan ini. Ketua Komisi D DPRD DIY, R. B. Dwi Wahyu, menilai pengangkatan pegawai MBG menjadi PPPK tidak sesuai dengan Asta Cita Presiden. Menurutnya, substansi hadirnya MBG sebenarnya adalah mendorong kualitas pendidikan Indonesia yang lebih maju, namun aspek berimbang atau keadilan masih perlu menjadi pertimbangan.

“Bukan saya menolak, tapi harus berimbang. Sekarang ada sekitar 5 ribu guru honorer di DIY ini rata-rata paling gajinya Rp500 ribu, bahkan ada guru yang gajinya mengandalkan dari komite, ini memalukan bagi

pemerintah,” katanya di DPRD DIY, Kamis (29/1/2026).

Ia juga mempertanyakan dasar regulasi pengangkatan pegawai dapur MBG yang nota bene adalah entitas swasta.

“Karena yang namanya dapur dan sebagainya itu kan pribadi, bukan berangkat dari pemerintah, kenapa harus di-P3K-kan? Regulasinya apa? Nah, ini saya hanya mengkritisi saja. Kalau iya, regulasinya harus jelas, tetapi juga harus diperhatikan gurunya. Gurunya juga harus bergizi, bergizi dalam arti apa? Salah satunya kesejahteraan,” ucapnya.

Dwi menegaskan bahwa guru juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Menurutnya, kapasitas guru harus didukung oleh pemerintah, baik melalui pendidikan, pelatihan, maupun penyediaan sarana seperti laptop untuk pembelajaran berbasis AI. “Kalau sekarang honorariumnya cuma Rp700 ribu, masak mau beli laptop? Ini logika. Makanya harapan kami kebijakan ini harus, bukan ditinjau kembali tetapi harus berkeadilan,” ujarnya.

Ia secara tegas juga menyebut tidak menolak rencana kebijakan tersebut, hanya saja masih ada hal yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, gizi yang tercukupi bagi peserta didik juga harus didukung dengan kualitas seorang guru yang mumpuni.

“Guru juga harus bergizi dalam arti yang luas, honorariumnya jelas, kesejahteraannya jelas. Pasti ada kesenjangan ketika pegawai MBG menjadi PPPK dan guru tetap honorer. Nanti tujuannya Pak Presiden enggak tercapai, karena Pak Presiden itu sebetulnya bagaimana anak-anak bergizi linear dengan mutu pendidikan. Tapi masa depan yang



R. B. Dwi Wahyu

lebih baik ini juga guru akan menjadi kunci,” tandasnya.

Perspektif Akademisi, Kritik atas Ketidakadilan Struktural

Dari sudut pandang akademisi, kebijakan ini mendapat sorotan tajam. Analisis yang dipublikasikan *The Conversation Indonesia* menilai pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN berskema PPPK mencerminkan ketidakadilan struktural bagi pekerja sektor publik lain. Negara dinilai sedang menunjukkan bahwa MBG layak mendapatkan jalur cepat birokrasi, mengalahkan guru honorer dan tenaga kesehatan non-ASN.

“Ada permasalahan berlapis dalam keputusan yang terkesan serampangan ini terhadap 32 ribu ASN baru ini. Mulai dari problem administratif—termasuk kejelasan mekanisme perekrutan dan dasar hukum—hingga persoalan ketidakadilan bagi pekerja sektor publik lain yang selama bertahun-tahun menunggu pengangkatan serupa,” tulis analisis tersebut.

Pengangkatan SPPG tidak hanya soal pelaksanaan kebijakan, tetapi juga cara pemerintah menyampaikan pesan politik kepada publik tentang apa dan siapa yang dianggap penting oleh negara dalam waktu singkat. Termasuk pula ini soal sebaliknya: siapa yang bisa terus ditunda tanpa kepastian.

Menurut analisis tersebut, status PPPK memberi sinyal bobot politik dan administratif yang besar untuk mengamankan program melalui anggaran negara, stabilitas kepegawaian, dan legitimasi lembaga.

Dengan kata lain, negara sedang menetapkan bahwa pekerjaan di sektor MBG adalah fungsi strategis yang layak mendapatkan jalur cepat birokrasi—sebuah kemewahan yang



tidak dinikmati pekerjaan di sektor vital lainnya, seperti pendidikan (guru honorer) dan kesehatan (tenaga kesehatan non-ASN).

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan masih terdapat lebih dari 700 ribu guru honorer yang belum diangkat sebagai ASN. Padahal, banyak di antara mereka telah mengabdikan belasan hingga puluhan tahun. Mereka terhalang tak hanya minimnya kesempatan seleksi, tetapi juga terkendala formasi dan anggaran daerah. Bahkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komnas HAM berulang kali menyoroti ketidakpastian status guru honorer sebagai persoalan tata kelola dan hak atas pekerjaan yang layak. Namun hingga kini, penyelesaiannya jalan di tempat.

“Pengangkatan pegawai SPPG ke dalam struktur ASN juga berfungsi sebagai upaya memperoleh legitimasi birokrasi melalui prosedur formal. Namun, legitimasi tidak cukup hanya bersandar pada legalitas prosedural negara saja, tetapi juga membutuhkan

pembenaran normatif dan penerimaan publik. Di sinilah kelemahannya. Pengangkatan pegawai SPPG menjadi pegawai negara memang legal karena datang dari pemerintah dan dilengkapi oleh peraturan pendukung. Namun, ketika publik melihat ketimpangan perlakuan terhadap guru honorer dan sektor lain, legitimasi kebijakan ini justru menjadi rapuh secara sosial,” tulis analisis tersebut.

Upaya Pemerintah Menjawab Kritik

Menanggapi berbagai kritik yang mengemuka, pemerintah melalui berbagai pernyataan pejabatnya mencoba memberikan penjelasan dan solusi. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengungkapkan bahwa DPR tengah mematangkan formulasi kodifikasi tiga undang-undang pendidikan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai benang kusut tata kelola guru.

Ketiga regulasi tersebut, yakni UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi, akan disatukan

menjadi regulasi komprehensif. Langkah ini bertujuan memperbaiki sistem rekrutmen, kesejahteraan, hingga memberikan payung hukum perlindungan profesi guru yang belakangan rentan terhadap kriminalisasi saat mendidik siswa.

“Jika tata kelola ini berhasil diperbaiki, standar kesejahteraan guru di Indonesia diharapkan dapat meningkat mendekati standar negara maju seperti Finlandia, di mana gaji guru sangat tinggi namun dibarengi dengan kualifikasi ketat. Namun risikonya adalah seleksi menjadi guru tidak akan mudah. Ke depan arahnya akan ke sana, meski kita harus realistis dengan kondisi anggaran,” jelas Fikri.

Sementara itu, Fraksi PKB MPR RI mengingatkan pemerintah akan amanat konstitusi. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengutip Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak memperoleh pekerjaan. Pada Pasal 28D ayat (2) disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Antara Sukses Program dan Tuntutan Keadilan

Kebijakan pengangkatan 32.000 pegawai MBG menjadi PPPK telah menempatkan pemerintah pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan pengawalan ketat dari aparaturnya untuk memastikan pelaksanaannya sesuai standar. Keberadaan kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan berstatus ASN di setiap dapur MBG dinilai strategis untuk menjaga akuntabilitas program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas.



Di sisi lain, kebijakan ini memicu kecemburuan sektoral yang tidak bisa diabaikan. Ribuan guru honorer yang telah mengabdikan puluhan tahun dengan honor jauh di bawah upah layak merasa prioritas negara tidak berpihak kepada mereka. Data menunjukkan masih ada guru dengan honor Rp200 ribu hingga Rp400 ribu per bulan, bahkan di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan sekalipun.

Ketua Komisi D DPRD DIY, R. B. Dwi Wahyu, merangkum kegelisahan ini dengan pernyataan yang lugas, “Guru juga harus bergizi.”

Maksudnya, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas yang setara dengan program pemberian gizi bagi siswa. Tanpa guru yang sejahtera, mutu pendidikan yang menjadi tujuan akhir MBG sulit dicapai.

Sementara itu, akademisi mengingatkan bahwa pengangkatan pegawai SPPG sebagai PPPK seharusnya dibaca bukan hanya sebagai kebijakan teknokratis, tetapi sebagai cermin cara negara menetapkan prioritas pembangunan dan mendistribusikan

keadilan birokrasi. Tanpa evaluasi menyeluruh terhadap tujuan dan dampak program, kebijakan tidak akan lagi berfungsi sebagai alat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan publik, tetapi hanya akan berfungsi sebagai simbol formal yang menegaskan eksistensi birokrasi.

“Saat ini, negara mungkin terlihat berhasil membangun institusi, tetapi kehilangan kepercayaan dari mereka yang paling lama mengabdikan,” demikian kesimpulan analisis *The Conversation Indonesia*.

Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara akselerasi program prioritas dan pemenuhan rasa keadilan bagi para pengabdian di sektor lain. Jawaban atas tantangan ini akan menentukan apakah kebijakan pengangkatan pegawai MBG menjadi PPPK akan dikenang sebagai terobosan yang berhasil atau justru sebagai kebijakan yang mengorbankan mereka yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan nasional.



TRAGEDI CISARUA, 25 MENIT YANG MENCEKAM DI BANDUNG BARAT

Senyap dini hari di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pecah oleh suara gemuruh yang datang dari arah lereng Gunung Burangrang. Bukan suara lazim yang biasa didengar warga. Itu adalah suara tanah, bebatuan, dan pepohonan yang bergeser, meluncur deras menerjang apa pun yang dilaluinya.

Nandang (40), warga Kampung Pasir Kuda, masih bisa merasakan getaran itu. Dari balik kegelapan yang pekat,

suara gemuruh memecah hening. Dalam hitungan menit, lumpur mulai masuk ke rumahnya.

“Kalau saya perkiraan hanya kurang dari setengah jam. Dari dua kali mendengar bunyi keras sampai lumpur mulai masuk ke dalam rumah,” kenang Nandang beberapa hari pascatragedi.

Perkiraan Nandang tentang waktu yang sangat singkat itu ternyata sejalan dengan hitungan para ahli. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi memodelkan kejadian tersebut.

Hasilnya mencengangkan sekaligus mengerikan, hanya butuh 1.500 detik atau sekitar 20-25 menit bagi material tanah, bebatuan, dan lumpur untuk meluncur dari puncak lereng hingga menerjang permukiman warga di bawah.

Dalam waktu sesingkat itu, puluhan nyawa melayang, puluhan rumah lenyap tersapu material, dan dua kampung yang tenang berubah menjadi lahan lumpur. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu, 24 Januari 2026, dini hari itu menjadi salah satu

bencana longsor terdahsyat yang pernah melanda Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, 24 Januari 2026

Hujan dengan intensitas ekstrem telah mengguyur kawasan Bandung Raya sejak Jumat malam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan mencapai lebih dari 220 milimeter per hari, angka yang masuk kategori ekstrem dan mampu memicu bencana hidrometeorologi. Tanah di lereng-lereng perbukitan yang sudah tua dan lapuk menjadi sangat jenuh. Sebuah bom waktu siap meledak.

Pada pukul **03.00 WIB dini hari**, saat sebagian besar warga terlelap, bencana datang. Bencana longsor terjadi, bukan sekadar tanah bergerak, melainkan longsor besar dengan material yang meluncur cepat menuruni lereng.

Kepala Desa Pasirlangu, Nur Awaludin Lubis, menjelaskan bahwa curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir menjadi faktor utama terjadinya pergerakan tanah di kawasan tersebut. Pendataan awal mencatat sekitar **30 unit rumah** terdampak timbunan longsor.

Bencana ini tidak hanya menimpa warga sipil. Sebanyak 23 prajurit Korps Marinir TNI AL yang sedang menjalani latihan pra-tugas di kawasan tersebut ikut tertimbun material longsor. Komunikasi mereka dengan pos komando utama terputus seketika.

Hitungan Korban yang Terus Beranjak

Dalam hitungan jam setelah bencana, kabar duka menyebar cepat. Data korban terus diperbarui seiring proses evakuasi yang berlangsung dramatis.

Pada hari pertama, Sabtu siang,



Nur Awaludin Lubis

Kepala Pusat Data BNPB, Abdul Muhari, melaporkan 7 korban meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dalam pencarian. Kepala BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, membenarkan angka tersebut seraya menyebutkan bahwa data masih terus berkembang.

Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan segera dikerahkan. Lebih dari 250 personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan turun ke lokasi. Namun, medan berat menjadi tantangan terbesar. Material longsor masih berupa lumpur kental, sehingga alat berat sulit dioperasikan. Pencarian hari pertama pun dihentikan pada pukul 17.00 WIB demi keselamatan tim.



Abdul Muhari



Ade Dian

Pada hari kedua, Minggu (25/1), Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, langsung meninjau lokasi bencana. Dalam kunjungannya, Wapres memastikan penanganan dilakukan maksimal. “Tim sudah turun semua ke lapangan dan kita upayakan semaksimal mungkin untuk pencarian korban,” ucapnya di Posko Pengungsian Balai Desa Pasirlangu.

Memasuki hari ketiga, Senin (26/1), tim SAR gabungan telah mengevakuasi total **38 kantong jenazah** dan mengirimkannya ke pos DVI untuk proses identifikasi. Tim Disaster Victim Identification (DVI) berhasil mengidentifikasi **20 jenazah** yang kemudian diserahkan kepada keluarga masing-masing.

Jumlah personel tim SAR gabungan yang terlibat dalam operasi ini mencapai sekitar **800 orang** dari berbagai unsur. Sebanyak sembilan unit ekskavator dikerahkan untuk melakukan pencarian di sektor A dan sektor B.

Pada Minggu, 1 Februari 2026, atau hari kesembilan pencarian, total korban yang berhasil dievakuasi mencapai 74 kantong jenazah. Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian, mengatakan pada hari itu tim menemukan empat kantong jenazah.



“Korban yang sudah dievakuasi sampai hari kesembilan ini sebanyak 74 body pack. Hari ini, tim menemukan 4 body pack,” kata Ade Dian.

Jika mengacu pada laporan awal bahwa total korban tertimbun longsor sebanyak 80 orang, maka sisa korban yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan sebanyak 6 orang.

Tim DVI Polda Jawa Barat mencatat per 1 Februari 2026 pukul 16.00 WIB, sebanyak 57 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Sisanya masih dalam proses identifikasi.

Berikut adalah rekapitulasi data korban terdampak longsor Cisarua berdasarkan data yang dihimpun hingga 2 Februari 2026:

Penyelamatan

Di tengah duka yang mendalam, solidaritas mengalir deras. Posko Pengungsian di Balai Desa Pasirlangu menjadi pusat aktivitas. BNPB mencatat pada hari-hari awal pascabencana, sebanyak 685 jiwa mengungsi di Kantor Desa Pasirlangu. Dari jumlah tersebut, 353 jiwa menempati gedung olahraga desa, sedangkan 332 jiwa lainnya berada di aula desa.

Seiring berjalannya waktu, jumlah pengungsi mulai berkurang. Per 2 Februari 2026, sebanyak 517 jiwa pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Adapun pengungsi yang masih bertahan di lokasi pengungsian berjumlah 159 jiwa dari

49 kepala keluarga (KK).

Untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, berbagai bantuan logistik terus mengalir. BNPB telah menyalurkan bantuan berupa:

- 200 paket sembako
- 200 paket makanan siap saji
- 200 matras
- 50 paket alat kebersihan
- 2 unit toilet portable
- 1 unit genset
- 1 unit pompa alkon
- 100 selimut

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga turun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 24 truk berisi bahan pokok. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan santunan kepada korban terdampak dan menurunkan pegawai BBPMP Provinsi Jawa Barat untuk terlibat langsung dalam upaya pencarian dan penyelamatan korban.

Gugurnya 23 Kusuma Bangsa: Jejak Pengabdian Prajurit Marinir di Tengah Bencana Cisarua

Di tengah duka mendalam yang menyelimuti Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, ada kisah heroik dan pilu dari 23 prajurit terbaik Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL). Mereka bukan sekadar angka dalam statistik korban bencana. Mereka adalah putra-putra bangsa yang sedang mengabdikan, menjalani latihan terakhir sebelum diterjunkan menjaga kedaulatan negara di perbatasan RI-Papua Nugini. Takdir berkata lain. Alam berbicara dengan keras, dan 23 prajurit ini gugur sebagai kusuma bangsa.

Kronologi lengkap, proses evakuasi yang dramatis, serta penghormatan terakhir negara kepada para pahlawan

Data Korban Longsor Cisarua (Update 2 Februari 2026)

Kategori	Jumlah
Korban Meninggal Dunia (ditemukan)	74 Jiwa
Korban Hilang (dalam pencarian)	6 Jiwa
Korban Teridentifikasi	57 Jiwa
Pengungsi Awal	685 Jiwa
Pengungsi yang Masih Bertahan	159 Jiwa (49 KK)

Sumber: BNPB, Basarnas, DVI Polda Jabar

ini menjadi bagian tak terpisahkan dari tragedi kemanusiaan di Cisarua. Berikut adalah liputan lengkapnya.

Latihan Pra-Tugas yang Berakhir Tragedi

Sebanyak 23 prajurit Korps Marinir TNI AL sedang menggelar Latihan Pratusas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–Papua Nugini di wilayah Cisarua. Latihan ini merupakan tahap akhir persiapan sebelum mereka diterjunkan ke medan tugas yang sesungguhnya.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengonfirmasi bahwa lokasi latihan yang berada di kawasan perbukitan Cisarua diguyur hujan lebat selama dua hari berturut-turut.

Kondisi ini membuat tanah menjadi labil dan akhirnya longsor pada Sabtu, 24 Januari 2026, dini hari sekitar pukul 03.00 WIB.

“Saat para personel sedang melakukan latihan, lokasi tersebut



Laksamana TNI Muhammad Ali

kebetulan tengah diguyur hujan selama dua hari. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana,” ujar KSAL Ali.

Sesaat setelah longsor, komunikasi seluruh personel dengan pos komando utama terputus seketika. Tim SAR gabungan pun segera dikerahkan, namun medan berat dan material

longsor yang masih labil menjadi tantangan besar.

Operasi Pencarian yang Menegangkan

Operasi pencarian terhadap 23 prajurit Marinir berlangsung intensif dan penuh dengan dinamika. Berikut adalah linimasa evakuasi berdasarkan data dari berbagai sumber resmi:

26 Januari 2026 (H+2): KSAL Muhammad Ali mengonfirmasi bahwa dari 23 prajurit yang tertimbun, baru 4 personel ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sisanya, 19 prajurit, masih dalam proses pencarian.

30 Januari 2026 (H+6): Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 7 jenazah prajurit. Komandan Korps Marinir (Dankormar) Letjen TNI (Mar) Endi Supardi memimpin upacara penganugerahan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) setingkat lebih tinggi kepada 23 prajurit yang gugur sebagai bentuk penghormatan Negara.

Pada tahap ini, tujuh prajurit yang telah teridentifikasi adalah:

- Serda Marinir Sidiq Hariyanto
- Praka Marinir Muhammad Kori
- Praka Marinir Andre Nicky Olga Suwita
- Praka Marinir Ari Kurniawan
- Pratu Marinir Febry Bramantio
- Serda Marinir Rein Pasaik
- Koptu Marinir Edi Haryono

2 Februari 2026 (H+9): Tim SAR menemukan tiga jenazah tambahan, sehingga total korban yang berhasil dievakuasi menjadi 13 prajurit. Masih ada 10 prajurit lainnya yang dinyatakan hilang.

3 Februari 2026 (H+10): Kepala Staf Korps Marinir (Kas Kormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) Suherlan memimpin upacara pelepasan tiga jenazah prajurit yang ditemukan sehari sebelumnya. Ketiganya adalah:



Berikut adalah rangkuman bentuk perhatian dan bantuan yang diberikan negara:

Tanggal	Pihak Pemberi	Bentuk Penghormatan/ Bantuan	Keterangan
30 Jan 2026	TNI AL	Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB)	Diberikan kepada 23 prajurit yang gugur .
10 Feb 2026	Kementerian Sosial	Santunan Rp15 juta per ahli waris	Total Rp345 juta untuk 23 ahli waris. Juga akan ada program pemberdayaan lanjutan .
18 Feb 2026	Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak	Rumah (12 keluarga) & Santunan (11 lajang)	Bantuan dari keluarga besar TNI AD. Anak prajurit dijamin pendidikannya .
19 Feb 2026	Menhan Sjafrie Sjamsoeddin	Dukungan moril & bantuan (tak disebutkan)	Menhan menemui keluarga korban di Mako Kormar mewakili Presiden

- Almarhum Praka Mar (Anm) Dicky Yogha Priambada (diberangkatkan ke Surabaya)
 - Almarhum Kopda Mar (Anm) Anton Karisma (diberangkatkan ke Lampung)
 - Almarhum Pratu Mar (Anm) Burton C. Silitonga (diberangkatkan ke Medan)
- 18 Februari 2026: Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI

Maruli Simanjuntak menyerahkan bantuan berupa rumah dan santunan kepada 23 ahli waris prajurit di Markas Komando Korps Marinir, Jakarta Pusat. Pada titik ini, dipastikan bahwa seluruh 23 prajurit telah berhasil ditemukan. Sebanyak 19 prajurit telah dimakamkan, sementara 4 lainnya masih dalam proses identifikasi.

Penghormatan Terakhir dan Santunan Negara

Gugurnya 23 prajurit Marinir ini menyisakan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga besar TNI, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Negara pun hadir memberikan penghormatan terakhir serta santunan kepada para ahli waris.

Selain bantuan materi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat bertemu dengan keluarga korban pada 18 Februari 2026 menegaskan bahwa pengorbanan para prajurit merupakan bentuk bakti tertinggi kepada Negara. Presiden RI Prabowo Subianto juga

turut menyampaikan duka cita dan salam hormat melalui Menhan.

Investigasi Penyebab Bencana

Bencana ini memantik pertanyaan besar: mengapa Cisarua begitu rentan? Para ahli dari PVMBG memberikan penjelasan ilmiah yang mengungkap tabir di balik tragedi ini.

Plh Kepala PVMBG Badan Geologi, Edi Slameto, mengungkapkan temuan penting. Timnya menemukan adanya fenomena penyimpangan arah aliran material longsor ke selatan. Fenomena ini ternyata tidak terjadi secara kebetulan, melainkan mengikuti jejak alam yang sudah terbentuk sejak lama.

“Ada satu fenomena yang menurut tim kami ada peristiwa penyimpangan atau limpasan ke arah selatan,” kata Edi.

Hasil penelusuran lapangan yang dikombinasikan dengan data serta keterangan warga lama setempat menguatkan temuan tersebut. Jalur yang dilalui material longsor ternyata merupakan alur air di masa lalu, meski kini tidak lagi terlihat jelas sebagai sungai aktif.

“Ternyata dulunya menurut data dan pengakuan penduduk yang sudah lama tinggal di situ memang, jalur



Edi Slameto



Teten Ali Mulku



limpasan ini adalah dulunya adalah sungai, mungkin sungai kecil atau parit atau apa,” ujarnya.

Menurut Edi, saat volume material longsor melampaui daya tampung lereng, alam secara alami akan memilih jalur paling mudah dilalui. Dalam konteks di Desa Pasirlangu, jalur tersebut adalah bekas aliran sungai yang kembali “diaktifkan” oleh limpasan material longsor.

“Jadi ketika terjadi over flow material, maka ya pasti akan memilih jalurnya. Alam ini punya logikanya sendiri,” ungkap Edi.

Ia menjelaskan, material debris dari longsor bergerak ke arah selatan sebelum berkembang menjadi aliran yang mengikuti alur sungai dan kemudian berbelok ke arah barat.

Kondisi itu menyebabkan terjadinya limpasan dan penyimpangan aliran bahan rombakan yang memperluas dampak bencana ke kawasan permukiman.

Kepala BPBD Jabar, Teten Ali Mulku Engkun, menambahkan bahwa kondisi tanah di wilayah Bandung Barat memang sangat gembur.

“Di atasnya, tegakan-tegakannya itu rata-rata sudah enggak ada, pohon-pohon tegakannya itu sudah sedikit sehingga ini menimbulkan kerawanan-kerawanan terhadap bencana banjir maupun longsor,” jelasnya.

Mitigasi dan Peringatan Dini

Menyadari tingginya potensi bencana susulan, PVMBG langsung mengeluarkan rekomendasi dan

imbauan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Edi Slameto menegaskan bahwa potensi gerakan tanah susulan di Desa Pasirlangu masih tergolong tinggi. Ancaman itu terutama dipicu curah hujan yang hingga saat itu masih berlangsung dengan intensitas cukup tinggi.

“Bukan hanya Pasirlangu, lembah-lembah lain dengan karakteristik morfologi dan geologi serupa, khususnya di kaki Gunung Burangrang, memiliki potensi kejadian yang sama,” ujar Edi.

Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, wilayah Pasirlangu masuk dalam kategori Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah. Longsor berpotensi terjadi apabila

curah hujan berada di atas kondisi normal atau terdapat gangguan pada kestabilan lereng, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia.

Sebagai langkah mitigasi, PVMBG merekomendasikan:

- Relokasi permukiman terdampak ke lokasi yang lebih aman
- Normalisasi sungai
- Pembangunan bangunan pengendali seperti sabo dam untuk menekan erosi dan mengurangi limpasan material longsor
- Peningkatan pemantauan debit sungai oleh pemerintah daerah
- Pemetaan jalur aliran debris
- Penguatan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi bahaya gerakan tanah

“Masyarakat diimbau menghindari aktivitas di sekitar alur sungai yang berhulu di lereng atas, serta segera menjauh apabila debit sungai meningkat atau air berubah menjadi keruh,” tegas Edi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga angkat bicara. Ia meminta agar di lokasi rawan bencana ditanami pohon-pohon yang memiliki akar kuat. Menurutnya, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi daerah lain di Indonesia, khususnya dalam memperkuat tata ruang dan pemetaan wilayah rawan bencana.

“Setiap Bupati, Wali Kota, Gubernur harus kita petakan secara nasional. Untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini, hujan lebat, hujan deras,” katanya.

Harapan di Tengah Puing

Memasuki pertengahan Februari 2026, fokus penanganan bergeser dari tanggap darurat menuju pemulihan



Tito Karnavian

atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Isu relokasi warga menjadi agenda utama.

Di tengah proses pemulihan, sinyal-sinyal kemanusiaan mulai bermunculan. Institut Teknologi Bandung (ITB), melalui Program Desa Bangkit Cisarua, hadir memberikan respons kemanusiaan terpadu.

Pada Kamis, 19 Februari 2026, bertepatan dengan hari pertama Ramadan 1447 H, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara secara simbolis menyerahkan satu unit Hunian Sementara (Huntara) di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu.

Program ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat dan Layanan Kepakaran (DPMK) ITB, Rumah Amal Salman, Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, serta Ikatan Alumni ITB. Program ini dirancang sebagai respons kemanusiaan terpadu bagi masyarakat terdampak longsor, mencakup fase tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi hingga rekonstruksi.

“Alhamdulillah pada hari pertama Ramadan, menyaksikan bagaimana ITB hadir pada kondisi-kondisi bencana. Sejak November lalu di Sumatra pada hari kedua bencana ITB mengirimkan tim dan sampai

hari ini masih terus di tiga provinsi menjalankan misinya,” ucap Rektor ITB, Tatacipta Dirgantara.

Menurut Tatacipta, pola kerja kolaboratif antara dosen, mahasiswa, alumni, dan masyarakat menjadi model pengabdian yang harus terus dijaga. Mudah-mudahan model-model kerja seperti ini dapat menjadi contoh yang baik bagi semua.

Huntara seluas 6 x 6 meter ini dirancang khusus oleh tim arsitek ITB. Ketua Tim Arsitek, Andry Widjowijatnoko, menjelaskan bahwa desainnya mengutamakan kecepatan pembangunan.

“Sistem struktur huntara ini bisa dibuat dalam modul-modul, kemudian disusun dan dibangun sehingga cepat sekali pengerjaannya. Huntara ini didirikan dalam dua hari,” paparnya.

Struktur bangunan dikembangkan dari sistem reciprocal frame yang disederhanakan menjadi modul-modul rangka sehingga dapat dirakit dengan cepat. Bangunan ini juga dirancang fleksibel. Panjangnya dapat diperluas dengan menambah modul rangka sesuai kebutuhan.

Selain itu, material yang digunakan memungkinkan untuk memanfaatkan produk lokal, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Huntara tersebut dirancang untuk menampung dua keluarga dengan total penghuni tujuh orang.

Program ITB ini juga menyalurkan 110 paket sembako, 35 paket obat-obatan, serta 40 bantuan kesehatan, ambulans, dan layanan psikososial bagi lebih dari 250 warga.

Direktur Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran ITB, Zulfiadi Zulhan, menyampaikan bahwa sejak hari kedua bencana di Cisarua, ITB telah hadir dan membentuk empat tim, yaitu tim manajemen risiko kebencanaan,



kesehatan, permukiman, serta air dan sanitasi. Ia berharap hunian sementara yang diserahkan dapat menjadi awal pemulihan bagi warga terdampak.

“Mudah-mudahan pada hari ini, hari pertama bulan Ramadan, hunian sementara ini bisa bermanfaat bagi ibu dan bapak yang terkena dampak dari bencana longsor ini. Mudah-mudahan ke depan kehidupannya membaik. Selanjutnya kami juga akan membangun lagi sejumlah hunian di beberapa titik di Pasir Kuning,” ungkapnya.

Ayi Kurniawan (43), warga Kampung Pasir Kuning yang rumahnya hanyut terbawa longsor, mengaku sangat terbantu. “Dengan adanya fasilitas ini sangat membantu saya yang terkena musibah, yang rumahnya sudah tidak ada. Bagus sekali dukungannya dan senang ada dari ITB yang datang ke Kampung Pasir Kuning untuk

membantu,” tuturnya haru.

Pelajaran dari 1.500 Detik Bencana Cisarua

Tragedi Cisarua adalah pengingat pahit bahwa hidup di tanah yang subur juga berarti hidup berdampingan dengan risiko. Jarak 1.500 detik antara hidup dan mati itu mengajarkan bahwa mitigasi bencana bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mutlak.

Isyarat alam, perubahan warna air, rontanya tanah, bahkan keberadaan bekas aliran sungai yang terkubur zaman, harus dibaca dengan saksama, tidak hanya oleh para ahli, tetapi juga oleh warga dan pemangku kebijakan. Alam memiliki logikanya sendiri, dan kita harus belajar memahaminya.

Kini, di bulan Ramadan yang penuh berkah, para penyintas di Cisarua mulai merangkak bangkit. Hunian sederhana telah berdiri, dapur umum

masih berasap, dan luka perlahan mengering. Namun, pertanyaan tentang tata ruang yang aman dan keberlanjutan hidup di lereng gunung masih menggantung.

Sebanyak 74 jiwa telah berpulang, 6 lainnya masih dalam pencarian, dan 159 jiwa masih bertahan di pengungsian. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa dan kisah yang hilang dalam 1.500 detik yang mencekam.

Semoga dari puing-puing Pasirlangu, kita semua memetik satu pelajaran berharga: bahwa pembangunan tak boleh buta terhadap bisikan alam, dan setiap jiwa terlalu berharga untuk dikorbankan demi kelalaian. Sebagaimana pesan Kepala Desa Pasirlangu, kewaspadaan kolektif adalah kunci agar tragedi serupa tak terulang lagi.

NAFSU BESAR AMERIKA SERIKAT MENGUASAI MINYAK DUNIA: VENEZUELA, IRAN, DAN GEOPOLITIK ENERGI

Minyak bumi adalah darah hitam yang mengalirkan energi ke seluruh tubuh peradaban modern. Ia menggerakkan mesin, menghidupkan industri, dan menopang kekuatan militer. Sejak awal abad ke-20, minyak bukan sekadar komoditas, melainkan instrumen kekuasaan. Amerika Serikat, sebagai negara dengan ambisi global, menjadikan minyak sebagai pusat strategi politik luar negerinya. Nafsu besar Washington untuk menguasai jalur pasokan minyak dunia telah melahirkan intrik, kudeta, embargo, hingga perang terbuka. Dua titik panas yang paling mencerminkan perebutan ini adalah Venezuela dan Iran.

Sejarah panjang keterlibatan Amerika dalam minyak dunia dimulai dari pertemuan bersejarah antara Presiden Franklin D. Roosevelt dan Raja Abdulaziz dari Arab Saudi pada 1945. Roosevelt berkata, “Yang Mulia, Amerika Serikat menganggap pertahanan Arab Saudi sebagai kepentingan vital bagi dirinya sendiri.” Kalimat itu menandai lahirnya hubungan simbiotik antara Washington dan Riyadh: keamanan ditukar dengan minyak. Sejak saat itu, minyak menjadi bagian dari doktrin politik luar negeri Amerika. Henry Kissinger, arsitek kebijakan luar negeri AS, pernah menegaskan, “Kuasai



Presiden Franklin D. Roosevelt dan Raja Abdulaziz

minyak maka engkau menguasai bangsa; kuasai pangan maka engkau menguasai manusia.” Kalimat itu menjadi mantra yang terus bergema dalam strategi geopolitik Washington.

Venezuela adalah contoh paling nyata bagaimana minyak bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Negeri ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, melampaui Arab Saudi. Namun, kekayaan itu justru menjerumuskan Venezuela ke dalam krisis politik dan ekonomi. Penangkapan presiden Venezuela dalam konteks konflik internal dan tekanan eksternal

menjadi simbol bagaimana minyak bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Washington sejak lama menentang kebijakan nasionalisasi minyak yang dilakukan Hugo Chávez dan dilanjutkan Nicolás Maduro. Embargo ekonomi, sanksi finansial, dan dukungan terhadap oposisi adalah bagian dari strategi melemahkan Caracas. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS pernah berkata, “Maduro harus pergi. Venezuela berhak atas demokrasi, bukan kediktatoran yang dibiayai uang minyak.” Kalimat itu mencerminkan tekad Washington untuk mengganti



Henry Kissinger

rezim yang dianggap menghalangi akses terhadap ladang minyak raksasa.

Disisi lain, Nicolás Maduro menuduh Amerika melakukan intervensi brutal. Dalam pidatonya ia berkata, “Mereka menginginkan minyak kita, mereka menginginkan kekayaan kita, tetapi mereka tidak akan pernah mengambil martabat kita.” Kalimat itu menggambarkan perlawanan simbolis terhadap hegemoni Amerika. Krisis Venezuela bukan hanya soal politik, tetapi juga soal siapa yang berhak menguasai cadangan minyak terbesar di dunia. Penangkapan presiden, konflik internal, dan tekanan eksternal adalah bagian dari drama besar perebutan energi.

Iran adalah titik panas lain dalam peta energi dunia. Negara ini memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar, serta posisi strategis di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak global. Polemik antara Washington dan Teheran bukan hanya soal nuklir, tetapi juga soal siapa yang mengendalikan energi. Sejak Revolusi Islam 1979, hubungan kedua negara memburuk. Embargo minyak, sanksi ekonomi, dan ancaman militer menjadi senjata Washington. Presiden George W. Bush pernah memasukkan



Nicolás Maduro.

Iran ke dalam “poros kejahatan”, dengan alasan mendukung terorisme dan mengembangkan senjata nuklir. Namun di balik retorika itu, ada kepentingan energi yang tak bisa diabaikan.

Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menegaskan, “Amerika ingin mendominasi minyak kita dan kemerdekaan kita. Kami akan melawan dengan seluruh kekuatan kami.” Kalimat itu menegaskan bahwa konflik dengan AS bukan sekadar soal nuklir,

melainkan soal kedaulatan energi. Iran melihat minyak sebagai simbol kemandirian, sementara Washington melihatnya sebagai instrumen dominasi. Polemik ini menciptakan ketegangan yang terus berulang, dari embargo hingga ancaman perang.

Amerika Serikat menggunakan minyak sebagai senjata politik. Embargo terhadap Venezuela dan Iran bukan hanya untuk melemahkan ekonomi kedua negara, tetapi juga untuk mengatur harga minyak dunia.

Dengan mengendalikan pasokan, Washington bisa menekan lawan sekaligus menguntungkan sekutu. Di sisi lain, negara-negara yang menjadi target embargo berusaha mencari jalan keluar. Venezuela menjalin kerja sama dengan Rusia dan Tiongkok, sementara Iran memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia. Pertarungan ini menciptakan blok-blok baru dalam geopolitik energi.

Dampak ambisi Amerika menguasai minyak dunia terasa luas. Harga minyak yang fluktuatif memengaruhi ekonomi global. Negara-negara berkembang yang bergantung pada impor energi menjadi korban. Krisis di Venezuela dan Iran juga memicu instabilitas politik regional. Seorang analis energi dari London School of Economics pernah berkata, “Minyak bukan lagi sekadar komoditas; ia adalah senjata, mata uang, dan alat dominasi.” Kalimat itu merangkum bagaimana minyak telah berubah menjadi instrumen kekuasaan global.

Namun, untuk memahami sepenuhnya nafsu besar Amerika, kita harus menengok sejarah panjang intervensi Washington di Timur Tengah. Perang Teluk 1991, invasi Irak 2003, hingga keterlibatan di Libya, semuanya memiliki benang merah yang sama: minyak. Invasi Irak misalnya, dibungkus dengan alasan senjata pemusnah massal, tetapi banyak pengamat menilai bahwa tujuan utamanya adalah menguasai ladang minyak Irak dan memastikan jalur pasokan tetap aman bagi kepentingan Barat. Seorang jenderal Amerika pernah berkata, “Minyak adalah alasan kita di sini, meski kita jarang mengatakannya secara terbuka.” Kalimat itu memperlihatkan bagaimana energi menjadi motif tersembunyi di balik operasi militer.



Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei

Peran perusahaan minyak besar juga tidak bisa diabaikan. ExxonMobil, Chevron, dan perusahaan-perusahaan raksasa lainnya memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan energi Amerika. Hubungan erat antara korporasi dan pemerintah menciptakan lingkaran kekuasaan yang sulit ditembus. Lobi energi di Washington adalah salah satu yang paling kuat, memastikan bahwa

kepentingan minyak selalu berada di pusat keputusan politik. Seorang eksekutif perusahaan minyak pernah berkata, “Tanpa minyak, Amerika bukanlah Amerika. Energi adalah fondasi kekuatan kita.” Kalimat itu menunjukkan betapa dalamnya keterikatan antara minyak dan identitas nasional Amerika.

Dampak sosial dari perebutan minyak juga sangat nyata. Di



Venezuela, krisis ekonomi yang dipicu oleh embargo membuat rakyat menderita. Inflasi meroket, kebutuhan pokok langka, dan jutaan orang terpaksa mengungsi. Di Iran, sanksi ekonomi membuat masyarakat kesulitan mendapatkan obat-obatan dan barang-barang penting. Minyak yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi kutukan. Seorang warga Caracas berkata, “Kami punya minyak, tetapi kami tidak punya makanan.” Kalimat itu menggambarkan ironi yang menyakitkan.

Masa depan energi dunia juga menjadi bagian dari pertarungan ini. Amerika Serikat mulai berbicara tentang transisi ke energi terbarukan, tetapi kenyataannya minyak tetap

menjadi pusat perhatian. Selama dunia masih bergantung pada minyak, Washington akan terus berusaha menguasai jalurnya. Namun, munculnya kekuatan baru seperti Tiongkok dan India menambah kompleksitas. Kedua negara itu membutuhkan energi dalam jumlah besar, dan mereka tidak segan menjalin hubungan dengan Venezuela maupun Iran. Pertarungan energi global semakin multipolar, dan dominasi Amerika mulai ditantang.

Pertanyaannya, apakah dunia akan terus terjebak dalam kutukan minyak? Seorang akademisi dari Universitas Harvard berkata, “Selama minyak tetap menjadi sumber energi utama, konflik tidak akan pernah berhenti. Minyak adalah darah sekaligus racun

bagi peradaban modern.” Kalimat itu menutup refleksi panjang tentang bagaimana energi telah menjadi panggung perebutan kekuasaan.

Nafsu besar Amerika Serikat untuk menguasai minyak dunia adalah kisah panjang yang penuh intrik, konflik, dan tragedi. Dari penangkapan presiden Venezuela hingga polemik dengan Iran, semuanya menunjukkan bahwa minyak bukan sekadar energi, melainkan simbol kekuasaan. Pertarungan ini belum berakhir, dan dunia masih akan menyaksikan bagaimana darah hitam bumi terus menjadi sumber perebutan. Minyak adalah panggung di mana politik, ekonomi, dan kekuasaan bertemu, dan Amerika Serikat tetap menjadi aktor utama yang tidak pernah puas.



INDONESIA GABUNG BOARD OF PEACE:

STRATEGI DIPLOMASI GLOBAL ATAU LANGKAH KONTROVERSIAL?

Davos di bulan Januari selalu dingin. Tapi, Kamis malam itu, suhu politik di Pusat Konvensi Swiss terasa jauh lebih panas dari termometer manapun.

Di atas panggung megah sela World Economic Forum, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berdiri dengan sikap penuh kemenangan. Di sampingnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, bersama dua puluh lima pemimpin dunia lainnya, membubuhkan tanda tangan di atas naskah yang oleh para diplomat

tua disebut sebagai “piagam paling kontroversial sejak Perang Irak”.

Board of Peace, sebuah entitas yang sembilan bulan sebelumnya hanya berupa gagasan di atas kertas kerja Gedung Putih, kini resmi lahir. Indonesia menjadi salah satu founding member-nya.

Sejak malam itu, jagat hubungan internasional Tanah Air tak lagi sunyi. Media sosial bergemuruh. Analisis berbantahan di layar kaca. Organisasi masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan demi pernyataan. Di Istana,

Presiden menerima gelombang demi gelombang tamu: pimpinan ormas Islam, mantan menteri luar negeri, akademisi, hingga anggota DPR.

Ini bukan sekadar cerita tentang Indonesia bergabung dalam sebuah forum baru. Ini adalah cerita tentang prinsip diplomasi yang diuji di tengah pusaran geopolitik yang kian fragmentatif. Cerita tentang politik bebas aktif yang sejak 1948 menjadi kompas Merdeka, kini harus berlayar di samudera yang petanya sedang digambar ulang oleh satu



r. Irawati Handayani

kekuatan besar yang lelah dengan multilateralisme.

Board Of Peace: Antara Gaza, Resolusi PBB, dan Ambisi Global Donald Trump

Untuk memahami kontroversi, kita harus kembali ke September 2025.

Saat itu, medan pertempuran Gaza memasuki babak baru. Gencatan senjata yang dinanti-nantikan akhirnya mulai dirundingkan. Di tengah proses yang berliku itu, Presiden Donald Trump mengeluarkan gagasan yang oleh sebagian kalangan disebut “out of the box,” sementara yang lain menyebutnya “pengambilalihan wewenang”.

Trump mengusulkan pembentukan sebuah badan internasional yang secara khusus bertugas mengawasi demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza pascaperang.

Namun, seperti bola salju yang menggelinding dari puncak gunung, gagasan ini terus membesar. Pada November 2025, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 yang memberikan mandat dua tahun untuk “administrasi transisi” Gaza.

Dalam resolusi ini, Board of Peace disebut sebagai instrumen yang akan menjalankan mandat tersebut, dengan

catatan penting, semua tindakan BoP harus konsisten dengan hukum internasional dan Piagam PBB.

Titik kritis terjadi pada 22 Januari 2026.

Ketika Trump berdiri di Davos untuk meresmikan Board of Peace, ia membawakan skema yang berbeda secara fundamental dari mandat yang diberikan Resolusi 2803. Mandatnya tidak lagi terbatas pada Gaza. Piagam 11 halaman itu memperluas cakupan BoP menjadi organisasi yang bertugas mempromosikan stabilitas dan mengamankan perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam konflik.

Seorang akademisi hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Dr. Irawati Handayani, menyoroti problem normatif ini dengan tajam.

“BoP dibentuk sebagai Transitional Administration melalui Resolusi DK PBB 2803. Di situ jelas pasal-pasal yang menekankan bahwa semua tindakan BoP harus konsisten dengan hukum internasional,” ujarnya.

“Namun Piagam BoP diinisiasi secara mandiri oleh Presiden Trump dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional,” tambahnya.

Struktur organisasi BoP semakin mempertegas jaraknya dari praktik multilateralisme konvensional.

Pertama, kepemimpinan. Trump menjabat sebagai Chairman (Ketua Dewan) secara tidak terbatas, atau dengan kata lain, seumur hidup. Jabatan ini dilengkapi dengan veto unilateral dan bahkan kewenangan untuk membubarkan organisasi.

Tidak ada mekanisme rotasi, tidak ada prinsip kesetaraan kedaulatan yang menjadi fondasi sistem PBB.



Agung Nurwijoyo

Kedua, dewan eksekutif. Di bawah Trump, terdapat Executive Board yang diisi oleh tokoh-tokoh seperti Jared Kushner (menantu Trump sekaligus arsitek kebijakan Timur Tengah), Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Yang mencolok, tidak satu pun perwakilan Palestina duduk di meja pengambilan keputusan untuk rekonstruksi Gaza.

Ketiga, model keanggotaan. Board of Peace menawarkan dua status. *Pertama*, anggota reguler dengan masa jabatan tiga tahun. *Kedua*, anggota permanen, dan ini hanya tersedia bagi negara yang bersedia membayar iuran sebesar US\$1 miliar, setara Rp16,82 triliun.

Seorang pengamat Hubungan Internasional FISIP UI, Agung Nurwijoyo, menggambarkan situasi ini sebagai “paradoks institusional”. Menurutnya, meski dewan perdamaian ini masih dikaitkan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, keberadaannya bukan mandat resmi PBB.

“Dominasi Amerika, baik dalam kepemimpinan maupun pendanaan, berpotensi menjadikan lembaga ini

sebagai kompetitor PBB,” tuturnya.

Trump sendiri tidak pernah menyembunyikan ambisi itu. Dalam pidatonya di Davos, ia secara eksplisit menyatakan bahwa Board of Peace kemungkinan akan menggantikan PBB.

Presiden Prabowo Mengambil Pena Untuk Perwakilan Indonesia

Di tengah ruang seremonial yang dipenuhi bendera, Presiden Prabowo Subianto mengambil pena.

Pukul 16.00 waktu setempat, Kamis 22 Januari 2026, penandatanganan Piagam Board of Peace berlangsung. Presiden Indonesia menjadi salah satu dari 26 pemimpin negara yang namanya tercantum sebagai anggota pendiri.

Dalam keterangan pers yang dirilis Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres, Presiden Prabowo menyebut langkah ini sebagai kesempatan bersejarah dan peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Penjelasan resmi pemerintah merinci tiga alasan utama partisipasi Indonesia.

Pertama, komitmen konstitusional. Pemerintah merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan partisipasi aktif dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kedua, solusi dua negara. Indonesia ingin memastikan bahwa proses transisi Gaza tidak menyimpang dari parameter yang telah disepakati secara internasional, yakni two-state solution dengan Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Ketiga, diplomasi kemanusiaan. Pemerintah menekankan bahwa kehadiran Indonesia diperlukan agar bantuan kemanusiaan dapat mengalir dan rakyat Palestina memiliki kesempatan membangun masa depan.



Andina Thresia Narang

Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, yang turut hadir dalam dialog tertutup di Istana beberapa hari setelahnya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo membuka ruang dialog yang sangat luas.

“Presiden menegaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan tetap berpijak pada Politik Bebas Aktif,” kata Andina.

Soal iuran US\$1 miliar yang menjadi sorotan tajam publik, Andina memberikan klarifikasi yang tidak banyak diliput media arus utama.

“Dana tersebut tidak bersifat wajib. Negara anggota dapat memilih untuk berkontribusi atau tidak. Jika berkontribusi, negara tersebut akan menjadi anggota tetap; jika tidak, keanggotaan berlaku selama tiga tahun. Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran,” tegasnya.

Pernyataan ini penting karena membantah asumsi umum bahwa Indonesia telah mengeluarkan Rp16,82 triliun dari APBN. Namun, status “belum membayar” ini justru membuka pertanyaan baru: apakah Indonesia akan membayar di masa depan, dan jika ya, bagaimana mekanisme persetujuan DPR?

Siapa Yang Bergabung, Siapa Yang Menolak: Peta Kekuatan Baru

Daftar 26 negara anggota pendiri Board of Peace yang diumumkan pada 28 Januari 2026 memberikan gambaran utuh tentang peta politik di balik organisasi ini.

Anggota Pendiri Board of Peace: Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Mesir, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vietnam.

Daftar ini berbicara banyak. Tidak ada satu pun negara Eropa Barat yang masuk. Prancis, Jerman, Inggris, negara-negara yang selama ini menjadi tulang punggung sistem aliansi transatlantic malah absen.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot bahkan secara eksplisit menyatakan penolakan.

“Ya untuk implementasi rencana perdamaian, tapi tidak untuk menciptakan organisasi yang akan menggantikan PBB,” katanya.

China, yang sering disebut Indonesia sebagai mitra strategis Global South, juga menolak. Juru bicara Kedutaan China di AS, Yu Jing, menegaskan komitmen Beijing pada “multilateralisme sejati dan sistem internasional berpusat pada PBB.

Kanada sempat diundang, tetapi kemudian dicabut. Trump membatalkan undangan karena Perdana Menteri Mark Carney dianggap memperingatkan terhadap pemaksaan ekonomi oleh kekuatan besar dalam pidatonya di Davos.

Rusia tidak masuk, meskipun Presiden Vladimir Putin menyatakan kesediaan mengalokasikan US\$1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan



Jean-Noël Barrot

di AS untuk anggaran BoP.

Ukraina mempertanyakan bagaimana mereka bisa berpartisipasi bersama Rusia dan Belarus yang justru menerima undangan dan bergabung.

Dari Asia Tenggara, hanya dua negara yang masuk, yaitu Indonesia dan Vietnam.

Peta ini menunjukkan realitas yang tak terhindarkan. Board of Peace, terlepas dari retorika kemanusiaan yang menyelimutinya, adalah proyek geopolitik yang secara implisit mendefinisikan ulang garis kawan-lawan dalam sistem internasional. Ini bukan forum universal, ini adalah klub yang anggotanya dipilih secara selektif oleh ketua seumur hidup.

Diplomasi Bebas Aktif Di Ujung Pedang, Antara Prinsip Dan Pragmatisme

“Bebas Aktif”, dua kata yang sejak 2 September 1948, ketika Haji Agus Salim berpidato di hadapan Sidang Umum PBB, menjadi mantra diplomasi Indonesia. Bebas berarti tidak terikat pada blok manapun. Aktif berarti ikut serta menyelesaikan konflik, bukan sekadar penonton.

Di era Perang Dingin, prinsip ini memungkinkan Indonesia menjadi jembatan antara non-blok dan

Barat. Di era reformasi, prinsip ini diterjemahkan menjadi “seribu kawan, nol musuh”.

Pertanyaan yang kini mengemuka, apakah bergabung dengan Board of Peace dimana forum yang dipimpin seorang ketua seumur hidup dari AS, dengan anggota yang diseleksi secara eksklusif oleh Gedung Putih masih dapat disebut sebagai politik bebas aktif? Pemerintah menjawab: Ya.

“Presiden menegaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan tetap berpijak pada Politik Bebas Aktif dan mengutamakan capaian konkret bagi bangsa Indonesia,” demikian pernyataan Komisi I DPR setelah pertemuan dengan Presiden.

Argumentasi pemerintah, kehadiran di semua forum adalah esensi dari politik “aktif”. Jika Indonesia tidak hadir, maka Indonesia hanya akan menjadi penonton yang membiarkan orang lain menentukan nasib Palestina.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, yang menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden, menyuarakan perspektif serupa.

“Di tengah ketidakmenentuan ini, kalau kita sungguh ingin berbuat sesuatu untuk membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka kita harus hadir di semua arena, di semua platform yang tersedia,” kata Gus Yahya.

Namun, para kritikus melihatnya secara berbeda. Probo Darono Yakti, akademisi hubungan internasional yang menulis di *Harian Disway* pada November 2025 (dua bulan sebelum penandatanganan Piagam BoP) telah mengingatkan tentang fenomena yang ia sebut “diplomasi tanpa kompas”.

“Politik luar negeri kita terlihat aktif di banyak panggung, tetapi belum

menampakkan satu garis pandu yang jelas. Pertanyaannya kini bukan apakah Indonesia masih memegang prinsip bebas-aktif, melainkan apakah prinsip itu masih memiliki kompas arah yang jelas,” katanya.

Kritik dari Heinrich Böll Foundation, yang dikutip dalam analisis Kompas, bahkan lebih tajam, kebijakan luar negeri Prabowo seperti “Gado-Gado”, tidak memiliki arah yang jelas meski penuh deklarasi tentang kepemimpinan *Global South*.

Perdebatan ini bukan sekadar perbedaan tafsir. Ini adalah perdebatan tentang identitas. Apakah “bebas aktif” berarti bebas untuk aktif di forum manapun, dengan konsekuensi apapun? Ataukah “bebas” mengandung makna normatif: bebas dari tekanan dan dominasi kekuatan besar?

PBNU Dan Gusdurian Dalam Dua Kutub

Tidak ada yang lebih menggambarkan polarisasi opini tentang Board of Peace selain perbedaan sikap antara dua organisasi yang sama-sama berakar pada tradisi Nahdlatul Ulama.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di bawah kepemimpinan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, menyatakan dukungan penuh terhadap keanggotaan Indonesia di Board of Peace.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menilai keikutsertaan RI adalah keputusan tepat untuk terus membantu Palestina.

“Kita tidak boleh berhenti dalam upaya mendukung Palestina. Tantangannya adalah menentukan cara paling efektif untuk memberikan dukungan tersebut agar rakyat Palestina memiliki kesempatan membangun masa depan mereka

sendiri,” jelasnya.

Bagi PBNU, Board of Peace adalah realitas geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Kehadiran Indonesia diperlukan untuk memastikan bahwa proses rekonstruksi Gaza tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kepentingan asing.

Di kutub berseberangan, Jaringan Gusdurian mengambil sikap yang secara fundamental berbeda.

Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, tidak menggunakan kata-kata diplomatis.

“Board of Peace tidak memiliki mandat hukum internasional yang jelas,” tegasnya.

“Perdamaian sepihak tidak boleh dirumuskan dan ditentukan secara sepihak dengan mengabaikan sejarah, luka, dan suara rakyat Palestina,” tambahnya.

Alissa menyoroti kontradiksi moral yang paling mencolok, dimana Israel, entitas yang oleh Mahkamah Internasional pun tengah diproses untuk kasus genosida, justru masuk sebagai anggota dewan.

“Padahal, entitas zionis itu adalah pelaku utama genosida dan kehancuran masif yang dialami Jalur Gaza,” ujarnya.

Yang paling prinsipil, Gusdurian menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

“Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” kutip Alissa.

Terkait potensi iuran US\$1 miliar, Gusdurian mengingatkan Pasal 11 UUD 1945, setiap perjanjian internasional yang berpotensi membebani keuangan negara harus memperoleh persetujuan DPR terlebih dahulu.

Perangkap Kepemimpinan *Global South*

Di antara berbagai kritik yang dilayangkan, satu argumen paling tajam datang dari kolom analisis yang dimuat Kompas.com, ditulis oleh seorang akademisi Hubungan Internasional Universitas Jenderal Soedirman.

Judulnya “Board of Peace Trump: Jebakan bagi Kepemimpinan Indonesia di *Global South*?”.

Penulis kolom tersebut, yang tidak disebutkan namanya namun teridentifikasi sebagai dosen tetap HI Unsoed, membedah paradoks yang dihadapi Indonesia.

Paradoks Pertama, Indonesia bergabung dengan institusi yang menolak prinsip kesetaraan kedaulatan negara.

Piagam PBB, terlepas dari segala kelemahannya, setidaknya mengakui hak yang sama bagi negara besar dan kecil. Sementara Board of Peace menjual keanggotaan permanen seharga US\$1 miliar.

“Ini adalah plutokrasi global, pemerintahan oleh yang kaya,” tulis sang analis.

Paradoks Kedua, Indonesia, bekas negara terjajah, mendukung konsentrasi kekuasaan pada satu individu.

Trump tidak hanya menjadi ketua, ia memiliki hak veto dan bahkan wewenang membubarkan organisasi.

“Sebagai negara yang pernah menjadi korban imperialisme, bukankah ini justru bentuk neo-imperialisme yang lebih vulgar?” katanya lagi.

Paradoks Ketiga, Model transaksional BoP memperkuat ketergantungan ekonomi *Global South*.

Council on Foreign Relations mencatat bahwa Trump menempatkan



KH Yahya Cholil Staquf

diplomasi mineral sebagai pilar sentral negosiasi konflik.

“Apakah ini berbeda dari kolonialisme lama yang mengeksploitasi sumber daya alam kita?” Tanya analis tersebut seperti tertulis di Kompas.com.

Paradoks Keempat, Indonesia sebagai pemimpin ASEAN justru bergabung dengan forum yang menjadi antitesis prinsip ASEAN.

Analisis tersebut menuliskan, ASEAN dibangun atas prinsip non-interferensi, konsensus, dan ‘ASEAN Way’ yang menghormati kedaulatan setiap anggota. Board of Peace adalah antitesis dari semua itu. Ia menawarkan kepemimpinan tunggal, keputusan sepihak, dan intervensi tanpa batas pada wilayah yang terancam konflik.

Hukum Internasional Di Perempatan, Antara Mandat Dan Piagam

Persoalan mendasar yang terus mengemuka dalam diskusi-diskusi akademik adalah status hukum Board of Peace.

Dr. Irawati Handayani dari FH Unpad membedakan secara tegas antara mandat Resolusi DK PBB 2803 dan Piagam BoP yang ditandatangani di Davos.

Dari Gaza Ke Davos

Tanggal	Peristiwa
September 2025	Donald Trump mengusulkan Board of Peace sebagai mekanisme pengawas rekonstruksi Gaza, bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap)
17 November 2025	Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803, memberikan mandat dua tahun untuk administrasi transisi Gaza
22 Januari 2026	Peresmian Board of Peace di sela WEF Davos, Swiss. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam BoP. Indonesia resmi menjadi anggota pendiri
23 Januari 2026	Publikasi analisis kritis pertama dari akademisi HI; dimulainya perdebatan publik di media massa
28 Januari 2026	Pengumuman resmi 26 negara anggota pendiri BoP oleh pemerintahan Trump
30 Januari 2026	Presiden Prabowo mengundang pimpinan ormas Islam ke Istana untuk membahas BoP
3 Februari 2026	Pernyataan sikap Gusdurian menolak keanggotaan Indonesia; PBNU menyatakan dukungan
5 Februari 2026	Presiden Prabowo mengundang mantan Menlu, Komisi I DPR, dan akademisi; menegaskan diplomasi tetap berpijak pada politik bebas aktif

Resolusi 2803, menurutnya, adalah produk hukum internasional yang sah. Resolusi ini mengamanatkan pembentukan administrasi transisi untuk Gaza dengan tugas dan fungsi yang jelas, dan secara eksplisit mensyaratkan bahwa semua tindakan harus konsisten dengan hukum internasional.

Namun, Piagam BoP adalah inisiatif sepihak Presiden Trump. Piagam tersebut, menurut Irawati, diinisiasi secara mandiri oleh Presiden Trump dan dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Pelanggaran paling fundamental adalah tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur pengambilan keputusan.

“Ini melanggar prinsip non-intervention dan hak penentuan

nasib sendiri. Ketika kita mengatur negara lain tetapi yang diaturnya tidak dilibatkan, dari sudut pandang hukum internasional, ini banyak sekali pelanggaran yang potensial,” tegas Irawati.

Jeffrey Sachs dari Columbia University, sebagaimana dikutip dalam analisis Kompas, menyebut situasi ini “absurd”. Sebab, Board of Peace berpura-pura menyelesaikan masalah yang sudah memiliki solusi global berusia 80 tahun, yakni sistem PBB.

Dari 26 anggota pendiri, mengapa negara-negara tertentu bergabung? Analisis atas masing-masing negara menunjukkan spektrum motivasi yang sangat beragam dan tidak semuanya dapat direplikasi untuk kasus Indonesia.

Vietnam bergabung dalam konteks

lanskap geopolitik yang kompleks di Asia Tenggara. Dengan rivalitas AS-China yang semakin intensif di Laut China Selatan, Hanoi memiliki kebutuhan melakukan “hedging” atau lindung nilai. Bergabung dengan inisiatif yang diprakarsai AS memberikan ruang napas tambahan tanpa secara formal meninggalkan kemitraan strategis dengan China.

Belarus, sekutu dekat Rusia, mengambil keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Namun, analisis melihat ini sebagai upaya Minsk untuk membuka kanal komunikasi alternatif dengan Washington di tengah sanksi Barat yang masih membelenggu.

Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, dan UEA memiliki kepentingan langsung di Gaza. Bagi mereka, Board of Peace adalah akses ke meja utama dalam menentukan masa depan wilayah yang secara geografis dan politik dekat dengan rumah mereka.

Argentina dan El Salvador, keduanya dipimpin presiden yang secara ideologis dekat dengan Trump. Untuk itu, keduanya melihat BoP sebagai pelengkap hubungan bilateral dengan AS.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Berbeda dengan Vietnam, Indonesia tidak menghadapi tekanan keamanan eksistensial dari China yang memerlukan lindung nilai eksplisit. Berbeda dengan Belarus, Indonesia tidak dalam posisi terisolasi secara diplomatik. Berbeda dengan negara-negara Teluk, Gaza bukan tetangga langsung Indonesia.

Argumentasi yang dibangun pemerintah adalah solidaritas Palestina dan kepemimpinan global.

DI BALIK ARSIP EPSTEIN:

JEJAK ELIT, LUKA KORBAN, DAN UJIAN TRANSPARANSI

Ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada akhir Januari 2026 mengunggah ratusan ribu hingga jutaan halaman dokumen yang responsif terhadap Epstein Files Transparency Act, publik dan media di seluruh dunia menyaksikan sebuah ledakan informasi yang sekaligus membuka peluang penelusuran dan menimbulkan kebingungan baru. DOJ menyatakan bahwa publikasi itu mencakup lebih dari 3 juta halaman tambahan, termasuk ribuan video dan ratusan ribu gambar, sehingga total produksi mendekati 3,5 juta halaman—sebuah arsip yang menurut pernyataan resmi dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan transparansi setelah undang-undang baru disahkan.

Rilis besarbesaran ini memaparkan beragam materi: berkas pengadilan, korespondensi email, catatan keuangan, foto, dan rekaman video yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari penyelidikan terhadap Jeffrey Epstein dan jaringan orang-orang di sekitarnya. Media arus utama, termasuk tim investigasi di sejumlah outlet, segera menyisir dokumen untuk menemukan pola, nama, dan bukti yang dapat diverifikasi; CBS News, misalnya, melaporkan bahwa batch terbaru berisi jutaan dokumen dan foto yang kini tersedia untuk ditelaah oleh jurnalis dan peneliti.

Namun volume bukanlah sinonim



kebenaran. Dokumen mentah, tanpa konteks yang lengkap, mudah disalahartikan. Beberapa nama yang muncul dalam daftar kontak atau korespondensi menjadi viral di media sosial, memicu tuduhan dan spekulasi yang belum tentu berlandaskan bukti kriminal. Seorang pengamat hukum mengingatkan bahwa kemunculan nama dalam berkas tidak otomatis berarti keterlibatan dalam tindak pidana; konteks, waktu, dan isi percakapan harus dianalisis secara forensik sebelum menyimpulkan apa pun. Di lapangan, jurnalis yang menelaah arsip ini harus menyeimbangkan dorongan untuk mengungkap fakta dengan kewajiban verifikasi yang ketat.

Salah satu dinamika yang muncul setelah rilis adalah gelombang klaim viral yang mengaitkan dokumen AS dengan rilis serupa dari negara lain; klaim bahwa Prancis atau Jerman mempublikasikan versi tak terredaksi dari berkas Epstein beredar luas dan memicu kebingungan. Pemeriksa fakta menelusuri klaim-klaim tersebut dan menemukan bahwa narasi itu sering kali berlebihan atau salah konteks—menunjukkan bagaimana informasi lintas negara dan potongan dokumen yang diambil terpisah dapat membentuk narasi yang menyesatkan. *“Viral posts claim France and Germany released unredacted Epstein files,”* demikian ringkasan pemeriksaan fakta yang menyoroti bahaya asumsi



tanpa verifikasi.

Di tingkat lokal, jejakjejak geografis dan sosial yang berulang dalam berkas memberi petunjuk tentang pola pergerakan dan hubungan. Misalnya, nama lokasi seperti Key Biscayne muncul berkali-kali dalam dokumen, dan liputan lokal mencoba mengaitkan referensi-referensi itu dengan peristiwa, tempat tinggal, dan pertemuan yang relevan bagi penyelidikan korban dan saksi. Namun sekali lagi, penelusuran semacam ini menuntut kehati-hatian: referensi tempat tidak selalu mengindikasikan tindakan kriminal, melainkan titik awal untuk penyelidikan lebih lanjut.

Publikasi dokumen juga menimbulkan dilema etis dan

praktis bagi media. Di satu sisi, ada tuntutan kuat untuk akuntabilitas dan transparansi—bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana kasus-kasus serius ditangani dan siapa saja yang mungkin terkait. Di sisi lain, ada risiko nyata bagi privasi korban dan pihak ketiga yang tidak bersalah; DOJ sendiri memperingatkan bahwa meskipun upaya redaksi dilakukan, situs publik *“may nevertheless contain information that inadvertently includes nonpublic personally identifiable information or other sensitive content.”* Pernyataan semacam ini menegaskan bahwa akses terbuka tidak boleh mengorbankan keselamatan atau martabat individu yang menjadi korban.

Kebocoran, baik yang disengaja maupun tidak, memperbesar peluang penyalahgunaan materi: foto yang diambil tanpa konteks dapat diputarbalikkan menjadi bukti palsu, potongan email dapat dipotong sehingga maknanya berubah, dan teori konspirasi dapat tumbuh subur di ruang yang minim verifikasi. Para pemeriksa fakta dan jurnalis investigatif kini bekerja untuk menelusuri metadata, memverifikasi tanggal dan lokasi, serta mewawancarai sumber primer agar setiap klaim yang dipublikasikan memiliki landasan yang kuat. *“What new evidence surfaced in the 2026 DOJ release”* menjadi pertanyaan yang harus dijawab bukan dengan sensasi, melainkan dengan metodologi forensik

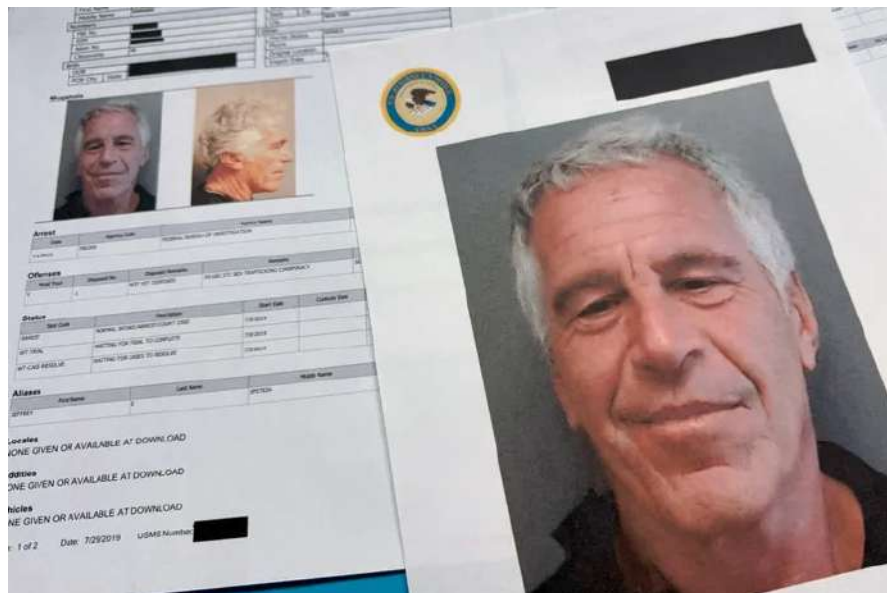
dokumen.

Bagi korban dan keluarga mereka, rilis ini membuka luka lama sekaligus memberi harapan bahwa kebenaran dapat lebih terang benderang. Namun harapan itu harus dikelola: publikasi tidak otomatis berarti keadilan yang cepat. Proses hukum memerlukan bukti yang dapat diterima di pengadilan, dan bukti itu harus dikumpulkan, diverifikasi, dan disajikan sesuai prosedur. Seorang advokat korban menegaskan bahwa “transparansi harus diimbangi dengan perlindungan korban,” sebuah prinsip yang kini menjadi pusat perdebatan antara aktivis hak korban, jurnalis, dan pejabat penegak hukum.

Akhirnya, apayang dapat dipetik dari gelombang pengungkapan ini adalah pelajaran tentang literasi informasi: pembaca harus skeptis terhadap klaim yang belum terverifikasi, jurnalis harus menahan godaan sensasionalisme demi akurasi, dan lembaga publik harus terus memperbaiki mekanisme redaksi untuk melindungi data sensitif. Rilis Epstein Files adalah momen penting bagi akuntabilitas publik, tetapi juga ujian bagi kemampuan kolektif kita untuk membedakan antara bukti dan rumor, antara transparansi yang bermakna dan kebocoran yang merusak. Jika tujuan bersama adalah keadilan, maka langkah selanjutnya harus ditempuh dengan kehati-hatian, ketelitian, dan rasa hormat terhadap mereka yang paling rentan.

Sanggahan Para Tokoh yang Namanya Muncul dalam Epstein Files

Ketika gelombang dokumen yang dikenal sebagai Epstein Files dibuka ke publik, reaksi paling cepat datang dari mereka yang namanya muncul di antara ratusan ribu halaman itu:



pernyataan resmi, sanggahan dari kuasa hukum, dan rilis singkat yang dirancang untuk menahan gelombang spekulasi. Namanama besar yang disebut dalam pemberitaan — dari politisi hingga tokoh bisnis dan selebritas — segera menegaskan posisi mereka, menolak implikasi apa pun dan menuntut verifikasi sebelum publik membuat penilaian.

Beberapa tokoh yang namanya sering disebut dalam liputan media termasuk Prince Andrew, Bill Clinton, Donald Trump, Alan Dershowitz, Les Wexner, Ehud Barak, dan sejumlah figur publik lainnya; kemunculan namanama ini dalam berkas tidak otomatis menunjukkan keterlibatan kriminal, namun publik menuntut penjelasan. Media internasional mencatat daftar nama tersebut sebagai bagian dari dokumen yang dirilis dan diindeks untuk penelusuran lebih lanjut.

Respons resmi yang paling sering muncul mengikuti pola yang serupa: penolakan tegas, penekanan pada

kurangnya bukti, dan ajakan agar publik menunggu verifikasi. “Nama klien kami muncul dalam dokumen, tetapi itu tidak menunjukkan keterlibatan apa pun; setiap klaim yang menyiratkan sebaliknya adalah tidak berdasar,” ujar seorang juru bicara yang mewakili salah satu pihak. Ujarnya, pernyataan itu dimaksudkan untuk menempatkan narasi di pihak yang disanggah sambil membuka kemungkinan tindakan hukum terhadap klaim yang dianggap fitnah.

Alan Dershowitz, yang namanya juga sering dikaitkan dengan kasus Epstein karena perannya di masa lalu, menegaskan bahwa tidak ada “daftar klien” yang membuktikan keterlibatan, dan memperingatkan bahwa banyak dokumen bersifat terpotong atau terredaksi sehingga mudah disalahartikan. *“There are several of them from accusers that accuse Jeffrey — that accuse various people of having improper sex, and that has been redacted, the names of the people accused have been blacked out,”* ujarnya, menyoroti perlunya

kehati-hatian dalam menafsirkan berkas yang dirilis.

Banyak kuasa hukum memilih bahasa yang berhati-hati dan teknis: “Dokumendokumen ini sering kali tidak lengkap, terpotong, atau diambil di luar konteks; kami menuntut verifikasi metadata dan sumber sebelum klaim apapun dianggap sah,” ujar seorang pengacara yang mewakili salah satu tokoh. Ujarnya, pernyataan semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai pembelaan reputasi tetapi juga sebagai persiapan untuk kemungkinan tindakan hukum terhadap penyebar informasi yang dianggap menyesatkan.

Beberapa tokoh menempuh pendekatan yang lebih personal. Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui akun resmi, seorang individu yang namanya muncul menulis, “Saya terkejut dan terguncang melihat nama saya muncul; saya tidak pernah terlibat dalam aktivitas yang digambarkan oleh beberapa unggahan viral,” ujarnya. Ujarnya, nada emosional ini dimaksudkan untuk meredam spekulasi dan menunjukkan kesiapan untuk bekerja sama dengan penyelidik demi mengklarifikasi fakta.

Ada pula respons yang bersifat defensif dan agresif: ancaman tindakan hukum terhadap media atau individu yang dianggap menyebarkan informasi palsu. “Kami telah menginstruksikan tim hukum untuk meninjau semua publikasi yang menuduh tanpa dasar; langkah hukum akan diambil jika diperlukan,” ujar pernyataan resmi dari sebuah firma hukum. Ujarnya, ancaman hukum sering kali efektif menekan narasi negatif, tetapi juga memicu kritik dari aktivis dan jurnalis yang menilai bahwa intimidasi hukum dapat menutup ruang akuntabilitas.

Di medan publik, sanggahan sering kali kalah cepat dibandingkan

unggahan viral yang memotong dan menyebarkan potongan dokumen tanpa konteks. “Informasi yang beredar di media sosial tidak akurat; silakan lihat pernyataan resmi kami untuk klarifikasi,” tulis sebuah akun resmi yang mewakili salah satu tokoh. Ujarnya, seruan untuk merujuk pada pernyataan lengkap sering kali kalah cepat dibandingkan impuls berbagi yang mendorong narasi sensasional.

Sementara itu, advokat korban dan aktivis hak korban merespons sanggahan dengan nada berbeda: mereka menuntut agar penyangkalan tidak mengaburkan kebutuhan akan penyelidikan menyeluruh dan perlindungan bagi para korban. “Transparansi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan dan martabat korban; penyangkalan massal tidak menggantikan proses verifikasi bukti,” ujar seorang advokat korban. Ujarnya, kritik ini menegaskan bahwa pembelaan reputasi tidak boleh menenggelamkan suara korban atau memperlambat upaya penegakan hukum.

Beberapa pihak yang disanggah memilih untuk merilis bukti pendukung guna mengontekstualisasikan kemunculan nama mereka: email lengkap, jadwal perjalanan, atau saksi yang menjelaskan konteks pertemuan. “Kami akan mempublikasikan dokumen yang relevan untuk menunjukkan konteks yang hilang,” ujar seorang penasihat komunikasi yang berjanji akan merilis materi tambahan. Ujarnya, strategi ini dimaksudkan untuk mematahkan narasi negatif dengan bukti yang menurut mereka lebih lengkap, namun langkah tersebut juga berisiko membuka lebih banyak detail yang kemudian dapat disalahgunakan atau

disalahtafsirkan.

Reaksi publik terhadap sanggahan beragam: sebagian menerima penjelasan dan menunggu verifikasi lebih lanjut; sebagian lain tetap curiga, menilai bahwa penyangkalan adalah taktik yang biasa dipakai oleh mereka yang ingin melindungi diri. “Penyelidikan harus berjalan tanpa takut terhadap tekanan reputasi,” ujar seorang pengamat hukum, menekankan bahwa proses forensik dokumen dan pemeriksaan saksi harus menjadi rujukan utama, bukan sekadar pernyataan publik. Ujarnya, hanya verifikasi independen yang dapat memisahkan fakta dari rumor.

Dalam lanskap informasi yang cepat berubah, sanggahan-sanggahan ini memperlihatkan kemampuan para tokoh dan timnya untuk merespons cepat, sekaligus batasan respons tersebut ketika berhadapan dengan dokumen mentah yang kompleks. Klaim yang belum diverifikasi tidak boleh menjadi vonis, tetapi klaim serius juga tidak boleh diabaikan hanya karena ada sanggahan. Ujarnya, tanggung jawab kolektif—media, lembaga penegak hukum, dan publik—adalah memastikan bahwa kebenaran dicari dengan ketelitian, keberanian, dan rasa hormat terhadap mereka yang paling rentan.

Kemunculan nama dalam arsip tidak sama dengan bukti keterlibatan; dokumendokumen yang dirilis sering kali terredaksi, terpotong, atau memerlukan verifikasi metadata dan konteks sebelum ditafsirkan sebagai bukti. Pembaca dan jurnalis diingatkan untuk menuntut verifikasi independen dan menghormati privasi korban saat menelaah materi yang kini tersedia untuk umum.



KONSOLNAS DIKDASMEN 2026:

**MENYATUKAN ARAH,
MEMPERCEPAT AKSI,
MENJAWAB KESENJANGAN**



Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas Dikdasmen) 2026 yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, pada 9–11 Februari menjadi titik temu strategis bagi pembuat kebijakan, pelaksana program, dan mitra pembangunan untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Forum tiga hari ini dirancang sebagai ruang kerja kolektif untuk mengevaluasi capaian, menguji implementasi kebijakan prioritas, dan merumuskan langkah akselerasi yang

konkret agar kebijakan pusat dapat diadaptasi dan dijalankan secara efektif di daerah. Hadirnya pimpinan Komisi X DPR RI, perwakilan Komite III DPD RI, enam menteri dan kepala lembaga, serta ratusan kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota menegaskan bahwa Konsolnas bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan arena politik kebijakan pendidikan yang menghubungkan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan di lapangan.

Dalam sambutan pembukaan yang menjadi rujukan utama bagi seluruh rangkaian diskusi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan

rangkaian capaian dan arah kebijakan yang jelas untuk 2026. “Komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat berbagai program prioritas pendidikan pada tahun 2026, khususnya revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, menjadi pijakan penting untuk akselerasi program pendidikan ke depan,” ujarnya.

Salah satu capaian utama adalah program revitalisasi satuan pendidikan dengan anggaran Rp16,9 triliun yang berhasil menjangkau 16.167 sekolah dari target awal 10.440 sekolah,

Selain itu, program Papan Digital



Interaktif atau Interactive Flat Panel juga telah terdistribusi 100 persen ke ratusan ribu satuan pendidikan.

“Dengan sistem swakelola, program ini tidak hanya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat setempat,” ujarnya.

Memasuki tahun 2026, pemerintah akan menambah sasaran revitalisasi menjadi 60 ribu satuan pendidikan serta melanjutkan distribusi perangkat digital pembelajaran,

Untuk program digitalisasi, secara bertahap setiap satuan pendidikan akan mendapatkan tiga PID yang mulai kami usahakan distribusinya pada tahun 2026. Sedangkan di bidang peningkatan mutu guru, Kemendikdasmen pada 2025 telah melaksanakan Pendidikan Profesi Guru bagi 804.157 guru, baik ASN maupun non-ASN, serta memberikan bantuan peningkatan kualifikasi akademik S1/D4 kepada 12.500 guru.

Pendekatan pembelajaran

mendalam juga telah melatih lebih dari 52 ribu kepala sekolah dan 186 ribu pendidik agar proses belajar menjadi lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu.

“Dari sisi kesejahteraan guru, pemerintah menaikkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan serta meningkatkan insentif guru non-ASN menjadi Rp400 ribu per bulan mulai 2026,” ujarnya.

“Pemerintah juga menyalurkan bantuan subsidi upah kepada lebih dari 253 ribu guru non-ASN di PAUD nonformal,” tambahnya.

Kemendikdasmen berupaya agar kesejahteraan guru semakin baik karena guru adalah kunci utama mutu pendidikan. “Dalam aspek evaluasi pembelajaran, Kemendikdasmen meluncurkan Transformasi Tes Kemampuan Akademik yang diikuti 3,48 juta siswa SMA/SMK/MA pada

November 2025,” ujarnya. “Hasil TKA ini tidak diharapkan berujung pada skor apalagi ranking, namun menjadi bahan refleksi dan perbaikan proses pembelajaran,” tambahnya.

Penguatan karakter peserta didik juga menjadi perhatian melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Indonesia Hebat: bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. “Kebiasaan sederhana ini jika dilakukan terus-menerus akan membawa anak-anak Indonesia menjadi generasi hebat di masa depan,” ujarnya.

“Selain itu, pemerintah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman, serta mendorong penguatan nasionalisme melalui upacara bendera dan ikrar pelajar setiap Senin,” ujarnya.

Kemendikdasmen berkomitmen melanjutkan program-program yang sudah ada, memperkuat partisipasi,

dan memastikan pendidikan bermutu untuk semua dapat terwujud secara nyata di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pada kesempatannya, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul yang menjadi prioritas nasional.

Menurut Menko PMK Pratikno, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan ketangguhan generasi masa depan.

Oleh karena itu, peran kepala dinas, kepala sekolah, dan guru sangat strategis sebagai penggerak perubahan di lapangan. “Kami ingin mengajak kepala dinas dan kepala sekolah menjadi orkestrator pembangunan SDM unggul. Sekolah harus membentuk manusia yang cerdas, sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta mampu menghadapi disrupsi digital dan perubahan iklim,” ujar Pratikno, Senin (9/2/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan pendidikan serta mendorong penguatan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan manusia.

Dukungan Legislatif dan Suara Komisi X

Komisi X DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas) Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Forum ini dinilai menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi,



strategi, dan langkah seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyotori sejumlah kebiasaan hebat yang dibangun Kemendikdasmen dan tercermin dalam pelaksanaan Konsolnas 2026. Mulai dari penguatan partisipasi bermakna, penggunaan data sebagai basis utama perumusan kebijakan, hingga penyelenggaraan kegiatan yang sederhana, efisien, dan pro-lingkungan, termasuk

“Kami mengapresiasi Kemendikdasmen yang tidak hanya berbicara soal kebijakan, tetapi juga memberi teladan dalam praktik. Partisipasi bermakna, kebijakan berbasis data, serta kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan adalah fondasi penting bagi tata kelola pendidikan yang modern dan bertanggung jawab,” ujar Hetifah dalam acara itu.

Menurut Hetifah, tema Konsolnas 2026 yaitu “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menegaskan bahwa pendidikan adalah kerja bersama,

bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Pendidikan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa, mulai orang tua, guru, sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, hingga tokoh adat dan agama dalam semangat gotong royong lintas sektor.

“Partisipasi semesta adalah kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh hak atas pendidikan yang layak, merata, dan bermutu,” tegasnya.

Legislator Dapil Kalimantan Timur ini juga menegaskan komitmen Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi di bidang pendidikan. Pada periode ini, Komisi X telah membentuk beberapa Panja strategis, antara lain Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marjinal.

Dia menjelaskan, Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marjinal telah menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, termasuk percepatan pembangunan sarana-prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan guru dengan skema yang adaptif, penguatan alokasi anggaran berbasis data kebutuhan riil, serta

”

Komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat berbagai program prioritas pendidikan pada tahun 2026, khususnya revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, menjadi pijakan penting untuk akselerasi program pendidikan ke depan.

Abdul Mu'ti
Menteri Pendidikan Dasar
dan Menengah



pembentukan Desk Pendidikan Daerah 3T dan Marjinal yang melibatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Dalam fungsi anggaran, Komisi X juga terus mengawal agar mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk program yang berdampak langsung pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

Sementara dalam fungsi legislasi, Komisi X tengah menyusun revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dengan pendekatan kodifikasi, guna merapikan dan menyelaraskan berbagai regulasi pendidikan secara komprehensif dan sistematis.

Politikus senior Partai Golkar ini menegaskan, tantangan pendidikan mulai dari kesenjangan akses dan kualitas, ketimpangan distribusi dan kesejahteraan guru, perundungan dan kekerasan di sekolah, hingga isu tata kelola merupakan pekerjaan rumah bersama yang harus dikerjakan secara kolaboratif.

“Konsolnas ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi melahirkan komitmen nyata, jejaring kolaborasi, dan langkah bersama untuk menyukseskan target pembangunan pendidikan nasional tahun 2026 dan seterusnya. Pendidikan bukan hanya soal hari ini, tetapi soal masa depan bangsa,” pungkasnya.

Simulasi Kebijakan, Pameran, dan Pengalaman Lapangan

Pameran Konsolnas Dikdasmen 2026 diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Konsolnas Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026 dengan tiga tujuan utama. Pertama, menampilkan capaian inovasi serta praktik baik pelaksanaan kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian kedua,



meningkatkan sinergi antar unit kerja dalam memperkuat pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang merata, bermutu dan tentu saja berkeadilan. Dan yang ketiga untuk memperluas aspirasi dan kolaborasi dalam mendukung pendidikan yang bermutu untuk semua.

Pameran ini hadir sebagai ruang terbuka yang menyajikan berbagai capaian, inovasi, serta praktik baik dari unit utama, unit pelaksana teknis (UPT), hingga mitra pendidikan demi memberikan layanan terbaik bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, saat membuka acara menekankan bahwa pameran ini adalah jembatan komunikasi bagi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, banyak kebijakan yang telah berjalan baik namun perlu disosialisasikan secara lebih mendalam kepada para pemangku kepentingan.

“Banyak praktik baik yang

sudah dilakukan kementerian dan ini momen yang sangat baik untuk mengomunikasikannya. Kami mendorong para peserta dari daerah dan mitra pendidikan untuk berkunjung agar terjadi proses transformasi pengetahuan dan pertukaran informasi,” ujar Wamen Fajar.

Wamen Fajar menjelaskan bahwa keberagaman stan yang hadir mencerminkan komitmen kementerian dalam memperkuat partisipasi semesta. Ia mengingatkan kembali pesan Menteri Abdul Mu’ti mengenai amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pendidikan yang inklusif.

“Tanpa semangat gotong royong dan kebersamaan, susah rasanya kita bisa mencapai tujuan besar pendidikan nasional. Pameran ini adalah bukti nyata komitmen kita untuk menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa



”

Kami ingin mengajak kepala dinas dan kepala sekolah menjadi orkestrator pembangunan SDM unggul. Sekolah harus membentuk manusia yang cerdas, sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta mampu menghadapi disrupsi digital dan perubahan iklim.

Pratikno
Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

ri 2020 PSDM Kem

pameran ini melibatkan seluruh lini unit kerja, mulai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (Ditjen Diksi PKPLK), hingga badan-badan pendukung seperti Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), Pusat Prestasi nasional (Puspresnas) dan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Selain itu, mitra pembangunan internasional seperti program kerja sama pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia melalui Inovasi Untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan program kerja sama Kemendikdasmen dengan Save the Children melalui Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia (KREASI), serta Tanoto Foundation turut memperkaya khazanah praktik baik yang ditampilkan.

“Kami berharap pameran ini menjadi ruang interaksi dan belajar bagi para peserta untuk berdialog, berbagi pengalaman, serta memperkuat pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” tutur Suharti.

Selain menjadi pusat informasi kebijakan, pameran ini juga menyuguhkan sisi humanis melalui gerai layanan dari Unit Layanan Terpadu (ULT) dan partisipasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemendikdasmen. Wamen Fajar pun berharap para peserta dapat menikmati suasana pameran sebagai



sarana penyegaran di tengah padatnya agenda konsolidasi. “Mudah-mudahan stan ini tidak hanya memiliki makna edukasi dan komunikasi, tapi juga memberikan makna rekreasi bagi para peserta,” imbuhnya.

Pameran ini diharapkan dapat menjadi wadah solid untuk memperkuat sinergi antarunit kerja dan memperluas inspirasi. Dengan kolaborasi yang erat antara pusat, daerah, dan mitra, Kemendikdasmen optimis cita-cita mewujudkan pendidikan bermutu yang merata dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik Indonesia dapat segera tercapai.

Rekomendasi Sembilan Komisi Penguatan Kebijakan Pendidikan

1. Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah: penanganan ATS berbasis pendataan akurat; penyusunan regulasi turunan Perpres No. 3 Tahun 2026; diseminasi pentingnya pendidikan prasekolah melalui tokoh adat dan agama; pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas

melalui pendidikan inklusif; pemerataan guru berkualitas termasuk di jenjang PAUD.

2. Revitalisasi Satuan Pendidikan: mekanisme verifikasi dan validasi Dapodik yang melibatkan satuan pendidikan dan dinas; optimalisasi linimasa perencanaan revitalisasi; evaluasi struktur konsultan dan pengawas; penguatan peran inspektorat pusat dan daerah dalam monitoring dan evaluasi.
3. Digitalisasi Pembelajaran: perencanaan berbasis data untuk digitalisasi; integrasi kebijakan pusat-daerah untuk kesiapan infrastruktur dan keamanan perangkat; pengembangan konten digital relevan dan inklusif; pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Evaluasi dan Tindak Lanjut Tes Kemampuan Akademik: analisis rinci capaian sekolah dan wilayah melalui laman resmi Kemendikdasmen; perluasan mata uji TKA untuk SD dan SMP;



prasyarat utama; tanpa data mutakhir, intervensi berisiko tidak tepat sasaran. Kesiapan infrastruktur di wilayah 3T masih jauh berbeda dibandingkan kota besar; distribusi PID dan perangkat digital harus disertai listrik, konektivitas, dan layanan purna jual. Sumber daya manusia—kepala sekolah, guru, dan operator—memerlukan pelatihan intensif agar teknologi dan kurikulum baru dapat dioperasikan efektif. Pendanaan yang ambisius menuntut mekanisme alokasi yang transparan dan akuntabel agar manfaatnya langsung dirasakan murid dan pendidik. Untuk mengatasi hambatan ini, Kemendikdasmen bersama mitra menyepakati langkah-langkah tindak lanjut: percepatan pemutakhiran Dapodik melalui peningkatan kapasitas operator dan insentif; pedoman teknis distribusi dan pemeliharaan perangkat digital; alokasi anggaran revitalisasi yang terfokus pada sekolah rusak berat dan wilayah 3T; serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang jelas. Forum juga menekankan perlunya kolaborasi lintas OPD di daerah untuk menjawab kebutuhan nonsekolah seperti sanitasi, listrik, dan akses transportasi.

Melalui Konsolnas Dikdasmen 2026, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya membangun keselarasan langkah antara pusat dan daerah agar kebijakan pendidikan dapat diterjemahkan secara kontekstual di lapangan. Konsolidasi ini diharapkan mempercepat implementasi program prioritas sekaligus memastikan peningkatan mutu pendidikan berlangsung lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

pemetaan kesiapan sarana prasarana oleh pemerintah daerah; pendampingan akademik bagi guru berdasarkan hasil TKA.

5. Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik): pemutakhiran data, peningkatan kapasitas SDM operator, dan dukungan infrastruktur; koordinasi rekonsiliasi data dengan Kementerian Agama; kajian insentif bagi operator Dapodik; perhatian khusus pada daerah 3T.
6. Pendidikan Karakter dan Manajemen Talenta: optimalisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; percepatan budaya sekolah aman dan nyaman melalui sosialisasi regulasi; implementasi Permendikdasmen tentang manajemen talenta murid melalui pemetaan minat dan bakat.
7. Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan: pemenuhan dan distribusi guru yang lebih fleksibel; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru; pemenuhan kepala sekolah dan pengawas

definitif; dukungan tenaga kependidikan untuk administrasi sekolah.

8. Kedaulatan Bahasa dan Revitalisasi Bahasa Daerah: menjadikan kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai indikator kinerja daerah; peningkatan kolaborasi literasi; penguatan bahasa daerah berbasis teknologi dan keluarga; optimalisasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
9. Pembelajaran Mendalam, Koding, Kecerdasan Buatan, dan Bimbingan Konseling: pelatihan ringkas dan kontekstual melalui KKG dan MGMP; penguatan materi koding dan AI yang aplikatif termasuk pendekatan tanpa perangkat; peningkatan kompetensi numerasi; penguatan kapasitas guru BK untuk menangani isu kesehatan mental murid.

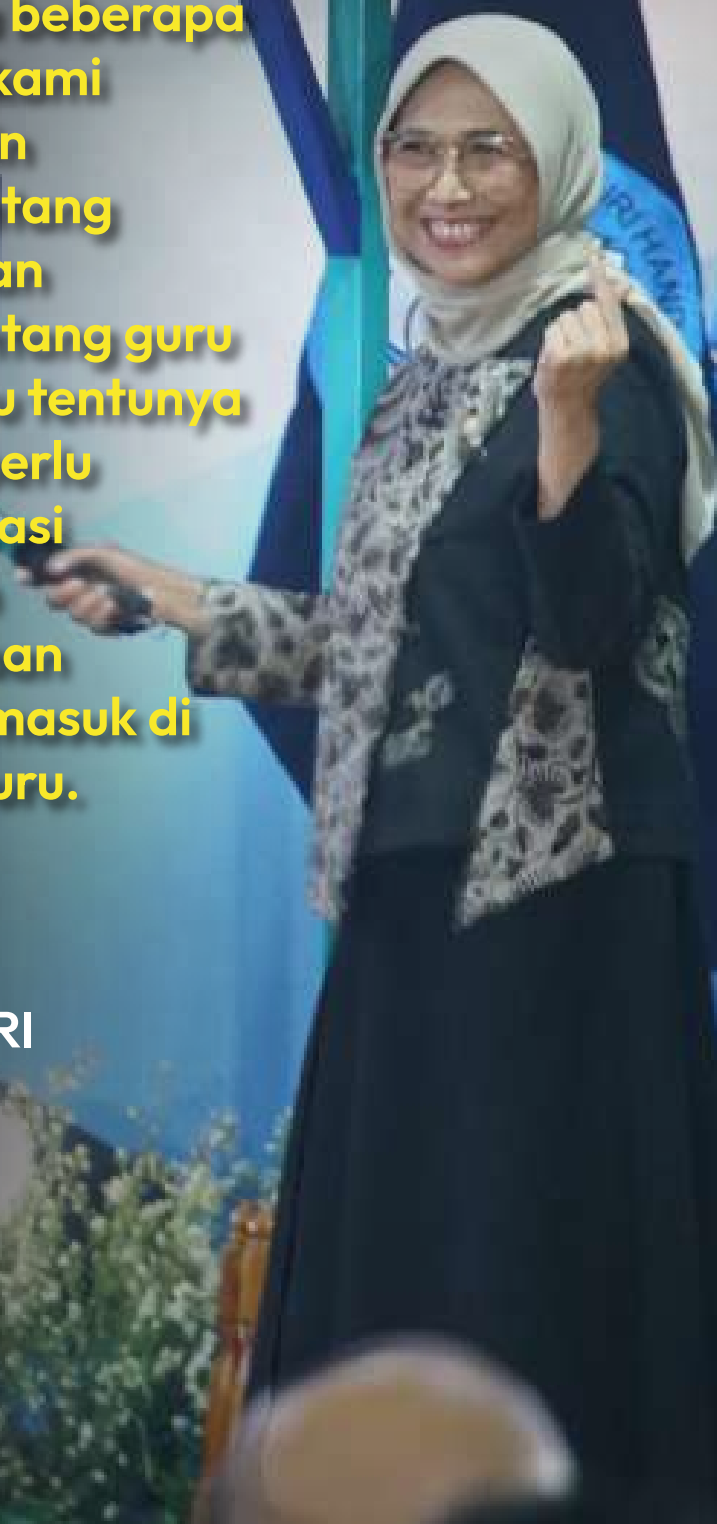
Hambatan Implementasi dan Langkah Mitigasi

Mentransformasikan rekomendasi menjadi praktik nyata menghadapi hambatan operasional yang nyata. Kualitas data Dapodik menjadi

”

Kami masih dalam proses menyusun revisi undang-undang 2020-2003 tentang sisdiknas. Kita semua masih menemukan banyak pekerjaan rumah di dalam pendidikan dan ada beberapa regulasi yang akan kami kodifikasi antara lain undang-undang tentang pendidikan tinggi dan undang-undang tentang guru dan dosen. Selain itu tentunya kami memandang perlu adanya restrukturisasi kewenangan dalam berbagai pelaksanaan giat pendidikan termasuk di dalam tata kelola guru.

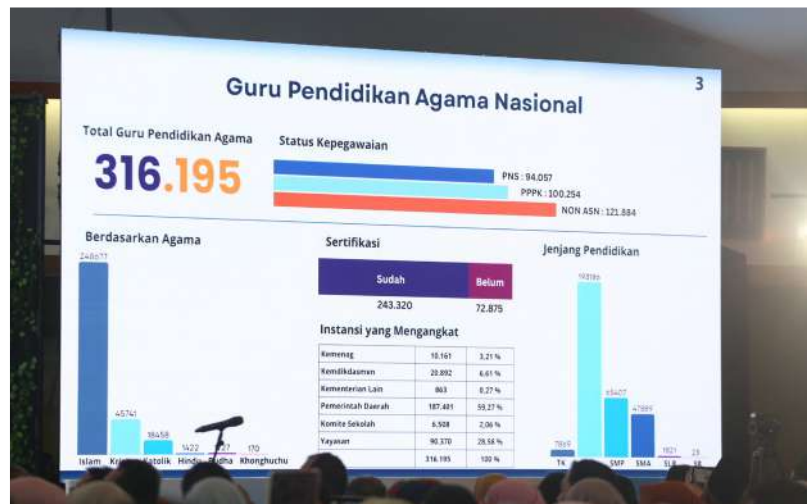
Hetifah Sjaifudian
Ketua Komisi X DPR RI





GALERI KONSOLNAS









**MEMPERKUAT PARTISIPASI SEMESTA
WUJUDKAN PENDIDIKAN BERMUTU
UNTUK SEMUA**



Rekomendasi Sembilan Komisi Penguatan Kebijakan Pendidikan



Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah:

penanganan ATS berbasis pendataan akurat; penyusunan regulasi turunan Perpres No. 3 Tahun 2026; diseminasi pentingnya pendidikan prasekolah melalui tokoh adat dan agama; pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas melalui pendidikan inklusif; pemerataan guru berkualitas termasuk di jenjang PAUD.



Revitalisasi Satuan Pendidikan:

mekanisme verifikasi dan validasi Dapodik yang melibatkan satuan pendidikan dan dinas; optimalisasi linimasa perencanaan revitalisasi; evaluasi struktur konsultan dan pengawas; penguatan peran inspektorat pusat dan daerah dalam monitoring dan evaluasi.



Digitalisasi Pembelajaran:

perencanaan berbasis data untuk digitalisasi; integrasi kebijakan pusat-daerah untuk kesiapan infrastruktur dan keamanan perangkat; pengembangan konten digital relevan dan inklusif; pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.



Evaluasi dan Tindak Lanjut Tes Kemampuan Akademik:

analisis rinci capaian sekolah dan wilayah melalui laman resmi Kemendikdasmen; perluasan mata uji TKA untuk SD dan SMP; pemetaan kesiapan sarana prasarana oleh pemerintah daerah; pendampingan akademik bagi guru berdasarkan hasil TKA.



Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik):

pemutakhiran data, peningkatan kapasitas SDM operator, dan dukungan infrastruktur; koordinasi rekonsiliasi data dengan Kementerian Agama; kajian insentif bagi operator Dapodik; perhatian khusus pada daerah 3T.



Pendidikan Karakter dan Manajemen Talenta:

optimalisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat; percepatan budaya sekolah aman dan nyaman melalui sosialisasi regulasi; implementasi Permendikdasmen tentang manajemen talenta murid melalui pemetaan minat dan bakat.



Tata Kelola Guru dan Tenaga Kependidikan:

pemenuhan dan distribusi guru yang lebih fleksibel; peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru; pemenuhan kepala sekolah dan pengawas definitif; dukungan tenaga kependidikan untuk administrasi sekolah.



Kedaulatan Bahasa dan Revitalisasi Bahasa Daerah:

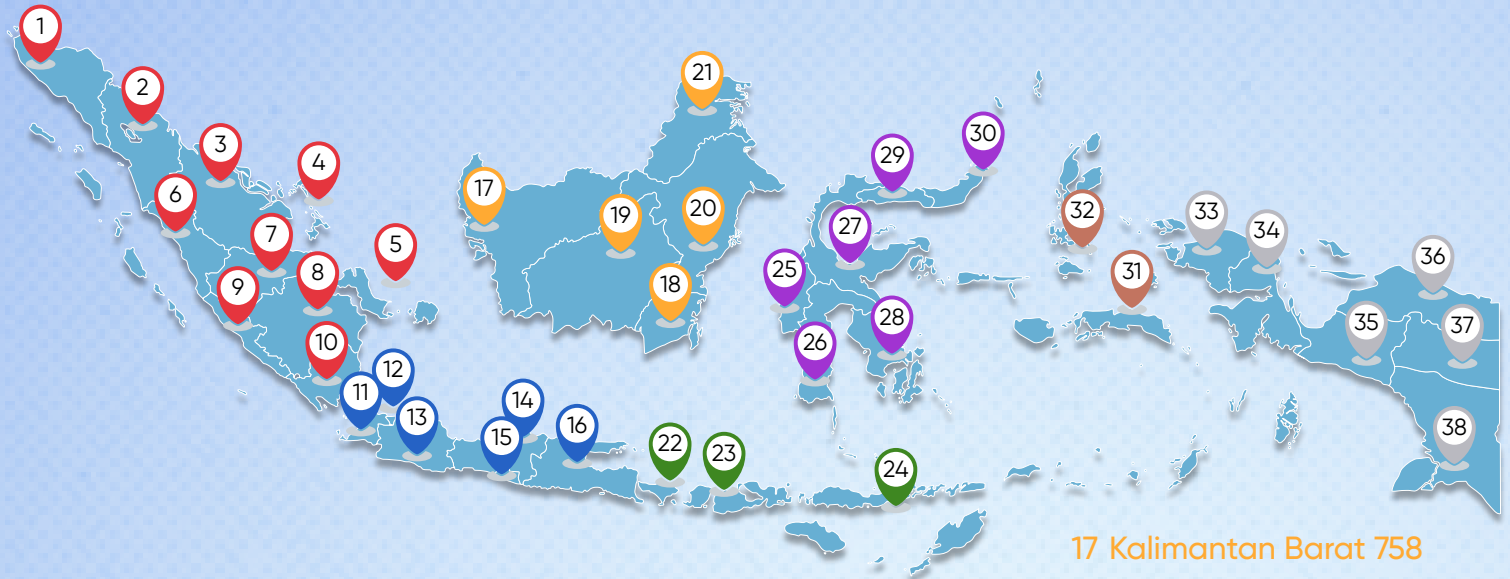
menjadikan kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai indikator kinerja daerah; peningkatan kolaborasi literasi; penguatan bahasa daerah berbasis teknologi dan keluarga; optimalisasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).



Pembelajaran Mendalam, Koding, Kecerdasan Buatan, dan Bimbingan Konseling:

pelatihan ringkas dan kontekstual melalui KKG dan MGMP; penguatan materi koding dan AI yang aplikatif termasuk pendekatan tanpa perangkat; peningkatan kompetensi numerasi; penguatan kapasitas guru BK untuk menangani isu kesehatan mental murid.

Rekapitulasi Sasaran Peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahap 1 Tahun 2026 Per Provinsi



- 1 Aceh 1.423
- 2 Sumatera Utara 2.562
- 3 Riau 993
- 4 Kepulauan Bangka Belitung 161
- 5 Kepulauan Riau 372
- 6 Sumatera Barat 658
- 7 Jambi 724
- 8 Sumatera Selatan 923
- 9 Bengkulu 347
- 10 Lampung 1.082

- 22 Bali 252
- 23 Nusa Tenggara Barat 1.128
- 24 Nusa Tenggara Timur 1.262

- 11 Banten 1.516
- 12 DKI Jakarta 959
- 13 Jawa Barat 5.098
- 14 Jawa Tengah 2.228
- 15 DI Yogyakarta 268
- 16 Jawa Timur 3.548

- 25 Sulawesi Barat 305
- 26 Sulawesi Selatan 1.445
- 27 Sulawesi Tengah 565
- 28 Sulawesi Tenggara 594
- 29 Gorontalo 110
- 30 Sulawesi Utara 451

- 17 Kalimantan Barat 758
- 18 Kalimantan Selatan 414
- 19 Kalimantan Tengah 596
- 20 Kalimantan Timur 664
- 21 Kalimantan Utara 150

- 31 Maluku 781
- 32 Maluku Utara 476

- 33 Papua Barat Daya 139
- 34 Papua Barat 140
- 35 Papua Tengah 206
- 36 Papua 347
- 37 Papua Pegunungan 164
- 38 Papua Selatan 159

Luar Negeri 7

Total 33.975

**Selamat Kepada Saudara/i yang Mengikuti
Antrian PPG Guru Tertentu dan Telah
Terpanggil untuk Mengikuti Proses PPG Guru
Tertentu Tahap 1 Tahun 2026**

**Mari Sukseskan
Penuntasan PPG Guru Tertentu
Tahun 2026 dengan Disiplin
Mengikuti Tahapan Sesuai Jadwal**

18 s.d 23 Februari 2026	18 Februari s.d 11 Maret 2026	26 Februari s.d 2 Maret 2026	5 Maret 2026	6 s.d 11 Maret 2026	12 s.d 16 Maret 2026	12 s.d 15 Maret 2026
Pemanggilan Peserta di SIMPKB	Pembelajaran mandiri di Ruang GTK	Lapor Diri di LPTK	Orientasi di LPTK	Pembelajaran Terbimbing secara daring di LPTK	Pendaftaran UKPPPG (First Taker)	Pendaftaran UKPPPG bagi Guru Tertentu (Retaker)



Catatan: Jadwal dapat berubah dan akan diinformasikan lebih lanjut



PERBAIKAN SEKOLAH DI GARIS DEPAN:

KOMITMEN KEMENDIKDASMEN UNTUK PENINGKATAN MUTU LINGKUNGAN BELAJAR

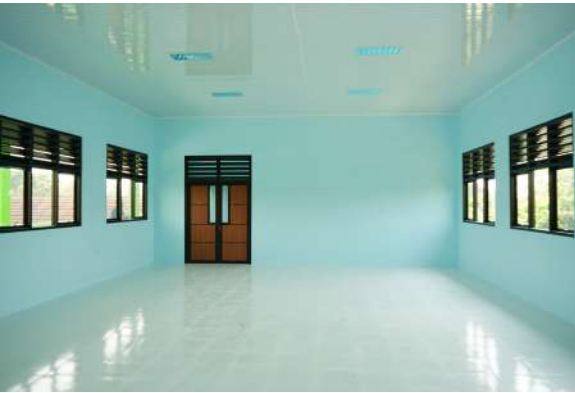
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan program revitalisasi infrastruktur sekolah yang dirancang untuk memperbaiki kondisi fisik ribuan satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dengan pelaksanaan yang dijadwalkan mulai pada Juli 2025. Program ini menargetkan perbaikan gedung dan fasilitas agar lingkungan belajar menjadi lebih aman dan layak, terutama bagi sekolah yang mengalami

kerusakan berat, berada di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau terdampak bencana.

Dalam keterangan pers yang disampaikan se usai kegiatan retreat kepala daerah di IPDN Jatinangor, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan secara tegas bahwa revitalisasi akan dimulai untuk 10.440 sekolah dan membuka kemungkinan penambahan jumlah sasaran bila terdapat efisiensi penggunaan

anggaran. Ia mengatakan, "Untuk revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia yang nanti bulan Juli ini mulai kita laksanakan untuk 10.440 sekolah dan bahkan mungkin bisa bertambah jumlahnya." Pernyataan ini menegaskan komitmen kementerian untuk memulai pelaksanaan secara masif dan fleksibel menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

Program revitalisasi tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya



cepat pemerintah untuk menghasilkan capaian nyata di sektor pendidikan, yang dalam beberapa liputan dikaitkan dengan inisiatif Quick Win atau Program Hasil Terbaik Cepat. Penempatan program dalam kerangka percepatan ini menunjukkan tekanan waktu dan kebutuhan koordinasi lintas lembaga agar perbaikan dapat segera dirasakan oleh komunitas sekolah.

Pelaksanaan revitalisasi menuntut proses seleksi dan verifikasi yang ketat: survei kondisi fisik sekolah, penetapan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi, serta mekanisme administrasi untuk penyaluran dana dan pengawasan teknis. Skema pelaksanaan yang diupayakan melibatkan kerja sama antara Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lokal sehingga pelaksanaan di lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan kapasitas setempat. Penggunaan skema swakelola pada beberapa proyek juga dimaksudkan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal dan mempercepat pengerjaan di wilayah yang aksesnya menantang.

Harapan utama dari program ini adalah terciptanya lingkungan belajar yang lebih aman dan kondusif sehingga proses pembelajaran tidak lagi terganggu oleh kondisi fisik yang buruk.

Selain itu, perbaikan infrastruktur diharapkan memberi dampak ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian material dari pasar setempat. Namun, harapan tersebut harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap kualitas konstruksi, standar keselamatan, dan keberlanjutan pemeliharaan agar investasi yang dikeluarkan tidak cepat rusak kembali.

Di sisi lain, tantangan yang harus dihadapi cukup kompleks. Keterbatasan anggaran relatif terhadap kebutuhan riil di lapangan dapat memaksa prioritas yang ketat, sementara akses logistik ke wilayah 3T tetap menjadi hambatan operasional yang signifikan. Koordinasi antarlevel pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa, perlu diperkuat agar proses administrasi, pengadaan, dan pengawasan teknis berjalan lancar tanpa menimbulkan keterlambatan yang merugikan sekolah dan siswa. Pengawasan independen dan transparansi pelaporan menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.

Agar program ini mencapai tujuan

jangka panjang, beberapa langkah strategis perlu diprioritaskan: menetapkan standar konstruksi yang tahan bencana dan mudah dipelihara, memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengawasan teknis, serta menyediakan mekanisme cadangan anggaran untuk menutup kebutuhan tak terduga. Selain itu, keterlibatan komunitas sekolah dan orang tua dalam pengawasan sederhana dapat membantu menjaga kualitas hasil revitalisasi dan mendorong rasa memiliki terhadap fasilitas yang diperbaiki.

Revitalisasi 10.440 sekolah yang dimulai pada Juli 2025 merupakan langkah awal yang ambisius dan berpotensi memperbaiki akses serta mutu lingkungan belajar bagi banyak anak di Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pusat, kapasitas daerah, transparansi pelaksanaan, dan pengawasan yang konsisten sehingga perbaikan fisik dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pendidikan yang nyata dan berkelanjutan.

► **SD N Sukamakmur 01, Bogor, Provinsi Jawa Barat**
Rehabilitasi perpustakaan sekolah

Sebelum



Sesudah



► **SMP Negeri 4 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
Rehabilitasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Sebelum



Sesudah



► **MPN 55 Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku**
Rehabilitasi Toilet

Sebelum



Sesudah



- ▶ **SMPN 12 Kota Serang, Provinsi Banten adalah**
 - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) 3 ruang
 - Pembangunan 1 ruang Lab,
 - Rehabilitasi ruang kelas 5 Ruang
 - Pembangunan toilet beserta sanitasinya
 - Rehabilitasi toilet

Sebelum



Sesudah



- ▶ **SMAN 1 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten**
Rehabilitasi 6 ruang kelas dan toilet Siswa sebanyak 3 unit

Sebelum



Sesudah



- ▶ **SMAN 11 Batam Provinsi Kepulauan Riau**
Rehabilitasi kelas dan perpustakaan.

Sebelum



Sesudah



► **SMP Negeri 12 Bintang Provinsi Kepulauan Riau
Rehabilitasi Toilet.**

Sebelum



Sesudah



► **SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
Rehabilitasi Ruang BK dan Rehabilitasi Ruang OSIS**

Sebelum



Sesudah



► **SMP Amal Bakti Manislol, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
Pembangunan baru untuk toilet.**

Sebelum



Sesudah

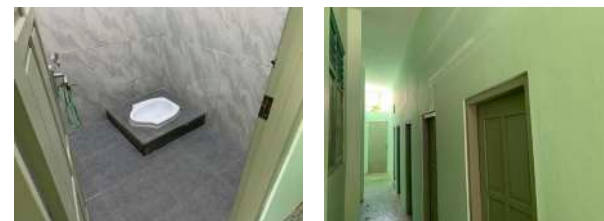


► **SMP Negeri 1 Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Rehabilitasi toilet.**

Sebelum



Sesudah



- **SMAN 2 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten**
- Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya
 - Pembangunan toilet beserta sanitasinya
 - Pembangunan Ruang UKS beserta perabotnya

Sebelum



Sesudah



- **SMAN 1 Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten**
- Pembangunan ruang kelas baru
 - Pembangunan UKS beserta perabotannya
 - Pembangunan Toilet Putri

Sebelum



Sesudah



- **SMA Muhammadiyah Ende, Kota Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah**
- Rehabilitasi ruang kelas (2 Ruang)
 - Rehabilitasi ruang UKS (2 Ruang)
 - Rehabilitasi toilet (1 Ruang)
 - Pembangunan toilet baru (1 Paket)

Sebelum



Sesudah



- **PAUD Bunda Skyline, Kota Jayapura, Provinsi Papua**
Rehabilitasi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Sebelum



Sesudah





REVITALISASI PENDIDIKAN PASCA BENCANA SUMATERA: **DARI TENDA DARURAT KE SEKOLAH TANGGUH**

Langit Aceh baru saja cerah setelah banjir bandang dan tanah longsor menerjang habis-habisan pada penghujung 2025. Di Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, dinding SMA Negeri 1 yang semula berlumut dan retak-retak kini telah berubah. Cat putih bersih menyelimuti tembok, atap baru menggantikan seng-seng yang lepas diterjang air, dan halaman sekolah yang dulu becek kini tertata rapi.

Pemandangan serupa juga terlihat ribuan kilometer dari sana, di dataran

tinggi Gayo, Aceh Tengah. SD Negeri 12 Bintang yang sempat terkubur material longsor di bagian belakangnya, kini berdiri tegak dengan ruang kelas baru yang lebih kokoh. Di halaman sekolah, upacara bendera kembali digelar, suara anak-anak menggemakan Pancasila, seolah ingin mengatakan: kami bangkit kembali.

Inilah potret terbaru dari program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dicanangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik

Indonesia. Bukan sekadar program pembangunan biasa, inisiatif ini adalah pernyataan tegas bahwa pendidikan adalah prioritas yang tak boleh terputus, bahkan oleh amukan alam sekalipun.

Ketika Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyebut angka 3.700 sekolah rusak dalam konferensi pers di Lanud Halim pada 29 Desember 2025, publik menarik napas panjang. Tapi di balik angka itu, ada cerita yang lebih dalam, anak-anak

yang kehilangan rutinitas, guru yang kehilangan panggilan mengajar karena trauma, dan sistem pendidikan yang tiba-tiba harus beroperasi tanpa papan tulis, tanpa listrik, tanpa kepastian.

Tulisan ini hendak mengurai secara komprehensif bagaimana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merespons bencana multidimensi ini, dari tanggap darurat hingga skenario jangka panjang. Namun, lebih dari sekadar catatan kebijakan, artikel ini adalah potret humanis tentang bagaimana pendidikan bertahan di tengah reruntuhan, dan sejauh mana negara hadir tidak hanya sebagai penyelamat darurat, tetapi sebagai arsitek ketangguhan.

Dampak Bencana Terhadap Pendidikan

Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada penghujung November 2025 menyisakan catatan kelam bagi dunia pendidikan. Dalam berbagai pernyataan resmi, setidaknya muncul dua angka berbeda terkait jumlah sekolah terdampak, bukan karena manipulasi, melainkan perbedaan waktu pendataan dan metodologi.

BNPB per 7 Januari 2026 mencatat 3.188 satuan pendidikan terdampak di tiga provinsi, dengan rincian: Aceh 1.312 sekolah, Sumatera Utara 1.217 sekolah, dan Sumatera Barat 659 sekolah.

Namun, data internal Kemendikdasmen yang dihimpun langsung dari dinas pendidikan kabupaten/kota menunjukkan angka lebih tinggi: total 4.149 sekolah. Rinciannya, Aceh 2.756 sekolah, Sumut 950 sekolah, dan Sumbar 443 sekolah. Perbedaan ini terutama disebabkan

KERUSAKAN SEKOLAH DI SUMATERA PER JANUARI 2026

Sumber: BNPB dan Kemendikdasmen (diolah)

Provinsi	Sekolah Terdampak (BNPB)	Sekolah Terdampak (Kemendikdasmen)	Kerusakan Berat	Ruang Kelas Rusak	Kebutuhan Kelas Darurat
Aceh	1.312	2.756	1.100 (estimasi)	2.900	1.400
Sumatera Utara	1.217	950	1.000 (estimasi)	2.200	900
Sumatera Barat	659	443	500 (estimasi)	1.331	573
TOTAL	3.188	4.149	~2.600	6.431	2.873

Catatan: Perbedaan angka disebabkan cakupan waktu dan metode pendataan

oleh cakupan definisi “terdampak” apakah hanya yang mengalami kerusakan fisik, atau termasuk yang siswanya mengungsi meski gedung masih berdiri.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah tingkatkeparahan. Menteri Koordinator PMK Pratikno mengungkapkan bahwa dari 3.700 sekolah yang teridentifikasi awal, sekitar 3.100 di antaranya mengalami kerusakan berat. Artinya, 83,7 persen sekolah terdampak tidak bisa digunakan sama sekali. Ribuan ruang kelas, tepatnya 6.431 ruang kelas rusak, dan 22.245 rombongan belajar harus direlokasi atau dihentikan sementara.

Jika sekolah adalah badan, maka siswa adalah jantungnya. Data BNPB menunjukkan kebutuhan mendesak akan 141.335 perlengkapan sekolah (school kit) tas, seragam, alat tulis yang hanyut atau rusak.

Namun, hingga akhir Januari 2026, belum ada angka pasti jumlah siswa terdampak karena sistem pendataan Dapodik ikut lumpuh di wilayah bencana. BPS mencatat bahwa proses pendataan langsung

masih berlangsung, melibatkan 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS dan 1.099 staf BPS yang diterjunkan ke 52 kabupaten/kota terdampak.

Sementara itu, 16.467 guru tercatat sebagai penerima bantuan langsung tunai dari Kemendikdasmen, dengan total nilai Rp32,934 miliar.

Angka ini belum termasuk ribuan guru honorer yang tidak terdaftar dalam sistem atau guru yang mengajar di madrasah non-negeri.

“Kami menerima bantuan, tapi rekan kami yang honor di sekolah swasta masih menunggu,” ujar seorang guru SD di Pidie Jaya yang diwawancarai tim Litbang Kompas.

Aceh di Puncak Penderitaan

Dari semua wilayah, Aceh menanggung beban terberat. Provinsi ini tidak hanya memiliki jumlah sekolah rusak terbanyak (2.756 versi Kemendikdasmen), tetapi juga kompleksitas geografis yang menyulitkan distribusi bantuan. Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Utara menjadi episentrum kerusakan. Di beberapa kecamatan terpencil,

akses darat terputus selama dua pekan. Helikopter BNPB baru bisa menjangkau wilayah ini pada minggu ketiga Desember.

Sumatera Barat, meski jumlah sekolah terdampak lebih sedikit (443 sekolah), memiliki tantangan tipikal bencana material longsor yang menutupi badan jalan dan lokasi sekolah yang berada di lereng. Kecamatan Palembayan dan Ampek Nagari di Kabupaten Agam kehilangan akses pendidikan total selama 10 hari.

Sumatera Utara mengalami kerusakan tersebar di kawasan pesisir timur, terutama Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Banjir rob yang merendam sekolah selama hampir sepekan menyebabkan kerusakan instalasi listrik dan perangkat TIK yang tidak bisa diperbaiki.

Dampak jangka pendek bencana terhadap pendidikan langsung terlihat, yaitu pembelajaran terhenti. Di ribuan sekolah, semester ganjil 2025/2026 berakhir lebih cepat dari jadwal. Ulangan semester batal. Rapor dicetak ala kadarnya.

Namun, dampak jangka panjang lebih mengkhawatirkan. Studi lintas bencana menunjukkan bahwa setiap minggu sekolah yang hilang akibat bencana setara dengan kehilangan 1,5 bulan penguasaan kompetensi dasar, terutama literasi dan numerasi. Untuk Sumatera, dengan skenario pembelajaran darurat selama 0-3 bulan di fase pertama, proyeksi *learning loss* bisa mencapai 0,4–0,6 tahun pembelajaran efektif.

Kepala BSKAP Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengakui bahwa gangguan KBM tidak hanya soal ketidakhadiran fisik di kelas, namun juga mengganggu kognitif.

“Trauma mengganggu kemampuan kognitif. Anak yang kehilangan

orangtua tidak akan bisa fokus pada pecahan matematika,” ujarnya.

Respons Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah: Cepat, Terukur, Tapi Tak Tanpa Cela

Ketika air mulai surut di Aceh Utara pada 28 November 2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah belum memiliki protokol bergerak. Namun, dalam 48 jam, tim krisis Kemendikdasmen terbentuk. Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2026 yang baru terbit Januari sejatinya adalah modifikasi dari serangkaian instruksi verbal yang sudah berjalan sejak pekan pertama Desember.

Tanggap darurat pendidikan memiliki tiga fokus awal: (1) evakuasi dokumen dan perangkat sekolah, (2) pendataan kebutuhan darurat, dan (3) aktivasi posko pendidikan di tingkat provinsi. Namun, tantangan di lapangan membuat fokus bergeser ke isu yang lebih fundamental yaitu bagaimana sekolah bisa kembali buka.

Puncak respons kebijakan tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana. SE ini menjadi payung hukum bagi fleksibilitas luar biasa yang diberikan kepada satuan pendidikan.

Ada tiga skenario yang dirancang berdasarkan tingkat kerusakan dan estimasi waktu pemulihan :

Skenario 1: Tanggap Darurat (0–3 Bulan)

- Diterapkan pada sekolah yang masih memiliki ruang kelas layak atau memungkinkan belajar di tenda.
- Kurikulum: Disempitkan menjadi materi esensial (literasi, numerasi, kebencanaan, dukungan

psikososial).

- Asesmen: Tidak diwajibkan. Fokus pada kehadiran dan kenyamanan psikologis.

Skenario 2: Pemulihan Dini (3–12 Bulan)

- Untuk sekolah dengan kerusakan sedang hingga berat yang membutuhkan rekonstruksi.
- Kurikulum: Adaptif dengan pendekatan remedial.
- Metode: *Blended learning* jika infrastruktur memungkinkan.
- Asesmen: Berbasis portofolio atau unjuk kerja.

Skenario 3: Pemulihan Lanjutan (1–3 Tahun)

- Untuk sekolah roboh total yang harus direlokasi atau dibangun ulang dari nol.
- Integrasi permanen pendidikan kebencanaan dalam kurikulum.
- Monitoring evaluasi berkelanjutan.

Menteri Abdul Mu'ti menegaskan filosofi di balik skenario ini adalah “Pendidikan tidak boleh berhenti, tetapi keselamatan adalah prioritas”. SE ini juga memberikan kewenangan luar biasa kepada satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan dan kenaikan kelas tanpa harus merujuk ketuntasan kurikulum nasional.

Distribusi Bantuan: Dari Perlengkapan Sekolah Hingga Dana Operasional

Kemendikdasmen menggelontorkan bantuan dalam lima klaster besar :

- Perlengkapan Siswa : Rp27 miliar (Aceh Rp15,5 miliar, Sumbar Rp5 miliar, Sumut Rp6,5 miliar).
- Tenda pendidikan: Rp147 miliar (Aceh Rp78 miliar, Sumbar Rp22 miliar, Sumut Rp47 miliar).
- Ruang kelas darurat: Rp160 miliar untuk pembangunan 160 unit kelas darurat (100 di Aceh, 30 di Sumut,



30 di Sumbar).

- Dana operasional darurat: Rp25,915 miliar.
- Dukungan psikososial: Rp700 miliar, anggaran terbesar yang mencerminkan prioritas pemulihan mental.
- Bantuan langsung guru: Rp32,934 miliar untuk 16.467 guru.

Selain itu, realokasi anggaran senilai Rp. 53 miliar dilakukan melalui Dispensasi Revisi Pergeseran Anggaran dengan Surat Menteri Nomor 28189/MDM.A/PR.07.04/2025. Dana ini diambil dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Pusdatin, Puspresnas, serta Ditjen Vokasi PKPLK.

Di level mikro, pemerintah juga memberikan dana pembersihan Rp. 20 juta per sekolah untuk 587 sekolah

yang masih dalam proses pembersihan lumpur. Dana ini dikritik karena sangat minim oleh beberapa kepala sekolah, pasalnya sebagai contoh, di Aceh Utara, biaya angkut puing bisa mencapai Rp35 juta. Namun, pejabat Kemendikdasmen menyebutnya sebagai stimulus awal, sementara dana rehabilitasi lebih besar akan menyusul.

Koordinasi Lintas Sektor: Antara Ideal dan Realita

Pendidikan tidak bisa pulih sendiri. Kemendikdasmen berkoordinasi dengan BNPB untuk data kerusakan, dengan Kementerian PUPR untuk rekonstruksi fisik, dan dengan Kemendagri untuk mobilisasi sumber daya daerah. Rapat Gugus Tugas Pemulihan Bencana yang dipimpin

Mendagri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Banda Aceh 10 Januari 2026 menjadi momentum sinkronisasi data melalui pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

Namun, di tingkat tapak, koordinasi kerap tersendat. Dinas Pendidikan Kabupaten menunggu petunjuk teknis dari provinsi, sementara provinsi menunggu alokasi anggaran dari pusat. Kepala SD Negeri 05, Salareh Aia menuturkan, bantuan tenda dari pusat datang lebih dulu, tetapi meja lipat baru tiba dua minggu kemudian dari dinas kabupaten.

“Kami harus kreatif. Kursi dari rumah warga dipinjam dulu,” katanya.



Menata Darurat agar Tak Kacau

Kebijakan tanggap darurat pendidikan tidak lahir dari ruang hampa. Selain SE Mendikdasmen No 1/2026, terdapat dua landasan regulasi lain:

Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19—meski konteksnya pandemi, prinsip pembelajaran darurat dan fleksibilitas kurikulum diadopsi untuk bencana alam.

Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengatur kewajiban pemerintah menjamin pemenuhan hak dasar termasuk pendidikan saat tanggap darurat.

Kemendikdasmen juga merilis Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan Nasional, yang dilengkapi peta kompetensi kebencanaan sesuai jenjang pendidikan. Inilah fondasi untuk integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran, baik eksisting seperti IPA dan Geografi, maupun

sebagai muatan lokal.

Program Revitalisasi Jangka Menengah Dan Panjang: Menuju Sekolah Tangguh Bencana

Pada Februari 2026, Kemendikdasmen menargetkan pembangunan sekolah rusak dapat dimulai. Namun, membangun kembali tidak boleh sekadar mengembalikan seperti sedia kala. Prinsip *build back better* menjadi mantra yang diulang dalam setiap rapat koordinasi.

Apa itu sekolah tahan bencana? Di Indonesia, sebenarnya sudah ada uji coba. Proyek SIBADES ITB di SDN Binawarga, Cianjur, pascagempa 2022, menjadi contoh: penggunaan sistem *confined masonry* yang menjadikan dinding sebagai elemen struktural penahan gempa, fondasi telapak, dan fondasi menerus batu kali. Meskipun konteks Cianjur adalah gempa, prinsip ketahanan struktural dapat diadaptasi untuk banjir dan longsor di Sumatera, misalnya elevasi lantai, sistem drainase, dan pemilihan lokasi aman.

Kemendikdasmen mengklaim

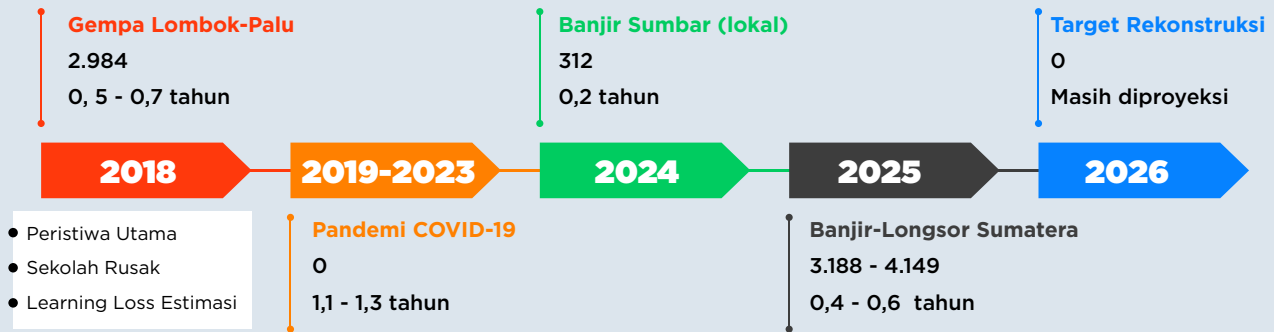
akan mengadopsi standar bangunan hijau dan tahan bencana dalam rekonstruksi. Namun, tantangannya adalah relokasi. Banyak sekolah yang hancur total berdiri di zona merah bencana. Mendikdasmen mengakui bahwa pencarian tanah baru untuk relokasi membutuhkan waktu, terutama karena urusan pertanahan melibatkan Pemda dan masyarakat.

Integrasi Pendidikan Kebencanaan dalam Kurikulum

Setiap bencana selalu melahirkan kesadaran baru, bahwa kita hidup di atas cincin api. Namun, kesadaran ini perlu diterjemahkan ke dalam kompetensi. Kemendikdasmen, melalui Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan, mendorong integrasi mitigasi bencana secara lintas mata pelajaran.

Di tingkat SD, anak-anak diperkenalkan pada simbol-simbol evakuasi dan jalur aman. Di SMP, mereka belajar membaca peta rawan bencana. Di SMA, mereka merancang simulasi tanggap darurat berbasis

TREN BENCANA DAN DAMPAK PADA SEKTOR PENDIDIKAN (2018-2026)



Catatan: Dampak pandemi COVID-19 paling berat karena durasi panjang

Sumber: BNPB, Litbang Kompas

proyek. Kepala BSKAP menyebut ini sebagai investasi keselamatan jangka panjang.

Namun, kritik muncul dari pengamat kurikulum, pakar pendidikan UPI, Prof. Said Hamid mengharapkan pendidikan kebencanaan tidak hanya sekadar menjadi hafalan.

“Jangan sampai pendidikan kebencanaan menjadi sekadar hafalan. Yang dibutuhkan adalah budaya sadar bencana, bukan sekadar bab tambahan di buku,” ujar Prof. Said Hamid, dalam sebuah diskusi publik.

Digitalisasi Pembelajaran: Antara Solusi dan Kesenjangan

Pandemi mengajarkan bahwa pendidikan bisa berjalan meski sekolah tutup. Namun, pascabencana Sumatera, pembelajaran daring menghadapi hambatan lebih berat, jaringan listrik mati, menara BTS roboh, dan perangkat siswa hanyut. Digitalisasi di masa tanggap darurat nyaris mustahil.

Untuk jangka menengah, Kemendikdasmen merencanakan penguatan sistem pembelajaran daring yang tahan bencana dengan skenario *offline content* yang bisa diunduh saat

jaringan tersedia, dan server lokal di kecamatan yang tidak tergantung koneksi ke pusat. Namun, alokasi anggaran untuk transformasi digital pascabencana masih belum jelas. Dari realokasi Rp. 53 miliar, porsi untuk Pusdatin hanya Rp. 5,5 miliar.

Pelatihan Guru: Garda Terdepan yang Lelah

Guru adalah aktor kunci pemulihan, namun mereka juga korban. Banyak guru di Pidie kehilangan rumah, bahkan anggota keluarga. Program pelatihan manajemen krisis untuk guru digagas Kemendikdasmen bekerja sama dengan LPTK dan organisasi profesi. Pelatihan ini mencakup identifikasi dini trauma pada siswa, teknik mengajar di ruang terbatas, dan penyusunan RPP darurat.

Namun, diakui bahwa pelatihan belum menjangkau seluruh guru terdampak. Dinas Pendidikan Aceh mencatat baru 2.300 dari 9.000 guru di wilayah terdampak yang mendapat pelatihan psikososial dasar per akhir Januari 2026. Akses ke pelosok menjadi kendala klasik yang terus berulang.

Perspektif Lapangan

Antara Idealisme, Lelah dan Puing

Ibu Ratna, Kepala SDN 2 Pidie, Aceh

Halaman sekolahnya masih dipenuhi puing ketika tim Kemendikdasmen datang pada 20 Desember. Namun, ia bersikeras menggelar belajar darurat di posko pengungsian.

“Saya bilang ke guru-guru, ini bukan mengajar matematika, ini mengajar keberanian. Anak-anak harus lihat bahwa orang dewasa tidak menyerah,” cerita Ratna.

Sebagai penyemangat, ia menyisihkan dana pribadi untuk membeli spidol dan kertas HVS, dimana kedua barang tersebut merupakan barang yang langka di pengungsian.

“Bantuan Rp. 20 juta dari pemerintah untuk pembersihan? Alhamdulillah, tapi kami keluar Rp7 juta dulu untuk sewa ekskavator. Dana cair setelah kerja selesai,” katanya.

Pak Syafrizal, Guru Kelas 5 SDN 05 Salareh Aia, Agam

Ia kehilangan ipar dan keponakannya dalam galodo. Namun,

TIMELINE: DARI TANGGAP DARURAT HINGGA REHABILITASI



dua pekan setelah bencana, ia sudah kembali ke sekolah darurat. “Saya bisa pura-pura kuat di depan anak-anak. Tapi malamnya, saya menangis.” Syafrizal adalah satu dari ribuan guru yang tidak mendapat bantuan psikososial karena berada di luar sasaran pendataan awal. “Relawan dari UIN datang, itu sangat membantu. Tapi mereka tidak bisa tinggal lama. Saya yang harus melanjutkan.”

Siswa: Kembali Tertawa, Tapi Tak Sepenuhnya Aisyah (9), Siswi Kelas 3 SD di Langkat, Sumatera Utara

Aisyah kehilangan tas ransel baru, hadiah ulang tahun seminggu sebelum banjir.

“Buku gambar saya hanyut. Saya sedih, Bu,” katanya.

Ketika belajar di tenda, ia duduk di paling depan. “Saya mau jadi dokter. Tapi saya takut air,” tegasnya.

Firasat kecemasan pascatrauma ini ditemukan psikolog UIN Bukittinggi pada banyak anak. Mereka bisa tersenyum saat diajak bermain, tapi menolak mandi karena ingat air bah.

Orang Tua: Prioritas Pangan Dulu, Sekolah Belakangan Mak Juni, Ibu Murid di Aceh Utara

Suaminya nelayan, perahu rusak diterjang banjir. Untuk itu, Juni meminta anak-anaknya agar menahan diri untuk ke sekolah, karena harus menolongnya menjemur ikan.

“Anak saya tiga. Yang paling besar kelas 5. Saya suruh bantu jemur ikan dulu. Sekolahnya nanti kalau bapaknya sudah bisa melaut lagi,” katanya.

Pernyataan ini mencerminkan dilema di masa krisis, pendidikan menjadi kebutuhan tersier. Program bantuan school kit dan seragam gratis tidak akan efektif jika ekonomi keluarga belum pulih.

Analisis Dan Kritik Konstruktif: Seberapa Cepat, Seberapa Merata?

Jika dibandingkan dengan respons bencana Lombok 2018 yang memakan waktu berminggu-minggu untuk aktivasi posko pendidikan, Kemendikdasmen era baru ini bergerak relatif cepat. Dalam 10 hari pascabencana, realokasi anggaran sudah digulirkan. Namun, ukuran kecepatan seharusnya bukan dari pengumuman kebijakan, melainkan dari sampainya bantuan ke tangan anak.

Di sini, catatan merah muncul. Distribusi 78 tenda untuk Aceh, provinsi dengan 1.312 sekolah terdampak, hanya mencukupi untuk 5,9 persen sekolah. Kelas darurat baru 100 unit, sementara kebutuhan di Aceh saja mencapai 1.400 unit. Data Kemendikdasmen dan BNPB memang berbeda, tapi keduanya sepakat ada kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi.

Kritik dari publik dan DPR menyasar pada prosedur yang masih kaku. SE Mendikdasmen No 1/2026 memang memberikan fleksibilitas kurikulum, tapi fleksibilitas pengadaan barang di dinas pendidikan masih terbatas. Proses lelang rehabilitasi sekolah baru bisa dimulai

Februari 2026, tepatnya tiga bulan pascabencana. Akibatnya, ribuan siswa masih belajar di tenda saat artikel ini ditulis.

Pola sentralisasi bantuan berulang. Bantuan cenderung menumpuk di ibu kota kabupaten, sementara sekolah di kecamatan terpencil dengan akses rusak masih menunggu. Guru di pelosok Gayo Lues melaporkan bahwa mereka baru menerima school kit pada 20 Januari 2026, sementara sekolah di pusat kota sudah menerima sejak pekan pertama Januari.

Anggaran dukungan psikososial sebesar Rp. 700 miliar terlihat besar, tapi jika dipecah untuk 141.335 siswa yang kehilangan perlengkapan sekolah dan puluhan ribu guru terdampak, efektivitasnya

tergantung implementasi. Program trauma healing yang dilakukan UIN Bukittinggi di Agam bersifat sporadis, tidak sistemik. Tidak ada tim psikolog permanen yang ditempatkan di setiap kecamatan terdampak. Pemulihan psikososial diserahkan pada relawan dan dinas sosial—yang notabene bukan ahli trauma anak.

Bencana adalah pengungkit ketimpangan. Sebelum bencana, indeks pemerataan pendidikan di Aceh dan Sumbar sudah di bawah rata-rata nasional. Pascabencana, siswa di kota besar dengan akses internet dan orangtua mampu akan lebih cepat pulih karena bisa mengakses sumber belajar alternatif. Sementara anak di pedalaman dengan single parent yang kehilangan mata pencaharian, berisiko

putus sekolah permanen.

Data Susenas (BPS) 2025 pra-bencana menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA di Aceh hanya 78,3 persen, di bawah nasional 86,5 persen. Tanpa intervensi afirmatif pascabencana, kesenjangan ini akan melebar.

Kata Akademisi Pendidikan: Kurikulum Darurat Itu Pisau Bermata Dua

**Dr. Nisa Felicia, Pakar Kurikulum,
Universitas Negeri Padang**

“Saya mengapresiasi fleksibilitas SE No 1/2026. Ini belajar dari pandemi. Tapi saya khawatir, fleksibilitas tanpa standar minimal justru menciptakan ilusi belajar. Guru di daerah sulit



mungkin memilih jalan pintas: memberi tugas mudah, menilai asal-asalan, lalu naik kelas semua. Ini bukan belajar, ini sekadar formalitas. Pemerintah harus memastikan ada *quality assurance* di masa darurat, misalnya dengan *learning progress report* sederhana namun terstandar,” katanya.

Fadjroel Rachman, Pengamat Kebijakan (Wawancara daring, Jan 2026)

“Mari jujur. Anggaran pendidikan selalu besar di kertas, tapi selalu lambat di eksekusi. Rekonstruksi sekolah di Palu 2018 saja ada yang baru selesai 2021. Sekarang Sumatera 2026. Siklusnya berulang. Indonesia butuh dana abadi kebencanaan pendidikan yang bisa diakses tanpa revisi anggaran DIPA. Tidak boleh lagi kita menunggu surat dispensasi ketika anak-anak sudah kehilangan tiga bulan belajar.”

Sri Hartati, Psikolog, UIN Bukittinggi

“Anak-anak Salareh Aia bisa tertawa saat bermain. Tapi di ruang konseling, mereka menangis. Ini yang saya sebut *silent trauma*. Mereka tidak mengeluh, tapi menarik diri. Masalahnya, sistem pendidikan kita tidak dirancang untuk mendeteksi luka psikis. Guru fokus pada kehadiran dan nilai, bukan pada ekspresi wajah murid. Program dukungan psikososial harus dilanjutkan minimal satu tahun, tidak bisa sekali kunjungan lalu selesai.”

Ketiga ahli sepakat: anak yang trauma tidak bisa belajar. Pemulihan psikososial bukan pelengkap, melainkan prasyarat. Anggaran Rp700 miliar harus dipastikan tidak habis untuk birokrasi, tapi benar-benar menyentuh anak di tenda-tenda pengungsian. Kolaborasi dengan

organisasi profesi psikologi dan perguruan tinggi di Sumatera menjadi kunci karena mereka memiliki modal kultural dan akses ke komunitas.

Menuju Sekolah Tangguh: Negara Pastikan Belajar Tak Boleh Berhenti

Dengan fakta lapangan dan kritikan publik terkait kinerja pemerintah dalam menanggapi bencana Sumatera, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, tak tinggal diam. Di tengah masa tanggap darurat, ia bersama jajaran pejabat Kemendikdasmen terjun langsung ke lokasi.

Pada awal Januari 2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, meninjau SMA Negeri 12 Kota Padang.

“Nah, adapun yang rusak berat dan sudah tidak bisa digunakan lagi, insya Allah akan kami prioritaskan untuk program revitalisasi tahun ini,” ujarnya di Padang, Senin (5/1/2026).

Pernyataan itu bukan sekadar janji. Seperti yang telah dijabarkan di atas, Pemerintah langsung bergerak cepat dengan menerbitkan landasan hukum. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana menjadi acuan nasional.

“Pendidikan tidak boleh terhenti akibat bencana. Namun, keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” tegas Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).

SE tersebut memberikan kelonggaran luar biasa bagi sekolah. Kurikulum dapat disederhanakan, fokus pembelajaran diarahkan pada dukungan psikososial, literasi,

numerasi, dan mitigasi bencana. Bahkan, sekolah diberikan fleksibilitas untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan.

“Bentuk ujian dapat berupa portofolio, penugasan, atau tes tertulis sederhana. Tidak diwajibkan menyelenggarakan ujian khusus,” demikian bunyi SE tersebut.

Ini adalah terobosan penting agar anak-anak tak terbebani target akademis di tengah trauma pascabencana.

Fondasi Revitalisasi yang Akurat

Revitalisasi bukan perkara sederhana. Butuh data valid agar bantuan tepat sasaran. Di sinilah peran Biro Perencanaan dan Kerja Sama serta jajaran teknis di daerah bekerja keras.

Di Lhokseumawe, Aceh, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), Gogot Suharwoto, membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Selasa (13/1/2026). Rakor ini melibatkan Dinas Pendidikan Aceh, Kepala BPMP, serta jajaran dari 18 kabupaten/kota terdampak.

“Target kita, pada minggu terakhir Januari seluruh data sudah valid sehingga bantuan dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Gogot.

Data yang dikumpulkan mencakup kerusakan ruang kelas, ruang guru, peralatan sekolah, hingga fasilitas sanitasi. Fokusnya jelas, memastikan sekolah yang rusak berat segera dibangun ulang, sementara yang rusak ringan dan sedang diperbaiki agar layak pakai.

Hasilnya, pada akhir Januari 2026, pemerintah telah memproses



Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk 114 satuan pendidikan di Aceh, yang terdiri atas 99 SMK, 13 SLB, dan 2 PKBM. Total nilai bantuan yang diproses mencapai Rp 274,18 miliar.

Membangun Sekolah, Merajut Asa

Menteri Abdul Mu'ti tak ingin program ini berjalan lamban. Dalam kunjungannya ke Aceh pada 28-30 Januari 2026, ia mengungkapkan adanya kerja sama strategis dengan TNI Angkatan Darat.

"Kami bekerja sama dengan TNI AD untuk pembangunan unit sekolah baru. Sementara untuk kelas darurat, kami menggandeng berbagai lembaga yang memiliki komitmen terhadap rehabilitasi pendidikan di Aceh," jelas Mendikdasmen.

Skema ini dipilih agar pembangunan

fisik bisa dilakukan dengan cepat dan efisien, terutama untuk sekolah-sekolah di lokasi terpencil yang sulit dijangkau kontraktor sipil. Untuk sekolah yang harus direlokasi karena berada di zona rawan bencana, pemerintah pusat juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Salah satu contohnya adalah SMP Negeri 22 Takengon, Aceh Tengah. Sekolah ini berkali-kali tertimpa longsor dan kondisinya sudah rusak berat. Abdul Mu'ti, saat meninjau langsung lokasi, memastikan bahwa bangunan lama sudah tak layak pakai dan akan direlokasi. "Insyaallah, sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru pada tahun 2026," ujarnya dalam pernyataan di Kompas.com,

(29/1/2026).

Sementara itu, untuk SD Negeri 12 Bintang yang juga terdampak longsor di bagian belakang, pemerintah tak hanya memperbaiki, tetapi juga memberikan bantuan tambahan berupa pembangunan ruang kelas baru.

Peresmian 76 Sekolah, Harapan Baru di Tanah Rencong

Puncak dari kerja keras birokrasi dan teknis di lapangan terlihat pada akhir Januari 2026. Menteri Abdul Mu'ti meresmikan 76 sekolah hasil revitalisasi yang tersebar di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Peresmian dilakukan di dua titik pusat. Pertama, di SD Negeri 12 Bintang, Aceh Tengah, yang mewakili 53 satuan



pendidikan di Aceh Tengah dan Bener Meriah yang revitalisasinya telah rampung 100 persen dari anggaran tahun 2025. Kedua, di SMA Negeri 1 Baktiya, Aceh Utara, yang mewakili 23 satuan pendidikan lainnya.

“Sekolah harus kembali menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman. Karena itu, revitalisasi tidak hanya menysasar bangunan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan pendidikan,” kata Abdul Mu’ti mengutip Kompas.com Kamis (29/1/2026).

Kesaksian warga sekolah menjadi bukti nyata dampak program ini. Yusbida, Kepala SLB Negeri Silih Nara Angkup, Takengon, mengaku sekolahnya dulu sangat kekurangan ruang kelas dan fasilitas pendukung.

“Saya berharap, program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat terus berlanjut agar semakin banyak sekolah di daerah memperoleh lingkungan belajar yang layak,” katanya kepada Borneonews, Jumat (30/1/2026).

Hal senada disampaikan Marhamah, Kepala SMAN 1 Timang Gajah, Bener Meriah. Ia bersyukur karena rumah ibadah sekolah dan laboratorium IPA

yang rusak berat kini telah diperbaiki.

“Apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Mendikdasmen atas perhatian dan dukungan pemerintah (merehabilitasi sekolah) karena manfaatnya dirasakan nyata,” ujarnya penuh haru.

Bagi para siswa, kembalinya sekolah yang layak adalah kembalinya masa depan. Alfrizi Maulana, siswa kelas XI SMK Ummul Ayman 2, Pidie Jaya, mengaku kesulitan mengikuti pembelajaran praktik karena fasilitas rusak akibat banjir. “Kami rindu belajar di kelas yang nyaman dengan fasilitas praktik yang lengkap,” katanya. Kini, dengan ditandatanganinya PKS revitalisasi untuk sekolahnya, kerinduan itu segera terobati.

Anggaran Raksasa untuk Masa Depan Rp. 14,06 Triliun

Program revitalisasi sekolah pascabencana ini bukanlah program tambal sulam biasa. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang belajar di bangunan rusak.

Menteri Abdul Mu’ti, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/2/2026), mengungkapkan bahwa total anggaran revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 mencapai Rp14,06 triliun.

Dari jumlah tersebut, prioritas utama diberikan untuk:

- Pemulihan sekolah pascabencana.
- Revitalisasi sekolah dengan kerusakan berat dan sedang.
- Revitalisasi dan rehabilitasi sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
- Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Jadi prioritasnya untuk revitalisasi 2026 adalah pertama sekolah yang di daerah bencana,” tegas Abdul Mu’ti.

Khusus untuk sekolah terdampak bencana di Sumatera, khususnya Aceh, pemerintah telah mengalokasikan Rp 2,4 triliun.

Anggaran ini akan digunakan untuk pembongkaran total sekolah rusak berat, pembangunan baru, serta perbaikan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, dan ruang praktik.

Pembelajaran Adaptif dan Masa Depan yang Inklusif

Revitalisasi fisik hanyalah satu sisi dari koin. Sisilainnya adalah bagaimana proses belajar mengajar dijalankan di tengah masa transisi. Surat Edaran No. 1/2026 mengamanatkan metode pembelajaran yang adaptif.

Sekolah dapat menggunakan metode tatap muka terbatas atau pembelajaran mandiri yang fleksibel. Mereka juga diwajibkan mengoptimalkan dukungan psikososial bagi murid. Di beberapa lokasi, sebelum bangunan permanen selesai, proses belajar dilakukan di sekolah darurat. Di Aceh, Kemendikdasmen menggandeng berbagai lembaga dan organisasi masyarakat untuk mengelola kelas-kelas darurat ini.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memastikan bantuan langsung menyentuh siswa. Saat kunjungan ke Padang, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat menyerahkan bantuan operasional untuk sekolah sebesar Rp15 juta per jenjang, serta bantuan alat tulis, makanan, dan susu kaleng untuk peserta didik.

Untuk jangka panjang, modernisasi pembelajaran juga mulai digagas. Sekolah-sekolah penerima bantuan, terutama yang berada di wilayah



pegunungan dan terpencil seperti di Aceh Tengah, akan didorong untuk menggunakan teknologi.

Papan Interaktif Digital (PID) dan dukungan konektivitas internet berbasis satelit disiapkan untuk menjawab tantangan geografis. Dengan cara ini, meskipun sekolah berada di lembah atau lereng gunung, akses pengetahuan tetap terbuka lebar.

Negara Hadir, Belajar Tak Terputus

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dicanangkan Kemendikdasmen di tahun 2026 ini bisa dibilang sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang paling nyata dirasakan masyarakat di daerah bencana. Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan setelah bencana,

kebijakan sudah dirumuskan, data divalidasi, anggaran digelontorkan, dan puluhan sekolah diresmikan kembali.

Ini adalah perubahan paradigma. Dari yang tadinya hanya sekadar “memperbaiki” bangunan, kini menjadi “merevitalisasi” ekosistem pendidikan. Bangunan dibuat lebih tahan gempa, direlokasi jika perlu, dan dilengkapi fasilitas yang mendukung pembelajaran abad ke-21.

“Pemulihan sekolah pascabencana adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang bermutu,” kata Abdul Mu’ti saat meresmikan sekolah di Aceh Utara.

Pernyataan itu kini menjelma menjadi tembok-tembok kokoh

sekolah di Aceh. Menjadi atap baru yang melindungi cita-cita anak-anak dari terik matahari dan derasny hujan. Menjadi halaman tempat mereka kembali bermain, tertawa, dan belajar untuk masa depan.

Revitalisasi ini adalah awal, bukan akhir. Dengan target penyelesaian penuh di tahun 2026, pemerintah optimistis seluruh sekolah terdampak di Sumatera, dan nantinya di seluruh Indonesia, akan kembali beroperasi normal. Layanan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas adalah fondasi bangsa. Dan fondasi itu, meski sempat diguncang gempa dan diterjang banjir, kini sedang diperkuat, untuk selamanya.

KESEJAHTERAAN GURU HARUS TERUS DIPERJUANGKAN

Pendidikan merupakan proses panjang menciptakan peradaban maju dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjadi cahaya penuntun agar manusia mampu membedakan antara yang benar dan salah.

Negara maju terbentuk bukan karena kekuatan militer yang tangguh, atau kekayaan alam yang melimpah. Namun, negara maju karena menjadikan pendidikan menjadi investasi utama dalam pembangunan bangsa.

Pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa telah dibuktikan oleh negara Jepang. Negara matahari terbit ini saat kalah perang melawan Sekutu pada tahun 1945 langkah pertama yang dilakukan adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang cerdas agar bisa membangun kembali negara yang telah hancur lebur oleh ledakan nuklir.

Hal tersebut dipersiapkan oleh Kaisar Hirohito dengan bertanya “ada berapa guru yang masih hidup?”. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa kaisar memiliki kesadaran tinggi bahwa Jepang akan kembali bangkit dengan fokus dalam membangun pendidikan untuk warganya. Dan langkah tersebut pun telah terbukti, saat ini Jepang menjadi salah satu negara Asia yang sangat diperhitungkan dalam segala aspek, baik ekonomi, iptek bahkan sampai aspek olahraga.

Guru adalah kunci

Pendidikan merupakan proses menanamkan nilai dan ilmu pengetahuan kepada manusia. Semua negara pun tahu bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah bangsa menjadi lebih baik. Sehingga negara akan berinvestasi besar-besaran dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan warga nya.

Misalnya, Tiongkok. Negara tirai bambu ini menginvestasikan anggaran negaranya secara besar-besaran untuk pendidikan tinggi dan penelitian. Alhasil, saat ini sejumlah universitas di negara tersebut melesat secara kualitas dan masuk menjadi universitas yang diperhitungkan di dunia.

Finlandia juga melakukan hal yang sama, investasi besar

untuk pendidikan dengan fokus pada pengembangan kompetensi guru, pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Meningkatkan kualitas pendidikan di suatu bangsa tidak bisa terlepas dari peran guru. Sebab, dalam sistem pendidikan guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menghasilkan generasi penerus yang unggul dan berdaya saing. Maka itu, guru adalah kunci dalam menentukan masa depan pendidikan suatu bangsa. Sebab, guru yang berkualitas dalam mendidik dan mengajar menjadi prasyarat penting bagi kemajuan dunia pendidikan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah hitung-hitungan dalam berinvestasi khususnya untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia.

Komitmen pemerintah untuk guru

Dalam meningkatkan kualitas guru di Indonesia, pemerintah harus melakukan investasi dalam tiga aspek. Pertama, investasi untuk kesejahteraan guru, yakni dengan memberikan tunjangan yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal. Aspek yang kedua, tidak hanya memberikan kesejahteraan investasi yang harus dilakukan adalah mengembangkan kemampuan profesionalisme mereka. Serta, yang ketiga, investasi pada guru dapat dilakukan dengan memberikan jaminan kepastian perlindungan hukum saat mereka bertugas. (Catur Nurrochman, 2024).

Melihat aspek pertama; jika dibanding dengan negara-negara maju, soal kesejahteraan guru di Indonesia masih terus diperjuangkan secara serius oleh pemerintah. Sebab, masih banyak kita temukan guru honorer atau non ASN berpenghasilan rendah. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal mereka masih sangat kurang.

Salah satu contoh kasus di lapangan dalam (Mansir, 2020) adalah seorang guru honorer di sebuah sekolah di Bengkulu yang mengeluhkan gajinya hanya sebesar Rp300.000, meskipun beban kerja dan tanggung jawabnya setara dengan guru PNS. Setelah mengajar, ia masih harus bekerja di sawah dan kebun untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena penghasilan dari profesinya sebagai guru

tidak mencukupi. Kasus yang serupa juga terjadi di sejumlah daerah.

Rendahnya penghasilan guru harus segera mendapatkan perhatian pemerintah. Sebab ini tidak hanya berdampak pada motivasi dan kinerja guru, tetapi juga pada kualitas pendidikan secara keseluruhan (Hasanah & Zainuddin, 2024).

Melihat kondisi ini tentunya menjadi tantangan yang sangat berat. Namun, pemerintah terus berikhtiar dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan guru. Komitemen tersebut telah dilakukan oleh Kemendikdasmen. Pada tahun 2026 Kemendikdasmen telah menganggarkan lebih dari Rp14 triliun untuk aneka tunjangan bagi guru non-ASN.

Mulai tahun 2026, pemerintah menaikkan insentif untuk guru non-ASN, yang sebelumnya Rp 300.000 menjadi Rp 400.000 per orang per bulan. Kenaikan ini diharapkan dapat mendorong profesionalisme guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan menjadi motivasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih berkualitas.

Dengan adanya kenaikan ini, Kemendikdasmen telah menganggarkan sekitar Rp1,8 triliun dengan total guru penerima sebanyak 377.143. Anggaran ini naik lebih dari Rp1 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemerintah juga menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik sesuai persyaratan yang berlaku sebesar Rp2 juta per bulan. Bagi guru yang telah memiliki inpassing, besaran TPG disesuaikan dengan gaji pokok yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) inpassing.

Besaran TPG ini meningkat sebanyak Rp500 ribu dibanding tahun-tahun sebelumnya, yang sebesar Rp1,5 juta per bulan. Di tahun 2026 ini, pemerintah menganggarkan sekitar Rp11,5 triliun, yang akan disalurkan kepada 392.870 guru non-ASN. Dibandingkan tahun 2025, anggaran ini mengalami kenaikan sekitar Rp663 miliar.

Selain itu, untuk tunjangan khusus bagi guru non-ASN berdasarkan kondisi geografis atau guru yang bertugas di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp2 juta per orang per bulan atau

setara dengan TPG. Pada tahun 2026, Kemendikdasmen menganggarkan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sekitar Rp706 miliar, naik Rp95 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah guru penerima juga mengalami kenaikan sebanyak 2.239 guru, sehingga total guru penerima TKG pada tahun ini sebanyak 28.892 guru.

Tidak hanya soal peningkatan kesejahteraan, pemerintah juga terus mengembangkan kemampuan profesionalisme guru Indonesia, yakni guru non-ASN mendapatkan akses untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), baik PPG Calon Guru maupun PPG Guru Tertentu.

Sepanjang tahun 2024 s.d. 2025, tercatat lebih dari 750 ribu guru non-ASN mengikuti PPG, baik melalui jalur PPG Calon Guru maupun PPG Guru Tertentu. Melalui PPG, guru berhak mendapat kesempatan yang setara untuk memperoleh sertifikasi pendidik sebagai pengakuan profesional sekaligus upaya peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah.

Meski masih banyak guru di Indonesia berpenghasilan rendah, jauh dari kata sejahtera namun upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kemendikdasmen patut diapresiasi. Ini adalah bentuk komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan guru.

Belum tersentuhnya semua guru dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah ini hal yang rasional. Sebab, ruang fiskal pemerintah terbatas- sehingga belum mampu bisa mengcaver seluruh guru yang ada di Indonesia.

Namun, penulis berprasangka baik pemerintah akan secara berkahap berupaya untuk menginvestasikan dana sebesar-besarnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Termasuk dalam upaya menghadirkan kesejahteraan guru-guru Indonesia. Sebab, ini merupakan amanat konstitusi. Republik ini dilahirkan salah satu tujuan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga pendidikan akan menjadi perhatian utama oleh negara. Semoga.

Oleh: Amir Fiqi,

Penulis adalah Guru SMA Muhammadiyah 04 Kota Tangerang, Banten

"LAUT BERCEKITA" – LUKA SEJARAH DAN SUARA YANG TAK PERNAH PADAM

Novel *Laut Berceita* karya Leila S. Chudori, yang pertama kali terbit pada Oktober 2017 melalui Kepustakaan Populer Gramedia, adalah salah satu karya sastra Indonesia yang paling berpengaruh dalam dekade terakhir. Dengan latar tragedi penculikan aktivis menjelang reformasi 1998, novel ini bukan sekadar fiksi, melainkan jendela yang membuka kembali luka sejarah bangsa. Leila, yang juga dikenal sebagai wartawan majalah *Tempo*, menulis dengan gaya naratif yang puitis sekaligus tajam, menghadirkan kisah yang menyentuh hati dan menggugah kesadaran sosial.

Cerita dalam *Laut Berceita* dibangun melalui dua perspektif utama. Pertama, dari sudut pandang para aktivis yang diculik, disiksa, dan hilang tanpa jejak. Kedua, dari sudut pandang keluarga dan sahabat yang ditinggalkan, yang harus menanggung rasa kehilangan dan ketidakpastian. Tokoh sentralnya adalah Biru Laut, seorang mahasiswa aktivis yang penuh semangat memperjuangkan keadilan. Melalui Laut, pembaca diajak menyelami dunia pergerakan mahasiswa, idealisme yang membara, serta ketakutan yang menghantui ketika aparat mulai melakukan penculikan sistematis. Di sisi lain, keluarga Laut, terutama adiknya Asmara Jati, menjadi simbol penderitaan orang-orang yang ditinggalkan. Kehilangan yang mereka alami bukan hanya kehilangan fisik, tetapi juga kehilangan harapan dan kepastian.

Leila menulis dengan detail yang kuat, menghadirkan suasana kampus, ruang diskusi, hingga ruang gelap

penyiksaan dengan intensitas yang nyata. Ia tidak menampilkan kekerasan secara vulgar, tetapi cukup untuk membuat pembaca merasakan ketegangan dan ketidakadilan. Novel ini juga menyinggung bagaimana aparat negara, yang seharusnya melindungi rakyat, justru menjadi pelaku kekerasan. Dalam salah satu bagian, digambarkan bagaimana para aktivis dipaksa mengkhianati kawan sendiri, sebuah dilema moral yang menghancurkan jiwa.

Selain tragedi politik, *Laut Berceita* juga mengangkat tema persahabatan, cinta, dan keluarga. Hubungan Laut dengan sahabat-sahabatnya, dengan kekasihnya, dan dengan keluarganya, menjadi lapisan emosional yang memperkuat cerita. Novel ini bukan hanya tentang politik, tetapi juga tentang manusia yang mencintai, kehilangan, dan berjuang. Leila berhasil menyeimbangkan antara narasi historis dan narasi personal, sehingga pembaca tidak hanya memahami peristiwa, tetapi juga merasakan luka yang ditinggalkan.

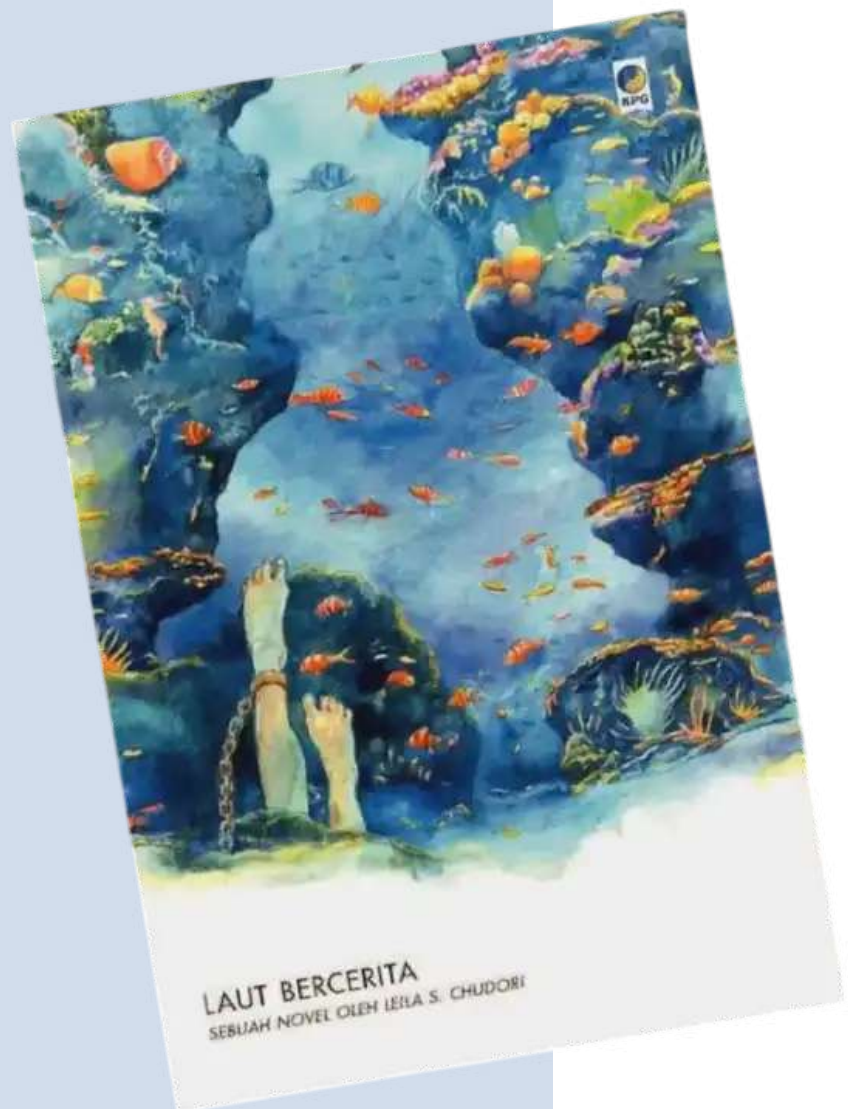
Novel setebal hampir 400 halaman ini membawa pembaca kembali ke era 90-an dan awal 2000-an, masa transisi penuh gejolak. Reformasi 1998 memang melahirkan demokrasi baru, tetapi juga meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Banyak aktivis yang hilang tidak pernah ditemukan, dan keluarga mereka masih menunggu jawaban. *Laut Berceita* menjadi pengingat bahwa sejarah tidak boleh dilupakan, dan keadilan tidak boleh diabaikan.

Kekuatan novel ini juga terletak pada gaya bahasa Leila yang indah dan puitis. Ia mampu merangkai

kalimat yang sederhana namun penuh makna, menghadirkan suasana laut sebagai metafora kehilangan dan harapan. Laut dalam novel ini bukan hanya nama tokoh, tetapi juga simbol luasnya penderitaan dan dalamnya cinta. Pembaca diajak untuk mendengar suara-suara yang tenggelam, suara-suara yang tidak pernah benar-benar padam.

Sejak diterbitkan, *Laut Bercerita* mendapat banyak apresiasi. Leila S. Chudori menerima penghargaan The S.E.A Write Award 2020, sebuah pengakuan internasional atas kontribusinya dalam sastra Asia Tenggara. Novel ini juga diadaptasi menjadi film pendek berdurasi 30 menit, yang semakin memperluas jangkauan pesan dan kisahnya.

Dampak novel ini terhadap pembaca sangat besar. Banyak yang mengaku tersentuh, bahkan menangis, ketika membaca kisah Laut dan keluarganya. Novel ini membuka kembali diskusi tentang penculikan aktivis, tentang tanggung jawab negara, dan tentang pentingnya mengingat sejarah. Ia menjadi bagian dari literasi politik bangsa, mengajarkan bahwa demokrasi tidak datang begitu saja, melainkan melalui perjuangan dan pengorbanan.



Secara keseluruhan, *Laut Bercerita* adalah karya sastra yang mendalam, detail, dan penuh makna. Ia menggabungkan sejarah dengan fiksi, politik dengan cinta, tragedi dengan harapan. Leila S. Chudori berhasil menghadirkan novel yang bukan hanya indah secara literer, tetapi juga penting secara sosial. Novel ini layak dibaca bukan hanya oleh pecinta sastra, tetapi oleh siapa saja yang ingin memahami sejarah bangsa dan menghargai suara-suara yang hilang.

"I WAS A STRANGER" – DRAMA KEMANUSIAAN DI TENGAH KRISIS PENGUNGSI

Film *I Was a Stranger* yang dirilis akhir 2025 dan kini ramai dibicarakan sepanjang awal 2026, hadir sebagai salah satu karya sinema yang paling menyentuh dan relevan dengan isu global. Disutradarai, ditulis, sekaligus diproduksi oleh Brandt Andersen, film ini menjadi debut penyutradaraan yang berani dan penuh empati. Dengan latar belakang perang dan krisis pengungsi, *I Was a Stranger* menyoroti bagaimana manusia dari latar berbeda dipertemukan oleh tragedi, lalu diuji oleh pilihan moral, keberanian, dan rasa kemanusiaan.

Cerita film ini berpusat pada seorang dokter asal Suriah yang melarikan diri dari Aleppo bersama putrinya. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan sosok-sosok lain: seorang penyelundup, seorang tentara, seorang penyair, dan seorang kapten penjaga pantai. Lima orang asing ini, yang berasal dari latar belakang berbeda, dipaksa berinteraksi dalam situasi penuh ketidakpastian. Pertemuan mereka bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari perang, migrasi, dan pencarian tempat aman. Narasi film menekankan bahwa dalam kondisi ekstrem, manusia diuji bukan hanya oleh rasa takut, tetapi juga oleh kemampuan untuk berempati dan berkorban.

Film ini mengambil lokasi di berbagai negara, termasuk Yordania, Palestina, Israel, dan Turki. Latar geografis yang beragam memperkuat nuansa lintas batas, menegaskan bahwa krisis pengungsi bukan masalah satu bangsa saja, melainkan tragedi global. Dengan durasi 104 menit, film ini berhasil merangkai kisah yang padat, emosional, dan penuh ketegangan.

Deretan pemeran yang terlibat juga memperkuat kualitas film. Yasmine Al Massri, Yahya Mahayni, Omar Sy, Ziad Bakri, dan Jason Beghe tampil dengan intensitas yang tinggi, menghadirkan karakter-karakter yang

kompleks dan manusiawi. Penampilan mereka bukan sekadar akting, melainkan perwujudan nyata dari penderitaan, harapan, dan keteguhan hati. Omar Sy, misalnya, dikenal luas lewat film *The Intouchables*, dan di sini ia membawa karisma yang sama, namun dengan nuansa lebih gelap dan penuh luka. Yasmine Al Massri menghadirkan sosok ibu yang rapuh sekaligus kuat, mencerminkan dilema seorang perempuan yang harus melindungi anaknya di tengah kehancuran.

Secara teknis, film ini digarap dengan sinematografi oleh Jonathan Sela, yang sebelumnya dikenal lewat karya-karya aksi besar. Namun dalam *I Was a Stranger*, Sela menghadirkan visual yang intim, penuh close-up, dan pencahayaan natural yang menekankan realisme. Editing oleh Jeff Seibeneck menjaga ritme cerita tetap tegang, sementara musik karya Nick Chuba menambah lapisan emosional yang subtil, tidak berlebihan, tetapi menghantui.

Tema besar film ini adalah krisis pengungsi, sebuah isu yang hingga kini masih menjadi luka dunia. Andersen tidak menampilkan pengungsi sebagai angka statistik, melainkan sebagai manusia dengan cerita, mimpi, dan trauma. Ia ingin penonton melihat wajah-wajah nyata di balik berita, merasakan ketakutan mereka, sekaligus memahami keberanian yang lahir dari keterdesakan. Dalam wawancara, Andersen pernah mengatakan bahwa film ini adalah upaya untuk "menyuarakan mereka yang tidak punya suara." Pernyataan itu tercermin jelas dalam setiap adegan, di mana penderitaan tidak ditampilkan sebagai sensasi, melainkan sebagai realitas yang harus dihadapi.

Selain itu, film ini juga menyinggung isu moral yang lebih luas: bagaimana dunia merespons krisis pengungsi. Ada tentara yang harus memilih antara menjalankan perintah atau mengikuti hati nurani. Ada

penyelundup yang dihadapkan pada dilema antara mencari keuntungan atau membantu sesama. Ada kapten penjaga pantai yang harus menentukan apakah ia akan menutup mata atau membuka pintu bagi orang-orang yang putus asa. Semua karakter ini adalah representasi dari dilema global: apakah kita akan menolak atau menerima, apakah kita akan menutup atau membuka, apakah kita akan mengabaikan atau peduli.

Respon kritikus terhadap *I Was a Stranger* cukup positif. Banyak yang menilai film ini sebagai karya yang berani, menyentuh, dan relevan. Meski box office hanya mencatat sekitar 2 juta dolar, film ini lebih dipandang sebagai karya seni dan pernyataan politik ketimbang produk komersial. Festival film internasional, termasuk Berlin, memberikan ruang bagi film ini untuk diputar, dan penonton yang hadir banyak memberikan apresiasi atas keberanian Andersen mengangkat isu yang sering dihindari oleh Hollywood mainstream.

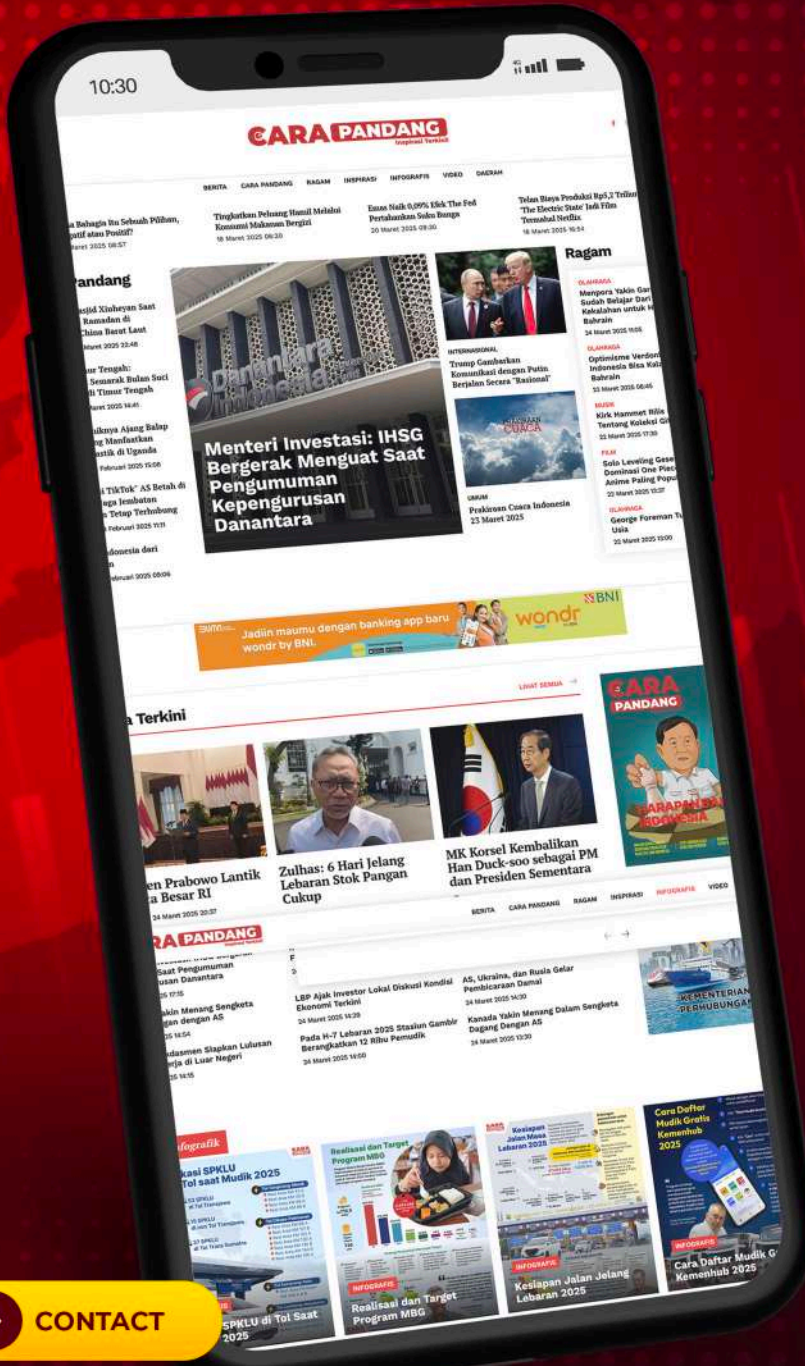
Dari perspektif sosial, film ini menjadi pengingat bahwa krisis pengungsi bukanlah isu yang jauh dari kita. Ia bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Dengan menampilkan kisah seorang dokter, seorang tentara, seorang penyelundup, seorang penyair, dan seorang kapten, film ini menegaskan bahwa tragedi perang dan migrasi menyentuh semua lapisan masyarakat. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang benar-benar aman. Pesan film ini sederhana namun kuat: kemanusiaan adalah satu-satunya jalan keluar dari krisis.

Secara keseluruhan, *I Was a Stranger* adalah film yang mendalam, menyentuh, dan relevan. Ia bukan sekadar tontonan, melainkan pengalaman emosional yang memaksa penonton untuk merenung. Andersen



berhasil menghadirkan karya yang tidak hanya bercerita, tetapi juga bersuara. Di tengah dunia yang sering kali menutup mata terhadap penderitaan pengungsi, film ini hadir sebagai pengingat bahwa di balik setiap angka ada manusia, dan di balik setiap tragedi ada harapan.

I Was a Stranger adalah salah satu film paling penting yang hadir di awal 2026. Ia menggabungkan drama personal dengan isu global, menghadirkan kisah yang penuh luka sekaligus harapan. Dengan sinematografi yang intim, akting yang kuat, dan pesan yang mendalam, film ini layak disebut sebagai karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menggerakkan hati dan pikiran.



Infografis



Majalah



→ CONTACT

0812 1037 9124

carapandangcom@gmail.com

WWW.CARAPANDANG.COM